

**DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA  
AGRIBISNIS PERDESAAN TERHADAP KINERJA  
GAPOKTAN DAN PENDAPATAN ANGGOTA GAPOKTAN**

**SKRIPSI**

**M. KOKO PRIHARTONO  
H34076093**



**DEPARTEMEN AGRIBISNIS  
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2009**

## RINGKASAN

**M. KOKO PRIHARTONO. Dampak Program Pengembangan Agribisnis Perdesaan terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan.** Skripsi. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan **LUKMAN M. BAGA**).

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini, yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, dicanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kehadiran program PUAP diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi petani.

Program PUAP di Jambi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 100 juta untuk setiap desa miskin atau Gapoktan. Salah satu kecamatan yang telah menerima bantuan dana PUAP adalah Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota yang terdiri dari Desa Pembengis, Desa Tanjung Sinjulung, Desa Betara Kiri dan Desa Betara Kanan<sup>1</sup>. Dari keempat desa tersebut penyaluran dana PUAP dilakukan melalui Gapoktan yang terdapat disana. Jumlah Gapoktan yang disahkan menjadi penyalur dana tersebut sebanyak 4 Gapoktan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi karakteristik Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2) Menganalisis pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan PUAP. (3) Menganalisis dampak program PUAP dilihat dari pendapatan anggota Gapoktan PUAP.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga Gapoktan atau tiga desa di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Waktu penelitian dilakukan pada minggu ke tiga bulan Juni sampai minggu ke tiga bulan Juli 2009. Responden penelitian adalah para petani padi anggota Gapoktan penerima BLM-PUAP sebanyak 30 responden. Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan usahatani dan perhitungan uji *t-statistik*.

Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota memiliki karakteristik sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan yang memiliki struktur kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi. Masing-masing jabatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama penting. Jumlah Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota sebanyak tiga Gapoktan terdiri dari: Gapoktan Hasil Berkah; Gapoktan Cahaya Murni; dan Gapoktan Rizki Usaha Berdua. Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan sebelum dan

---

sesudah adanya PUAP berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri. Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan dalam menyalurkan dana BLM-PUAP ke anggotanya dapat dilihat dari kriteria keefektifan penyalurannya. Penyaluran BLM-PUAP dapat dikatakan sudah efektif karena tiga dari kriteria efektivitas penyaluran telah memenuhi kategori efektif (persentase tunggakan, tingkat bunga dan jangkauan pinjaman). Dari ketujuh indikator kinerja Gapoktan, dapat diinformasikan bahwa hanya terdapat tiga indikator kinerja Gapoktan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pendapatan anggota Gapoktan yakni: indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama; indikator anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama; dan indikator adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus. Jadi tanggapan para responden dengan adanya program PUAP adalah bahwa sebagian besar responden menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena mereka merasakan merasakan manfaat dari pinjaman tersebut. Rata-rata pendapatan anggota Gapoktan sebelum dan sesudah menerima BLM-PUAP mengalami peningkatan.

**DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA  
AGRIBISNIS PERDESAAN TERHADAP KINERJA  
GAPOKTAN DAN PENDAPATAN ANGGOTA GAPOKTAN**

**M. KOKO PRIHARTONO  
H34076093**

**Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada  
Departemen Agribisnis**

**DEPARTEMEN AGRIBISNIS  
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2009**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan  
Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan

Nama : Muhammad Koko Prihartono  
NRP : H34076093

Disetujui,  
Pembimbing

**Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec**  
NIP. 19640220 198903 1001

Diketahui  
Ketua Departemen Agribisnis  
Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
Institut Pertanian Bogor

**Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS**  
NIP. 19580908 198403 1002

Tanggal Lulus :

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2009

M. Koko Prihartono  
H34076093

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada tanggal 31 Juli 1986. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sutarji dan Ibu Salamah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri I/V Kuala Tungkal pada tahun 1998 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2001 di SLTPN 2 Kuala Tungkal. Pendidikan lanjutan menengah atas di SMUN 1 Kuala Tungkal diselesaikan pada tahun 2004.

Penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Diploma III Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2004. Selama mengikuti pendidikan, penulis tercatat sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa “Aikido Bogor” sebagai wakil ketua periode 2006-2007. Penulis juga aktif di klub fotografi ‘LENSA’ Fakultas Pertanian periode 2005-2007.

Tahun 2007 penulis diterima pada Program Penyelenggaraan Khusus Sarjana Agribisnis, Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik Gapoktan, pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan dan menganalisis dampak program PUAP dilihat dari pendapatan anggota Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan pada skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Agustus 2009

M. Koko Prihartono



## UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ir. Netti Tinaprilla, MM dan Ir. Narni Farmayanti, MS selaku dosen penguji pada ujian sidang penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.
3. Rahmat Januar, SP, M.Si selaku dosen evaluator yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.
4. Orang tua dan keluarga tercinta untuk setiap dukungan cinta kasih dan doa yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang terbaik.
5. Dosen-dosen dan staf pendidikan Agribisnis yang telah memberikan masukan kepada peneliti.
6. Pak Haji Dwi Susanto selaku guru spiritual yang telah memberikan dan mengajarkan serta diskusinya sehingga penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat
7. Khoirul Aziz selaku asisten dosen Bapak Lukman atas motivasi, arahan dan masukannya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Fitri Azizah, S.Si dan keluarga besar di Blitar atas doa dan dukungannya.
9. Dinas Pertanian dan Badan Penyuluhan Pertanian serta PPL Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas masukan, arahan serta kerjasamanya selama peneliti melakukan penelitian

Bogor, Agustus 2009

M. Koko Prihartono

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Ruang Lingkup.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Umum Bentuk Bantuan Modal pada Pertanian .....	11
2.2 Kelembagaan dan Peran Kelembagaan.....	18
2.3 Kelompok Tani .....	20
2.4 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).....	21
<b>BAB III KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
3.1 Kerangka Teoritis.....	29
3.1.1 Evaluasi Program PUAP.....	29
3.1.2 Penilaian Kinerja Gapoktan .....	31
3.2 Konsep Usahatani .....	32
3.2.1 Pendapatan Usahatani .....	34
3.2.2 Imbangan Penerimaan dan Biaya.....	36
3.3 Kerangka Pemikiran Operasional .....	36
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
4.2 Jenis dan Sumber Data.....	40
4.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
4.4 Metode Pengambilan Sampel.....	41
4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	43
4.5.1 Identifikasi Karakteristik Gapoktan PUAP.....	43
4.5.2 Analisis Kinerja Gapoktan PUAP.....	44
4.5.3 Analisis Pendapatan Petani .....	46
<b>BAB V GAMBARAN UMUM</b>	
5.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	49
5.2 Gambaran Desa Penelitian PUAP.....	50
5.3 Gambaran Karakteristik Petani Responden .....	53

**BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAAN**

6.1 Karakteristik Gapoktan .....	58
6.2 Pengaruh PUAP Terhadap Kinerja Gapoktan.....	73
6.3 Dampak PUAP Dilihat Dari Pendapatan Anggota Gapoktan..	103

**BAB VIII.KESIMPULAN DAN SARAN**

7.1 Kesimpulan .....	112
7.2 Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA .....** 115

**LAMPIRAN .....** 116

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia.....	1
2. Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006-2007.....	2
3. Jumlah dan Presentase Penduduk di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2000-2007 .....	3
4. Skala Skor Penilaian Efektivitas.....	45
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Masyarakat Desa Pembengis, Tahun 2009.....	50
6. Jumlah Penduduk Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Senjulang Tahun 2009.....	51
7. Jumlah Penduduk Mata Pencarian Masyarakat Desa Tungkal IV Tahun 2009.....	52
8. Karakteristik Petani Responden Penerima BLM-PUAP Berdasarkan Status Mata Pencarian Usahatani Padi.....	53
9. Sebaran Petani Responden Menurut Golongan Umur.....	54
10. Sebaran Responden Petani Padi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
11. Jumlah Petani Responden Berdasarkan Kriteria Luasan Lahan Padi yang Dimiliki Tahun 2009 .....	55
12. Jumlah Petani Responden Berdasarkan Kriteria Pengalaman Berusahatani.....	56
13. Perkembangan Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya Sebelum dan Sesudah Adanya Program BLM-PUAP.....	64
14. Realisasi Dana BLM-PUAP di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulang dan Desa Tungkal IV Desa Tahun 2008 .....	73
15. Hasil Uji Korelasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di Gapoktan Sebelum dan Sesudah PUAP .....	75
16. Hasil Uji Korelasi Keterlibatan Anggota dalam Penyusunan RUK Dan RUB di Gapoktan Sebelum dan Sesudah PUAP .....	77
17. Hasil Uji Korelasi Rencana Usaha Gapoktan Beroreantasi Pada Kepentingan Anggota Sebelum dan Sesudah PUAP .....	78
18. Hasil Uji Korelasi Kegiatan Bersama Pada Gapoktan Sebelum dan Sesudah PUAP .....	80
19. Hasil Uji Korelasi Keterlibatan Anggota Gapoktan Dalam Pengambilan Keputusan Sebelum dan Sesudah PUAP .....	81

20. Hasil Uji Korelasi Kemampuan Gapoktan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya .....	83
21. Hasil Uji Korelasi Indikator Adanya Aktivitas Pendidikan.....	84
22. Target dan Realisasi Dana BLM-PUAP .....	89
23. Realisasi Penerima PUAP di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulang dan Desa Tungkal IV Desa Tahun 2008 .....	91
24. Tingkat Bunga Pinjaman pada Gapoktan Penyalur PUAP .....	93
25. Penilaian Responden Terhadap Persyaratan Awal PUAP .....	94
26. Penilaian Responden Terhadap Prosedur Peminjaman PUAP .....	96
27. Penilaian Responden Terhadap Realisasi Pinjaman .....	97
28. Penilaian Responden Terhadap Biaya Administrasi Pinjaman.....	98
29. Penilaian Responden Terhadap Tingkat Bunga Pinjaman.....	99
30. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Pengurus Gapoktan .....	100
31. Penilaian Responden Terhadap Jarak/Lokasi Pelayanan .....	100
32. Hasil Perhitungan Skor Penilaian Responden Terhadap Efektivitas Penyaluran BLM-PUAP Tahun 2008 .....	101
33. Rata-Rata Penggunaan Benih Padi Para Petani Responden Sebelum dan Sesudah Adanya PUAP.....	105
34. Rata-Rata Jumlah Penggunaan Pupuk Oleh Petani Responden Sebelum dan Sesudah Adanya PUAP .....	106
35. Rata-Rata Penggunaan Pestisida Petani Responden Sebelum dan Sesudah PUAP di Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota .....	108
36. Rata-Rata Nilai Penggunaan Peralatan Pada Usahatani Padi di Tiga Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota .....	109
37. Nilai Penyusutan Peralatan Pada Usahatani Petani Responden Anggota Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota....	110
38. Rata-Rata Produksi Usahatani Padi Petani Responden Sebelum dan Sesudah Adanya PUAP .....	111
39. Pendapatan Usahatani Padi Rata-Rata Sebelum dan Sesudah PUAP .....	113
40. Hasil Pengujian Statistik t-hitung Terhadap Pendapatan .....	116
41. Perbandingan R/C <i>Rasio</i> Sebelum dan Sesudah PUAP.....	118

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pemikiran Operasional .....	39
2. Hubungan Indikator Kinerja Gapoktan Sebelum dan Sesudah PUAP .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Data Produksi Padi Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi Tahun 2008.....	127
2. Data Produktivitas Padi Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi Tahun 2008.....	128
3. Struktur Organisasi Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.....	129
4. Rata-Rata Pendapatan Petani Responden Dengan Luas Lahan 1Ha di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota Sebelum Adanya PUAP .....	132
5. Output Minitab Uji t-hitung Perubahan Pendapatan Paired T For Pendapatan Usahatani Padi Responden Sebelum dan Sesudah Memperoleh BLM-PUAP .....	135
10. Profil Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota .....	136

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih menghadapi permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, politik maupun bidang-bidang lainnya. Beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah kemiskinan dan pengangguran yang diakibatkan oleh bergesernya pembangunan sektor pertanian ke sektor industri. Ini dibuktikan dengan kontribusi sektor industri dalam produk domestik bruto yang menduduki posisi pertama dengan sumbangan terbesar, kemudian posisi ke dua ditempati oleh sektor perdagangan dan posisi ketiga diduduki oleh sektor pertanian. Terlihat pada tahun 2005 kontribusi sektor pertanian sebesar 15 persen dan kontribusi ini menurun pada tahun 2006 hingga 2008 masing-masing menjadi 14 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2005-2008

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	15	14	14	14
2	Pertambangan dan Penggalian	9	9	9	11
3	Industri Pengolahan	28	28	27	27.9
4	Listrik, Gas dan Air	1	1	1	8
5	Bangunan	6	6	6	8.4
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	17	17	17	14
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	6	7	7	6.3
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan	9	9	9	7.4
9	Jasa Kemasyarakatan	9	9	9	9.8

Sumber: BPS (2009)<sup>1</sup> (data diolah)

<sup>1</sup> BPS. Berita Resmi Statistik No.11/02/Th. XII,16 Februari 2009.[Terhubung Berkala]. [http://www. Google.com//search/PDB Indonesia.html](http://www.Google.com/search/PDB Indonesia.html). Diakses tanggal 15 April 2009.



Perubahan struktur pembangunan mempengaruhi distribusi pendapatan di berbagai sektor usaha, tidak terkecuali dalam penggunaan tenaga kerja. Pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa kesempatan kerja menurut sektor ekonomi tahun 2006 hingga 2008 menyatakan bahwa, sektor industri yang berkontribusi sebesar 28 persen tahun 2006 dan 27,9 persen tahun 2008 hanya menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 0,11 persen sampai 0,15 persen tenaga kerja laki-laki dan 0,11 persen sampai 0,14 persen tenaga kerja perempuan, dibandingkan dengan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2006 hingga 2007 yang justru masih menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 0,22 sampai 0,41 persen tenaga kerja laki-laki dan 0,41 persen tenaga kerja perempuan.

**Tabel 2.** Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006-2007

No	Lapangan Usaha	Tahun 2006 (%)		Tahun 2007 (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Pertanian	0.22	0.41	0.41	0.41
2	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.00	0.01	0.00
3	Industri Pengolahan	0.11	0.15	0.11	0.14
4	Listrik, Gas dan Air	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bangunan	0.07	0.00	0.08	0.00
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	0.17	0.27	0.16	0.28
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	0.09	0.01	0.09	0.01
8	Keuangan, Asuransi, Usaha sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	0.02	0.01	0.02	0.01
9	Jasa Kemasyarakatan/	0.10	0.15	0.11	0.14

Sumber : BPS, (2009)<sup>2</sup> (diolah)

Secara implisit dapat dijelaskan bahwa tingkat produktivitas yang rendah serta penerimaan pendapatan yang sangat rendah terjadi di sektor pertanian juga turut mempengaruhi penggunaan tenaga kerja di sektor usaha masing-masing, sehingga yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk miskin baik di kota maupun di desa. Hasil perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang

<sup>2</sup> BPS. Berita Resmi Statistik No.11/02/Th. XII,16 Februari 2009.[Terhubung Berkala]. <http://www. Google.com//search//PDB Indonesia. html>. Diakses tanggal 15 April 2009.

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun baik di kota maupun di desa terus berfluktuatif. Pada periode 2001 hingga 2007 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 37,90 juta jiwa menjadi 38,52 juta jiwa. Sementara persentase laju pertumbuhan penduduk miskin juga mengalami fluktuatif. Selain itu, pada periode yang sama tahun 2001 sampai 2007 dapat terlihat bahwa jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah perdesaan dari pada di perkotaan.

**Tabel 3.** Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2001-2007

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	14,20	24,32	38,52	12,49	21,89	17,19

Sumber : BPS, (2008)<sup>3</sup> (diolah)

Ini membuktikan bahwa desa masih menjadi pusat kemiskinan. Dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk desa, dapat dikatakan kemiskinan mayoritas terjadi pada penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini selaras dengan pernyataan Menteri Pertanian pada suatu kesempatan bahwa 70 persen masyarakat miskin Indonesia adalah petani, terutama buruh tani yang jumlahnya sangat besar dan memang rawan terhadap kemiskinan.

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Menurut Hakim (2008)<sup>4</sup>, beberapa masalah pertanian yang

<sup>3</sup> BPS.2008.Penduduk Miskin Indonesia.[Terhubung Berkala]. [http://www.Google.com/search//penduduk Indonesia//penduduk miskin indonesia .html](http://www.Google.com/search//penduduk+Indonesia//penduduk+miskin+indonesia+.html). [15 April 2009].

<sup>4</sup> Lukman Hakim.2008. Kelembagaan dan Kemiskinan Indonesia. <http://www.google.com/kelembagaan/html>. [17 April 2009].

dimaksud yaitu pertama, sebagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tidak sedikit petani yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan ruang gerak petani terhadap fasilitas yang dimiliki sehingga membuat petani menjadi tertutup dan lambat dalam merespon perubahan yang terjadi di dunia luar. Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian. Adanya penguasaan informasi oleh sebagian kecil pelaku pasar komoditas pertanian menjadikan petani semakin tersudut. Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian dibawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar petani Indonesia tidak mengandalkan dari sektor pertanian, tetapi dari luar sektor pertanian seperti kerja sampingan buruh pabrik, kuli bangunan dan lain sebagainya.

Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah karena pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain. Faktor penyebab lainnya adalah pemerintah yang berpihak pada sektor industri dari pada sektor pertanian yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan yang dimiliki oleh petani akibat konversi lahan menjadi lahan industri maupun pemukiman.

Keempat, masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Masalah modal tersebut diantaranya adalah sebagian besar petani mengalami kekurangan modal untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, belum adanya asuransi

pertanian, masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani<sup>5</sup>.

Jika ditelusuri lebih jauh, permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (*Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition*) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007).

Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian pada tanggal 11 Juni 2005 dengan program-program utama antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumberdaya dan Pemanfaatan Pemanfaatannya, baik di bidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Salah satu program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Departemen Pertanian RI adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

---

<sup>5</sup> Apriyantono, A. 2004 Pembangunan Pertanian di Indonesia. <http://www.pdfgeni.com//pertanian indonesia.html>. [17 April 2009].

Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor. PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program PUAP memiliki tujuan antara lain: (1) untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani. (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dimulai sejak tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada Gapoktan-Gapoktan dengan nilai Rp 1,0573 trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta<sup>6</sup>. Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan Gapoktan PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis.

Berdasarkan kebijakan teknis program PUAP, sebaran lokasi PUAP meliputi 33 propinsi, 379 kabupaten atau kota, 1.834 kecamatan miskin dan 10.524 desa miskin. Salah satu propinsi yang memperoleh PUAP adalah Propinsi Jambi. Jumlah kuota PUAP untuk Jambi berjumlah 208 yang terbagi dalam sembilan kabupaten atau kota<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Anwar, Khoiril. 2008. Bahan Penjelasan Kepada Pers Tentang Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2007-2008. [www.google.com/search/PNPM\\_mandiri.html](http://www.google.com/search/PNPM_mandiri.html). [Terhubung Berkala]. Diakses tanggal 30 mei 2009.

<sup>7</sup> Departemen Pertanian.2008. Petunjuk Teknis PUAP

## 1.2 Perumusan Masalah

Sumber modal bagi pembiayaan dan modal pertanian dapat diperoleh dari lembaga bank dan non bank. Namun, sebagian besar petani belum bisa mengakses sumber modal tersebut karena adanya keterbatasan dan ketidakmampuan petani untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Adanya keterbatasan dan ketidakmampuan petani dalam mengakses sumber modal dikarenakan tidak adanya titik temu antara petani sebagai debitur dan bank sebagai pihak kreditor.

Di sisi debitur, karakteristik dari sebagian besar petani yakni masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak atau belum memiliki badan usaha resmi, keterbatasan aset yang dimiliki, memiliki lahan yang sempit, bermodal rendah, minim teknologi serta jumlah tenaga kerja yang banyak. Sementara itu, di sisi kreditor sebagai lembaga pemodal menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin resmi serta adanya jaminan. Relatif tingginya tingkat bunga kredit perbankan, prosedur persyaratan yang relatif sulit untuk dipenuhi serta tidak adanya jaminan merupakan faktor penyebab petani menjadi tidak *bankable* atau kesulitan mengakses kredit bank.

Keterbatasan petani dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi meliputi bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan sebagian besar petani mengalami kemunduran dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi banyak terdapat di perdesaan karena sebagian besar petani berada di wilayah desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan modal petani melalui program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang dituangkan dalam program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP). Kehadiran program PUAP diharapkan bisa mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi petani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat ini program PUAP di Jambi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 100 juta untuk setiap desa miskin atau Gapoktan. Salah satu kecamatan yang telah menerima bantuan dana PUAP adalah Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota (Sebelumnya Kecamatan Tungkal Ilir) yang terdiri dari Desa Pembengis, Desa Tanjung Sinjulang, Desa Tungkal IV dan Desa Tungkal V<sup>8</sup>. Dari keempat desa tersebut penyaluran dana PUAP dilakukan melalui Gapoktan yang ada disana. Jumlah Gapoktan yang disahkan menjadi penyalur dana tersebut sebanyak empat Gapoktan.

Pemanfaatan dana PUAP dialokasikan untuk pembelian sarana produksi kegiatan pertanian yang meliputi pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya serta juga digunakan untuk simpan pinjam<sup>9</sup>. Namun pemanfaatan dana tersebut dikhawatirkan digunakan oleh petani tidak pada tempatnya atau terjadi penyimpangan penggunaan dana tersebut. Adanya isu mengenai penyimpangan dana PUAP dikarenakan pandangan para petani bahwa program BLM-PUAP merupakan program bagi-bagi uang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu evaluasi mengenai pemanfaatan dana PUAP yang disalurkan melalui Gapoktan serta pengaruh program PUAP tersebut terhadap pendapatan petani. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menilai apakah pelaksanaan program baru ini memberikan dampak positif baik dalam penyalurannya maupun dalam penggunaan dana tersebut. Evaluasi mengenai pemanfaatan dana PUAP dapat dikaji dari pencapaian sasaran dan pemanfaatan dana tersebut.

---

<sup>8</sup> SK Bupati Tanjung Jabung Barat, No. 581 Tahun 2008 Tentang Gapoktan Pelaksana Program PUAP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

<sup>9</sup> Hasil telewicara dengan Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tanggal 23 April 2009.

Daerah yang dikaji yaitu desa-desa yang telah menerima PUAP diantaranya adalah Desa Pembengis, Desa Tanjung Sinjulang, Desa Tungkal IV dan Desa Tungkal V yang merupakan cakupan Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir (saat ini telah mengalami pemekaran wilayah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota). Selain sebagai desa penerima PUAP, pertimbangan lainnya adalah bahwa kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki potensi baik dalam menghasilkan produksi padi. Ini dibuktikan dengan produksi padi yang dihasilkan pada tahun 2008 sebanyak 8.910 ton. Sementara itu, produktivitas padi di dua kecamatan tersebut termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar 3,41, tertinggi ke dua setelah Kecamatan Pengabuan yaitu sebesar 3,49. Selengkapnya mengenai data produksi dan produktivitas dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kehadiran program PUAP dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani karena program ini pada dasarnya memberikan bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang disalurkan melalui Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha yang mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti apakah program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mampu membantu masalah permodalan petani. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana dampak program PUAP dilihat dari pendapatan anggota Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menganalisis pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Menganalisis dampak program PUAP dilihat dari pendapatan anggota Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi Gapoktan, sebagai bahan masukan perbaikan terhadap perkembangan Gapoktan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bagi Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan diharapkan bisa memberi masukan dan evaluasi serta penilaian kinerja dari masing-masing Gapoktan hasil binaan mereka.
3. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
4. Bagi penulis untuk pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak PUAP dari sisi pendapatan usahatani padi dimana yang menjadi respondennya adalah para petani (anggota Gapoktan) penerima BLM-PUAP tahun 2008. Gapoktan yang diteliti adalah Gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008 yaitu Gapoktan yang berada pada Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota. Penelitian memfokuskan pada kinerja Gapoktan dalam menyalurkan PUAP dan kinerja internal Gapoktan itu sendiri serta melihat hubungan antara kinerja Gapoktan terhadap pendapatan anggota Gapoktan.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Gambaran Umum Bentuk Bantuan Modal pada Pertanian

Bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani pertama kali diperkenalkan pada Tahun 1964 dengan nama Bimbingan Masal (BIMAS). Tujuan dicanangkannya program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional. Dalam perjalanannya, program BIMAS dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan (Hasan,1979 dalam Lubis 2005).

Pada Tahun 1985 kredit BIMAS dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit massal BIMAS, dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui KUD. Sejalan dengan perkembangannya ternyata pola yang demikian banyak menemui kesulitan, utamanya dalam penyaluran kredit. Hal tersebut lebih disebabkan karena tingkat tunggakan pada musim tanam sebelumnya sangat tinggi. Namun dalam kenyataannya banyak kelompok tani yang berada dalam wilayah KUD yang tidak menerima dana KUT, padahal mereka yang berada di wilayah KUD tersebut justru memiliki kemampuan yang baik dalam pengembalian kredit.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut tahun 1995 pemerintah mencanangkan skim kredit KUT pola khusus. Pada pola ini kelompok tani langsung menerima dana dari bank pelaksana. Berbeda dari pola sebelumnya (pola umum) dimana kelompok tani menerima kredit dari KUD. Sepanjang perkembangannya timbul masalah lain dalam penyaluran KUT yaitu terjadi tunggakan yang besar di sebagian daerah yang menerima dana program tersebut. Beberapa penyebab besarnya tunggakan tersebut antara lain karena rendahnya harga gabah yang diterima petani, faktor bencana alam, dan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran serta pemanfaatan dana tersebut. Salah satu contohnya adalah sebagian petani mengalihkan dana KUT dari yang tadinya untuk

keperluan usahatani kemudian dialihkan penggunaannya untuk keperluan konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya perkembangan bentuk program bantuan penguatan modal dari pemerintah lainnya adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program KKP diperkenalkan oleh pemerintah pada Bulan Oktober 2000 sebagai pengganti KUT. Program KKP merupakan bentuk fasilitasi modal untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani.

Skim program ini pengaturannya melalui bank pelaksana yang disalurkan melalui koperasi dan atau kelompok tani. Selanjutnya oleh kedua lembaga dana tersebut disalurkan kepada anggotanya. Pengajuan untuk memperoleh dana tersebut dilakukan melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Adanya program ini, pemerintah sebenarnya telah memberikan subsidi pada beberapa hal antara lain subsidi terhadap tingkat suku bunga, subsidi terhadap risiko kegagalan kredit serta subsidi kepada biaya administrasi dalam penyaluran, pelayanan dan penarikan kredit (Nasution, 1990).

Tahun 2002 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam berusaha. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program BLM ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif; bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Sumodiningrat, 1990 dalam Kasmadi, 2005).

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kepemimpinan di pemerintahan, maka kebijakan penguatan modal di bidang pertanian pun ikut berubah dan dimodifikasi lagi agar lebih baik. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mencanangkan program baru yang diberi nama Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Latar belakang dicanangkannya program PNPM Mandiri diawali dari belum tuntasnya penanganan masalah pengangguran di dalam negeri yang kian meningkat. Apalagi ketika terjadi krisis ekonomi yang juga berdampak pada perubahan pada bidang politik dan sosial, sehingga mengakibatkan iklim usaha di dalam negeri terganggu yang berakhir pada keputusan para perusahaan merumahkan sebagian besar karyawannya bahkan sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut tentunya berpengaruh pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat yang pada akhirnya bermuara pada meluasnya jumlah kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran baik yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ataupun oleh pemerintah daerah cenderung satu dengan yang lainnya tidak terkait, sehingga masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kesenjangan pelaksanaan program antara satu daerah dengan daerah lainnya. Banyak dana yang telah digunakan untuk memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan, tetapi hasilnya masih belum bisa dikatakan berhasil. Pendanaan atau anggaran untuk penanggulangan kemiskinan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2004 jumlah dana yang digunakan mencapai Rp 18 triliun dan tahun 2005 mencapai Rp 32 triliun<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Pidato Menko Kesra pada acara Rapat Kerja Gubernur, Bupati dan Walikota Se Indonesia dalam rangka pemantapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah, 30 Januari 2008 di Jakarta.

Belum berhasilnya penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan dikarenakan selama ini masyarakat miskin dan pengangguran hanya dijadikan objek bukan sebagai pelaku utama<sup>2</sup>. Seharusnya masyarakat miskin ditingkatkan kemampuannya agar dapat menjadi modal sosial untuk kemudian diberdayakan dan ditingkatkan kemandiriannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat justru memberikan hasil yang lebih efektif dan tingkat keberlanjutannya jauh lebih baik dari pada yang dilaksanakan oleh proyek seperti "biasa"<sup>3</sup>.

Mulai tahun 2007 pemerintah menetapkan adanya kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan cakupan dan konsolidasi program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini sebagai wadah bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat di seluruh kementerian atau lembaga. Perlu diketahui juga bahwa program ini bukan merupakan program membagi-bagikan uang, namun pada hakekatnya program ini merupakan program yang bertujuan untuk peningkatan dan penguatan karakter bangsa yang dimulai pada tingkatan kelompok atau masyarakat. Masyarakat melalui kelompok-kelompok tersebut diberikan pelatihan dan pendampingan oleh fasilitator. Pemberdayaan melalui kelompok masyarakat dan bukan melalui individu-individu ditujukan untuk mengembalikan dan menguatkan kembali karakter dasar masyarakat Indonesia yaitu "kegotong-royongan sosial dan ekonomi".

Pada pelaksanaannya di tahun 2007, jumlah dana untuk mendukung program PNPM Mandiri sekitar Rp 3,6 triliun rupiah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Rp 0,8 triliun dari APBD (Anggaran Pendapatan

---

<sup>2</sup>Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Juli 2008.

<sup>3</sup> Ibid, Hlm 5.

dan Belanja Daerah) dan hampir Rp 100 milyar kontribusi dari masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan pada tahun 2007 ini telah mencakup 2.992 kecamatan di perdesaan dan perkotaan, atau mencakup sekitar lebih 41.000 desa atau kelurahan. Rata-rata setiap kecamatan mendapatkan bantuan langsung masyarakat sekitar Rp 0,5 hingga 1,5 milyar per kecamatan per tahun. Penduduk miskin yang dijangkau oleh program ini diharapkan sekitar 21,92 juta orang atau 5,46 juta KK (Kepala Keluarga) di perdesaan, dan sekitar 10 juta orang atau 2,5 juta KK di perkotaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa PNPM Mandiri ini dapat menciptakan lapangan kerja baru sekitar sedikitnya 250 lapangan kerja baru per desa per tahun, sehingga potensi lapangan kerja langsung yang diciptakan oleh program ini sangat besar yaitu sekitar 11 juta orang<sup>4</sup>.

Pada tahun 2008, program-program yang diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri bertambah. Selain PPK (Program Penanggulangan Kemiskinan) atau PNPM-Perdesaan yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) atau PNPM-Perkotaan dari Departemen Pekerjaan Umum, maka ditambahkan pula Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dari Departemen Pekerjaan Umum dan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari Departemen Pertanian yang mencakup program ke 10.000 desa pertanian serta program-program pendukung lainnya.

Khusus untuk program dari Departemen Pertanian RI yakni PUAP, dilaksanakan pada tahun yang sama yakni tahun 2008 dengan menyalurkan dana BLM-PUAP ke 10.000 desa pertanian. Masing-masing desa menerima BLM-PUAP sebesar Rp 100 juta untuk mengembangkan agribisnis perdesaan. Kebijakan Departemen Pertanian RI dalam pemberdayaan masyarakat tersebut diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitasi bantuan penguatan modal usaha bagi petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. *Operasional* penyaluran dana PUAP tersebut

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 6

dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan terpilih sebagai pelaksana PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggotanya. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani. Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani (Deptan, 2008).

### **2.1.1. Tujuan PUAP**

Tujuan utama program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berdasarkan pedoman umum PUAP adalah untuk<sup>5</sup> :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

### **2.1.2. Sasaran Program PUAP**

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.
- b. Berkembangnya 10.524 Gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan maupun musiman.

---

<sup>1</sup> Kebijakan Teknis Program Kebijakan PUAP, Deptan, 2008.

### **2.1.3 Gambaran Umum Pelaksanaan PUAP**

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan. Gapoktan juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain :

- 1) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;
- 2) Memiliki struktur kepengurusan yang aktif;
- 3) Dimiliki dan dikelola oleh petani;
- 4) Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.

Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut disalurkan kepada anggota Gapoktan guna menunjang kegiatan usahatani. Tentunya dalam penyaluran dana tersebut terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan memanfaatkan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembinaan dan pengendalian di tingkat propinsi dan kabupaten atau kota.

Tim pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat propinsi dan kabupaten kota dalam bentuk pelatihan. Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim pembina propinsi kepada tim teknis kabupaten/kota difokuskan antara lain pada peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP ditingkat kabupaten atau kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP. Selanjutnya pembinaan pelaksanaan PUAP oleh tim teknis kabupaten atau



kota kepada tim teknis kecamatan dilakukan dalam format pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya.

Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina PUAP propinsi hingga kepada tim teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Apabila dalam penyaluran BLM-PUAP berjalan dengan lancar dan diawasi secara optimal dan intensif sehingga pada akhirnya mencapai sasaran yang dituju yakni salah satunya adalah meningkatkan pendapatan petani maka penyaluran bantuan PUAP dapat dikatakan efektif.

## **2.2. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan**

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nasution (2002), kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu : kelembagaan sebagai suatu aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987)<sup>6</sup>. Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan

---

<sup>6</sup> Dalam Baga, dkk.2008. Diktat Kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis.

sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya.

Suatu kelembagaan (*instiution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 1990 dalam Nasution, 2002) yaitu :

1. Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*)

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

2. Hak Kepemilikan (*Property right*)

Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimpikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

3. Aturan representasi (*Rule of representation*)

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap *performance* akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut.

Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat

dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu : pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung paceklik dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga di perdesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga di perdesaan yang saat ini memiliki kesamaan dengan karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

### **2.3. Kelompok Tani**

Menurut Departemen Pertanian (2008), kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria atau wanita) maupun petani taruna (pemuda atau pemudi), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

## **2.4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)**

Departemen Pertanian (2008) mendefinisikan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa atau yang berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak pengairan tersier.

Menurut Syahyuti (2005), Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian.

## **2.5. Penelitian Terdahulu**

### **2.5.1. Penelitian Mengenai Program Bantuan Penguatan Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Kasmadi (2005) mengenai Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Kemandirian Petani Ternak. (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Desa Bungai Jaya dan Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah). Menurut penelitian ini manfaat program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi petani penerima program sangat besar terutama dalam meningkatkan usaha beternak, dari yang tidak memiliki ternak kemudian menjadi mampu untuk memiliki ternak, sehingga menimbulkan motivasi petani untuk mengembangkan ternak BLM tersebut. Hal tersebut telah dibuktikan oleh petani itu sendiri dengan keberhasilan mereka dalam program ini. Ternak yang mereka kelola telah berkembang dan rata-rata telah menyeter untuk digulirkan kepada petani yang belum memperoleh bantuan BLM tersebut. Ini tentunya sudah sesuai dengan tujuan dari program

BLM yang ingin memberdayakan masyarakat petani sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan bantuan yang difasilitasi oleh pemerintah dan dikelola oleh kelompok sendiri. Perguliran dana BLM telah mencapai 70 persen, dimana perguliran dana tersebut pengaturannya diatur oleh kelompok sendiri dibawah bimbingan pemerintah dan petugas pendamping. Keberhasilan program BLM tersebut tidak terlepas dari kesadaran petani dalam mengembangkan ternak tersebut yang juga dibantu oleh pemerintah setempat seperti Dinas Peternakan, petugas pendamping dan aparat pemerintah desa.

Filtra (2007) meneliti mengenai Evaluasi Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Sapi Potong di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Analisis ini dilakukan berdasarkan buku pedoman BPLM yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Peternakan, dimana evaluasi program BPLM dinilai dari tiga aspek, yaitu aspek teknis, aspek usaha dan aspek kelembagaan. Penelitian dilakukan menggunakan metode regresi logistik multinomial. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan program BPLM di Kabupaten Agam dinilai berhasil sehingga sangat layak untuk dilanjutkan. Keberhasilan tertinggi ada pada aspek teknis peternakan. Berikutnya aspek kelembagaan dan aspek ekonomi usaha peternakan dengan nilai cukup berhasil.

Pada aspek ekonomi usaha, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya dalam pelaksanaan Rencana Usaha Kelompok (RUK) serta masih rendahnya tingkat pengembalian kredit. Pada aspek kelembagaan, peternak masih sulit diberdayakan dengan minimnya perkembangan jumlah anggota kelompok, masih rendahnya tingkat partisipasi dan penyaluran aspirasi anggota serta lemahnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan pedagang pakan konsentrat dan pedagang sapi. Hasil lainnya yaitu jumlah tanggungan keluarga, penguasaan lahan, dan jumlah ternak setelah kredit memberikan pengaruh yang nyata terhadap keberhasilan pengembalian kredit di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Lubis (2005), meneliti tentang Efektivitas Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Analisis Pendapatan Petani Pengguna Kredit (Studi Kasus Pada

Petani Tebu Anggota Koperasi Madusari, Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, Solo). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis efektivitas penyaluran KKP dan metode pendapatan usahatani. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dari sisi bank telah menunjukkan hasil yang positif dan dari sisi nasabah menunjukkan hasil yang cukup efektif. Sementara itu, hasil pendapatan menunjukkan bahwa usahatani tebu pada Tahun 2004 menunjukkan hasil yang positif, karena penerimaan yang diperoleh tiap satuan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi adanya program KKP membuat petani tebu mengalami peningkatan kualitas dan peningkatan produksi tebu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sume (2008) menganalisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi kasus DPM-LUEP Kabupaten Bogor). Menurut penelitian ini, karakteristik kelompok penerima DPM-LUEP di Kabupaten Bogor secara umum masih merupakan kelompok usaha kecil menengah yang tergambar dari kelembagaan kelompok yang telah berbadan hukum dengan tenaga kerja 5-19 orang, akses permodalan masih sangat lemah, administrasi dan manajerial kelompok yang lemah, serta sistem pemasaran yang masih terbatas wilayah pemasarannya, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan ekonomi kelompok.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan pada lembaga ekonomi pedesaan penerima DPM usaha antara lain : (a) efektivitas dalam pembelian bahan baku atau gabah (putaran/daur), dalam hal ini memaksimalkan DPM yang dipinjam untuk pembelian gabah dalam beberapa kali perputaran pembelian; (b) peningkatan pembelian bahan baku yang akan meningkatkan hasil produk yang diolah; (c) menurunkan biaya total terhadap pendapatan penjualan, khususnya efisiensi biaya variabel total yaitu pada biaya upah giling, upah jemur, pemasaran dan lain-lain; (d) melakukan stok produk menunggu peningkatan harga jual produk (beras) di pasaran.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan FGD masih ditemui permasalahan yang dominan pada persyaratan penetapan, proses penetapan dan

proses penyaluran DPM pada kelompok. Upaya mengatasi permasalahan guna meningkatkan efektivitas pendapatan dan penyaluran DPM-LUEP adalah : penguatan kelembagaan dan manajerial kelompok, meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan dan jumlah petugas serta dukungan sarana prasarana, memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP melalui usulan penyempurnaan mekanisme ke penanggung jawab kegiatan DPM-LUEP di tingkat pusat. Dari hasil CPM, menunjukkan bahwa keberhasilan terselesaikannya suatu pekerjaan proyek pada waktunya, sehingga sumber-sumber tidak terbuang dengan percuma.

Perdana (2007) menganalisis Dampak Pelaksanaan Program Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) Terhadap Pendapatan Usahatani Peserta Plasma (Studi Pada PT. Sinar Kencana Inti Perkasa di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kemitraan melalui program KKPA yang dijalankan oleh PT. Sinar Kencana Inti Perkasa. Penelitian ini juga menganalisis dampak pelaksanaan program KKPA terhadap pendapatan usahatani petani peserta plasma dan petani non peserta KKPA. Analisis yang digunakan adalah metode analisis pendapatan usahatani.

Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh bahwa secara garis besar pelaksanaan program KKPA sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan petani peserta KKPA. Pembangunan sarana dan prasarana memudahkan aksesibilitas ke kota dan memudahkan masuknya barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Kelumpang Selatan, dan secara tidak langsung menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum adanya program KKPA. Keberhasilan secara umum dari program KKPA mungkin masih memerlukan waktu dan peninjauan kembali di masa mendatang, sejauh mana petani di lokasi program KKPA dapat mengadopsi kegiatan-kegiatan yang telah dianjurkan dalam meningkatkan keterampilan didalam pengelolaan usahatani untuk mendapatkan hasil yang optimal dan semangat berinisiatif.

Jumlah produksi kelapa sawit yang dihasilkan petani peserta KKPA lebih besar daripada petani non KKPA. Ini dapat dilihat dari rata-rata produksi kelapa sawit yang dihasilkan petani peserta KKPA untuk luasan rata-rata satu hektar per tahunnya sebanyak 27.757 kilogram. Sedangkan produksi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani non peserta KKPA untuk luasan rata-rata satu hektar per tahunnya sebanyak 17.432 kilogram. Kemudian berdasarkan analisis pendapatan usahatani dapat diketahui nilai R/C *rasio* petani peserta KKPA lebih besar dari petani non KKPA, masing-masing sebesar 5,06 dan 4,17. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit petani peserta KKPA yang dijalankan cukup baik dan layak, namun kelayakan ini harus didukung pelaksanaan teknis, pembinaan lebih lanjut dan diperlukan tingkat produktivitas yang lebih meningkat lagi serta memberikan harga yang berlaku dipasaran sehingga tercipta kestabilan harga.

### **2.5.2. Penelitian Mengenai Pendapatan Usahatani Padi**

Basuki (2008) meneliti tentang Analisis Pendapatan Usahatani Padi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Untuk Menanam Padi Hibrida (Studi Kasus Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat), dengan menggunakan metode analisis usahatani dan regresi logistik. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa usahatani padi hibrida yang dilaksanakan oleh petani padi Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang pada Musim Rendeng 2006/2007 memberikan keuntungan (pendapatan) yang lebih kecil daripada usahatani padi in hibrida pada waktu dan tempat yang sama. Pendapatan atas biaya dibayarkan usahatani padi in hibrida dan padi hibrida adalah Rp 6.152.080,57 dan Rp 4.384.536,55. Kemudian hasil R/C *rasio* usahatani padi in hibrida lebih besar daripada R/C *rasio* usahatani hibrida masing-masing sebesar 2,10 dan 1,62 menandakan bahwa usahatani in hibrida lebih efisien daripada usahatani hibrida.

Hasil analisis regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi benih padi hibrida menunjukkan bahwa ada empat variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan benih padi hibrida di Kecamatan Cibuyaya yaitu luas lahan, status lahan, *rasio* pendapatan usahatani padi terhadap pendapatan total dan umur. Semakin luas lahan yang digarap maka



kemungkinan petani untuk mengadopsi benih padi hibrida juga semakin tinggi. Petani penggarap bukan pemilik tanah memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menggunakan benih padi hibrida. Semakin tinggi *rasio* pendapatan usahatani padi terhadap pendapatan total, semakin kecil kemungkinan petani untuk menggunakan inovasi benih padi hibrida. Semakin tua petani maka kemungkinan petani untuk menanam inovasi padi hibrida semakin kecil.

Riyanto (2007) menganalisis Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Ladang Di Kabupaten Purwakarta (Kasus : Kelompok Tani Jaya Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis berupa analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C ratio), pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis efisiensi ekonomi dengan *rasio* Nilai Produk Marjinal (NPM) dan Biaya Korbanan Marjinal (BKM). Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan atas biaya tunai usahatani padi ladang Kelompok Tani Jaya Desa Sukatani per hektarnya adalah sebesar Rp 3.245.465,00, sedangkan pendapatan atas biaya total sebesar Rp 981.765,00. Kemudian dengan analisis imbalan penerimaan dan biaya (R/C ratio) diperoleh nilai *rasio* R/C atas biaya total sebesar 1,19 dan *rasio* atas biaya tunai sebesar 2,07. Dari nilai tersebut dapat terlihat bahwa usahatani padi ladang kelompok tani Jaya di Desa Sukatani menguntungkan untuk dilaksanakan.

Faktor-faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi ladang adalah tenaga kerja, benih dan pupuk area. Ketiga faktor tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 90 %. Sedangkan faktor pestisida, pupuk TSP dan pupuk kandang tidak berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan yang telah ditetapkan. Kemudian, penggunaan faktor produksi tenaga kerja dan benih di daerah penelitian masih kurang, sedangkan penggunaan pupuk urea sudah berlebihan sehingga perlu dikurangi.

Damayanti (2007) meneliti tentang Analisis Pendapatan dan Efisiensi Produksi Usahatani Padi Sawah (Kasus di Desa Purwoadi, Kecamatan Timurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung). Dalam penelitiannya, peneliti

menggunakan metode analisis pendapatan usahatani. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hasil analisis pendapatan usahatani padi sawah di daerah penelitian secara umum dikatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Petani memperoleh R/C *rasio* atas biaya tunai sebesar 2,89 dan nilai R/C *rasio* atas biaya total sebesar 1,70. Hal ini berarti penerimaan yang diperoleh petani dapat menutupi seluruh biaya usahatani. Selanjutnya dari hasil uji-t student memberikan hasil bahwa faktor-faktor seperti luas lahan, benih, pupuk urea, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi sawah di daerah penelitian.

Hasil analisis efisiensi ekonomi terhadap faktor-faktor produksi usahatani padi sawah di Desa Purwoadi menunjukkan bahwa kondisi usahatani di daerah tersebut tidak efisien. Sementara untuk faktor produksi seperti luas lahan, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pestisida dan tenaga kerja menunjukkan bahwa *rasio* NPM dan BKM-nya lebih dari satu. Hal ini berarti jumlah dari penggunaan masing-masing faktor produksi tersebut harus ditambah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan faktor produksi benih dan pupuk KCL tidak dapat diramalkan secara tepat penggunaan rata-rata efisiennya karena perbandingan NPM dan BKM-nya bernilai negatif.

Hasil penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai evaluasi program pemerintah memberikan hasil yang positif atau baik terhadap petani. Pada penelitian ini mengkaji mengenai apakah dampak program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juga memberikan dampak yang positif terhadap petani. Pengkajian dilakukan dengan melihat kinerja organisasi Gapoktan dalam menyalurkan BLM-PUAP kepada anggota yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu juga dikaji mengenai pengaruh program PUAP terhadap perubahan pendapatan petani (anggota Gapoktan). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya yakni metode analisis pendapatan usahatani. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan metode regresi logistik multinomial seperti yang digunakan pada metode penelitian sebelumnya dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian

adalah untuk melihat perbedaan pendapatan anggota Gapoktan sebelum dan setelah adanya program PUAP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis program pemerintah yakni program dari Departemen Pertanian RI yang baru dilaksanakan satu tahun lalu, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai kajian ilmiah baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau pada penelitian sebelumnya.

## **III KERANGKA PEMIKIRAN**

### **3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **3.1.1. Evaluasi Program PUAP**

Evaluasi pelaksanaan program PUAP dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai atau berhasil berdasarkan indikator-indikator yang ada. Keberhasilan program PUAP akan memberikan dampak berupa manfaat yang optimal dan oleh karena itu evaluasi pelaksanaan program ini sangat diperlukan untuk menilai indikator-indikator keberhasilan PUAP antara lain<sup>1</sup>:

1. Indikator keberhasilan output meliputi :
  - a. Tersalurkannya BLM – PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian; dan
  - b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.
2. Indikator keberhasilan *outcome* meliputi :
  - a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.
  - b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
  - c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
  - d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

---

<sup>1</sup> Deptan.2008. Pedoman Teknis PUAP.

3. Indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.
- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan program PUAP, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Daerobi (2007) yang menyatakan bahwa Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran.

### 3.1.2 Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan<sup>2</sup>. *John Witmore dalam Coaching for Perfomance* (1997 : 104), menyatakan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional<sup>3</sup>. Menurut *Cascio* ( 1992 : 267 ), penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Kamus Bahasa Indonesia

<sup>3</sup> [www.google.com// search/kinerja/wikipedia/html](http://www.google.com/search/kinerja/wikipedia/html). Diakses tanggal 30 Mei 2009.

<sup>4</sup> [www.google.com// search/penilaian kinerja/wikipedia/html](http://www.google.com/search/penilaian%20kinerja/wikipedia/html). Diakses tanggal 30 Mei 2009

### 3.1.3 Penilaian Kinerja Gapoktan

Penilaian keberhasilan kinerja suatu lembaga dapat mengacu pada pencapaian sasaran dan tujuan. Parameter keberhasilan kinerja Gapoktan dapat diukur dari kemampuan lembaga tersebut dalam menyalurkan dan mengelola dana PUAP secara efektif. Efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana PUAP ditentukan oleh kemampuannya menjangkau sebanyak mungkin petani dalam hal ini anggota kelompok tani yang benar-benar memerlukan bantuan penguatan modal untuk kegiatan usahanya. Penilaian keefektivan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sisi penilaian kinerja Gapoktan dalam menyalurkan dana PUAP kepada anggotanya dan dari sisi persepsi anggota atau yang menerima dana bantuan PUAP.

Penilaian keefektivan penyaluran kredit (penyaluran dana PUAP) dengan melihat kinerja aktivitas dapat diketahui dengan menggunakan beberapa tolok ukur sebagai berikut :

#### 1. Target dan Realisasi Target

Berapa persentasi realisasi kredit (pinjaman dana PUAP) yang dapat tersalurkan bila dibandingkan dengan tingkat pengajuan pinjaman.

#### 2. Jangkauan Kredit (Tersalurkannya Dana PUAP)

Bagaimana jangkauan kredit (pinjaman dana PUAP) terhadap masyarakat (petani), dalam artian beragamnya sektor yang menerima bantuan kredit. Semakin beragam sektor penerima kredit maka kredit semakin efektif.

#### 3. Frekuensi Kredit (Pinjaman dana PUAP)

Jumlah pengguna (petani) yang menggunakan dana kredit pinjaman (dana PUAP). Frekuensi pinjaman ini dilihat dari banyaknya transaksi, dalam hal ini transaksi peminjaman dan pengembalian pinjaman.

#### 4. Persentase Tunggakan

Persentase tunggakan ditentukan dari banyaknya jumlah tunggakan pinjaman kredit tersebut.

Disisi lain, Pardosi (1998) menyatakan bahwa keberhasilan dalam efektivitas penyaluran menurut penerima kredit diukur dengan melihat tanggapan kreditur terhadap persyaratan awal (mudah, sedang, berat), prosedur peminjaman

(mudah, sedang, sulit), realisasi kredit (cepat, sedang, lambat), biaya administrasi (ringan, sedang, berat), tingkat bunga (ringan, sedang, berat), pelayanan dan jarak atau lokasi kreditur (dekat, sedang, jauh).

### **3.2 Konsep Usahatani**

Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekumpulan orang-orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain disamping bermotif mencari keuntungan (Soeharjo dan Patong, 1973). Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, golongan sosial, baik yang terikat genologis, politis maupun teritorial sebagai pengelolanya. Berdasarkan batasan tersebut dapat diketahui bahwa usahatani terdiri atas manusia petani (bersama keluarganya), tanah (bersama dengan fasilitas yang ada di atasnya seperti bangunan-bangunan, saluran air) dan tanaman maupun hewan ternak (Soeharjo dan Patong, 1973).

Mubyarto (1989) mengemukakan bahwa usahatani merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian. Tujuan setiap petani dalam melaksanakan usahatannya berbeda-beda. Apabila dorongannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik melalui atau tanpa peredaran uang, maka usahatani tersebut disebut usahatani pencukup kebutuhan keluarga (*Subsistence Farm*). Sedangkan bila motivasi yang mendorongnya untuk mencari keuntungan, maka usahatani yang demikian disebut usahatani komersial (*Commercial Farm*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam usahatani terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain penggunaan input, teknik bercocok tanam dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal seperti cuaca, iklim, hama dan penyakit. Lebih jelas lagi Hernanto (1989) menyatakan bahwa dalam usahatani ada empat unsur pokok penting yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor tersebut sering disebut sebagai faktor-faktor produksi antara lain :

### 1. Tanah

Tanah dalam usahatani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan, sawah dan sebagainya. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, membeli, menyewa, bagi hasil (menyakap), pemberian negara, warisan ataupun wakaf. Penggunaan tanah dapat diusahakan secara monokultur, polikultur maupun tumpangsari.

### 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam usahatani adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak dimana tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat kesehatan dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga kerja ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Dalam teknis perhitungan, dapat digunakan ukuran konversi tenaga kerja dengan cara membandingkan tenaga kerja pria sebagai ukuran baku, yakni :

1 pria = 1 Hari Kerja Pria (HKP); 1 wanita = 0.8 HKP dan 1 anak = 0.5 HKP.

### 3. Modal

Modal dalam usahatani digunakan untuk membeli sarana produksi dan untuk membiayai pengeluaran selama kegiatan usahatani berlangsung. Sumber modal dapat diperoleh dari milik sendiri, pinjaman atau kredit (pinjaman dari lembaga keuangan formal maupun non formal), hadiah, warisan ataupun dapat berupa kontrak sewa.

### 4. Manajemen

Manajemen dalam usahatani merupakan kemampuan petani untuk menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Agar dapat berhasil mengelola suatu usahatani maka perlu memahami prinsip teknik meliputi: (a) perilaku cabang yang diputuskan; (b) perkembangan teknologi; (c) daya dukung faktor cara yang dikuasai. Selain itu, juga perlu memahami prinsip ekonomis antara lain: (a) penentuan perkembangan harga; (b) kombinasi cabang usaha; (c) tataniaga hasil;



(d) pembiayaan usahatani; (e) pengalokasian modal dan pendapatan serta (f) tolok ukur keberhasilan yang lazim.

### **3.2.1. Pendapatan Usahatani**

Pada akhirnya usahatani yang dilakukan akan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh. Selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh tersebut merupakan pendapatan dari usahatani yang dijalankan. Tujuan utama dari analisis pendapatan adalah menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan (Soeharjo dan Patong, 1973). Analisis pendapatan usahatani sangat bermanfaat bagi petani untuk mengukur tingkat keberhasilan usahanya.

Analisis pendapatan usahatani memerlukan dua keterangan pokok, yaitu keadaan penerimaan dan keadaan pengeluaran selama jangka waktu tertentu. Penerimaan merupakan total nilai produk yang dihasilkan yang diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah output (produk yang dihasilkan) dengan harga produk tersebut. Sedangkan pengeluaran atau biaya merupakan semua pengorbanan sumberdaya ekonomi dalam satuan uang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output dalam suatu periode produksi.

Penerimaan usahatani dapat berbentuk tiga hal yakni (1) hasil penjualan tunai (seperti tanaman pangan, ternak, ikan dan lain sebagainya); (2) produk yang dikonsumsi keluarga petani; (3) kenaikan nilai inventaris selisih nilai akhir tahun dengan nilai awal tahun). Sementara itu, pengeluaran usahatani tani meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap (variabel). Bentuk pengeluaran dalam usahatani berupa pengeluaran tunai dan pengeluaran yang diperhitungkan. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran yang dibayarkan dengan menggunakan uang, seperti biaya pengadaan sarana produksi usahatani dan pembayaran upah tenaga kerja. Sedangkan pengeluaran yang diperhitungkan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menghitung nilai pendapatan kerja petani apabila nilai kerja keluarga diperhitungkan.

Analisis pendapatan tunai dan pendapatan total produksi usahatani merupakan bentuk analisis dalam usahatani yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif dari suatu kegiatan cabang usahatani berdasarkan perhitungan finansial. Dalam analisis ini dilakukan dua pendekatan, yaitu perhitungan pendapatan atas dasar biaya tunai dan perhitungan atas dasar biaya total (biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan). Soekartawi (1985) menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan pengukuran pendapatan usahatani antara lain :

1. Pendapatan kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumberdaya yang digunakan dalam usahatani. Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani adalah nilai produksi atau penerimaan kotor usahatani.
2. Pendapatan kotor tunai didefinisikan sebagai nilai mata uang yang diterima dari penjualan produk usahatani. Pendapatan kotor tunai usahatani tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usahatani yang berbentuk benda dan yang dikonsumsi.
3. Pendapatan kotor tidak tunai adalah pendapatan yang bukan dalam bentuk uang, seperti hasil panen yang dikonsumsi, hasil panen yang digunakan untuk bibit atau makanan ternak, untuk pembayaran, disimpan di gudang, dan menerima pembayaran dalam bentuk benda.
4. Pengeluaran total usahatani didefinisikan sebagai nilai semua input yang habis terpakai di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran usahatani meliputi pengeluaran tunai dan pengeluaran tidak tunai.
5. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran berdasarkan nilai uang. Jadi segala pengeluaran untuk keperluan kegiatan usahatani yang dibayar dalam bentuk benda tidak termasuk dalam pengeluaran tunai.
6. Pengeluaran tidak tunai adalah nilai semua input yang digunakan namun tidak dalam bentuk uang. Misalnya nilai barang dan jasa untuk keperluan usahatani yang dibayar dengan benda.
7. Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan total pengeluaran usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi.

### **3.2.2. Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C Rasio)**

Soeharjo dan Patong (1973) menyatakan bahwa pendapatan yang besar bukanlah sebagai petunjuk bahwa usahatani efisien. Ukuran efisiensi pendapatan usahatani dapat diukur atau dihitung melalui perbandingan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan (*R/C Rasio*).

*R/C rasio* menunjukkan berapa besarnya penerimaan usahatani yang akan diperoleh petani untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani. Apabila usahatani memiliki nilai *R/C rasio* lebih besar dari satu dapat dikatakan menguntungkan. Sebaliknya, apabila nilai *R/C rasio* lebih kecil dari satu, berarti penerimaan biaya satu satuan akan mengurangi penerimaan sebesar satu satuan, atau dapat dikatakan bahwa usahatani tersebut belum menguntungkan. Sedangkan jika kegiatan usahatani memiliki nilai *R/C rasio* sama dengan satu, maka kegiatan usahatani tersebut berada pada keuntungan normal. Artinya setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan, maka kegiatan usaha mampu menghasilkan manfaat bersih sebesar satu satuan atau dapat dikatakan impas.

### **3.3 Kerangka Pemikiran Operasional**

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antara subsektor. Keberlanjutan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sangat ditentukan pada keberhasilan pengelolaan dana tersebut oleh kinerja Gapoktan sebagai lembaga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk melihat keberhasilan PUAP yaitu dengan mengukur dan menilai dampak dari program PUAP serta peranannya dalam meningkatkan pendapatan usaha pertanian hingga pada akhirnya mampu mensejahterakan para petani di perdesaan. Pengelolaan dan pencapaian tujuan dari program PUAP (peningkatan pendapatan usaha) juga dipengaruhi oleh karakteristik Gapoktan sebagai pelaksana program PUAP.

Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dari sisi dampak program PUAP terhadap kinerja Gapoktan PUAP. Penilaian keberhasilan program ini didasarkan pada indikator yang ada, salah satunya adalah dengan melihat tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Sementara itu, penilaian kinerja Gapoktan setelah adanya program PUAP ini dinilai dengan melihat kemampuan Gapoktan dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan PUAP secara efektif. Analisis efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana PUAP melalui pola pinjaman dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pihak Gapoktan sebagai penyalur atau pemberi pinjaman dan dari pihak petani sebagai peminjam atau pengguna.

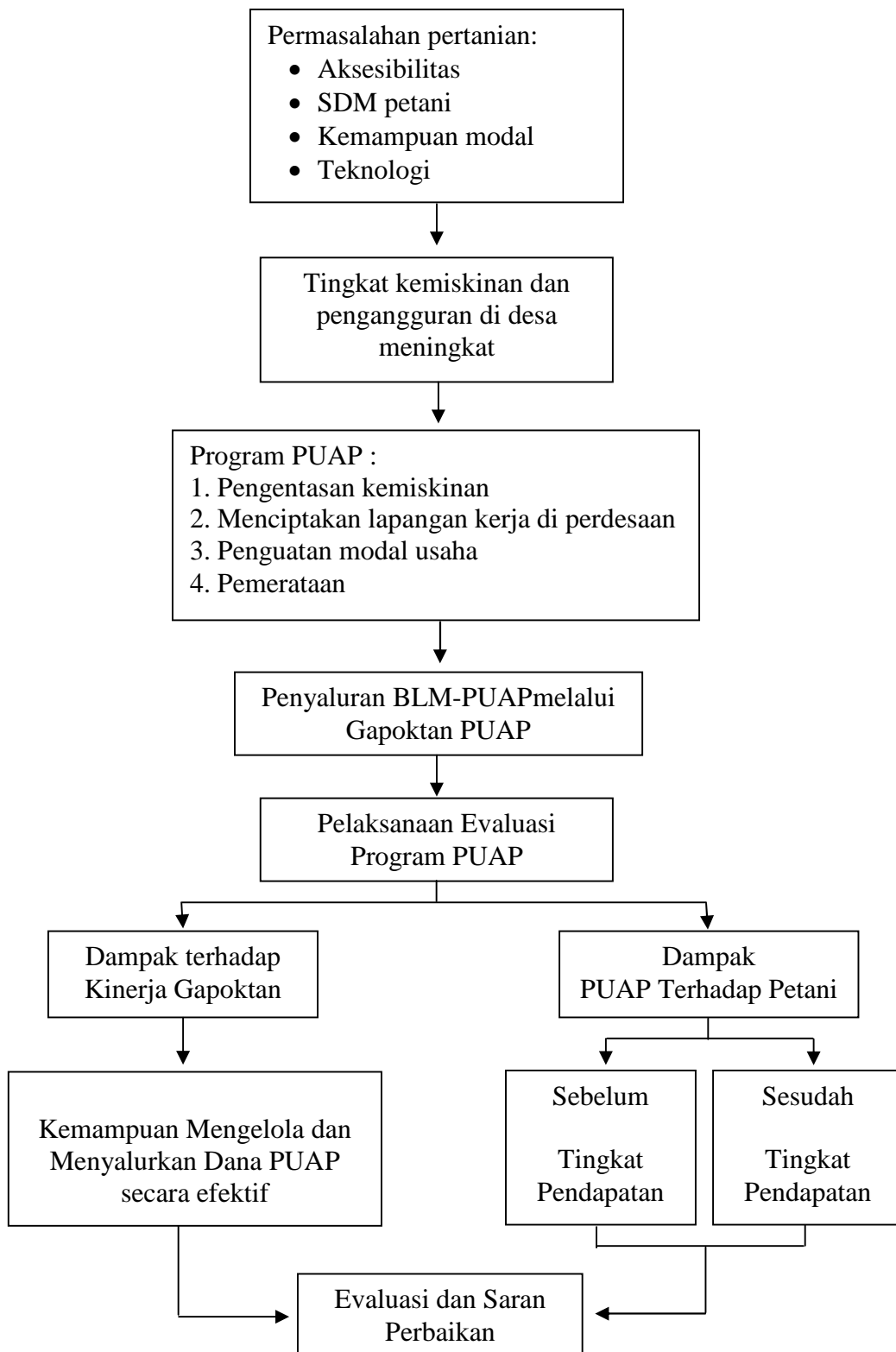
Penilaian keefektifan pengelolaan dan penyaluran pinjaman dana PUAP kepada petani yang didasarkan pada kriteria pihak Gapoktan sebagai pemberi pinjaman dengan menggunakan beberapa parameter. Parameter yang digunakan antara lain : target dan realisasi kredit (pinjaman PUAP), jangkauan kredit (pinjaman PUAP), frekuensi serta banyaknya tunggakan. Sementara kriteria dari sisi pengguna kredit (petani) diukur dengan menggunakan tolok ukur : persyaratan awal, prosedur peminjaman.

Secara umum, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini diawali dari adanya permasalahan pertanian yaitu : pertama, sebagian besar petani sulit untuk mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya, sehingga membuat petani menjadi tertutup dan lambat dalam merespon perubahan yang terjadi di dunia luar. Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian yang berakibat terjadi ketidakadilan harga yang diterima oleh petani. Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani dan keterbatasan atas kepemilikan lahan garapan terutama sawah. Keempat, yang merupakan masalah paling dasar bagi sebagian besar petani adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C

(*Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition*) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh setiap petani.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Bantuan dana PUAP ini disalurkan melalui Gapoktan sebagai lembaga pelaksana yang dipercaya oleh Departemen Pertanian. Pelaksanaan program PUAP perlu dievaluasi untuk menilai apakah ada dampak yang berarti dari pemanfaatan dana bantuan tersebut. Penilaian dilakukan dengan melihat indikator keberhasilan PUAP, salah satunya dengan mengukur tingkat pendapatan anggota Gapoktan PUAP sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kinerja Gapoktan PUAP yang dinilai dari kemampuan Gapoktan dalam mengelola dan menyalurkan dana PUAP kepada petani secara efektif. Analisis keefektifan pengelolaan dan penyaluran dana PUAP melalui pola pinjaman dilihat dari pihak Gapoktan sebagai penyalur atau pemberi pinjaman dan dari pihak petani sebagai peminjam atau pengguna.

Setelah dilakukan evaluasi, kemudian ditarik kesimpulan secara keseluruhan dan kemudian direkomendasikan saran perbaikan bagi pelaksanaan program PUAP kedepannya.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **IV METODE PENELITIAN**

### **4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Daerah yang dipilih sebagai tempat penelitian mengenai Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Kinerja Gapoktan adalah Kecamatan Tungkal Ilir (saat ini adalah Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota), Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Pemilihan tempat penelitian tersebut dengan pertimbangan : (1) Kecamatan Tungkal Ilir (Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota) merupakan salah satu sentra pertanian yakni padi (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1), (2) Kecamatan Tungkal Ilir (Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota) dalam dua tahun terakhir telah menerima bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Penelitian akan dilakukan di empat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) PUAP yang berada di Wilayah Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota (Kecamatan Tungkal Ilir), Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama Juni sampai dengan minggu ke dua Juli tahun 2009.

### **4.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan para responden yaitu petani (anggota Gapoktan) serta kepada pengurus Gapoktan atau Poktan. Responden dalam penelitian ini akan difokuskan pada petani (anggota Gapoktan) yang telah menerima bantuan PUAP tahun 2008. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait meliputi BPS Pusat, BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari

penelusuran kepustakaan, internet dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **4.3 Metode Pengumpulan Data**

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan metode wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, penyebaran kuisisioner dan studi literatur. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden dengan harapan agar peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai karakteristik responden, karakteristik usaha, pendapatan usaha serta tanggapan respon terhadap program PUAP. Pengumpulan data dengan cara ini akan dibantu menggunakan kuisisioner yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan kuisisioner bermanfaat sebagai pemandu agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknis penggunaan atau pengisian kuisisioner oleh responden akan dipandu oleh peneliti.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan pelaksanaan program PUAP, mekanisme proses penyaluran PUAP dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, juga dikumpulkan data-data penunjang seperti gambaran umum lembaga di desa dalam hal ini Gapoktan serta potensi usaha di wilayah penelitian.

### **4.4 Metode Pengambilan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah Gapoktan penerima dana PUAP yang berjumlah sebanyak empat Gapoktan. Satu Gapoktan terdiri dari lima kelompok tani, dimana satu kelompok tani terdiri dari 15 anggota petani. Jadi dalam empat Gapoktan terdapat 20 kelompok tani yang anggotanya terdiri dari 300 petani. Nilai total populasi sebanyak 300 tersebut diperoleh dari hasil pengalihan antara jumlah Gapoktan PUAP: 4 Gapoktan dengan jumlah kelompok tani per Gapoktan: 5 kelompok tani dan dengan jumlah anggota dalam satu kelompok tani yaitu sebanyak 15 petani.



Jumlah sampel awal yang diambil sebanyak 56, namun karena satu Gapoktan tidak termasuk dalam karakter Gapoktan yang akan diteliti, maka jumlah sampel yang diambil berubah menjadi 42 sampel petani padi. Alasan satu Gapoktan tersebut tidak dijadikan sampel karena mayoritas petani disana usahatani yang dijalankan adalah usahatani dengan komoditas perkebunan. Sementara penelitian ini mengambil sampel petani yang menerima BLM-PUAP tahun 2008 dengan karakteristik usahatannya adalah komoditas padi. Pemilihan sampel petani padi dengan pertimbangan bahwa sebagian besar anggota Gapoktan PUAP di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota (Kecamatan Tungkal Ilir) memiliki usaha bercocok tanam padi, sehingga dengan adanya karakteristik tersebut akan memudahkan peneliti untuk menentukan dan mengambil sampel. Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada metode *Gay* yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang dinilai cukup mewakili keseluruhan populasi yaitu minimal 10 % dari total populasi (Umar, 2005).

Selanjutnya dari 42 sampel yang tergabung dalam tiga Gapoktan atau 15 kelompok tani dibagi ke dalam dua bagian, diambil 30 petani dari masing-masing kelompok tani sebanyak dua sampel. Metode pengambilan dua sampel akan dilakukan dengan menggunakan dua metode yang berbeda yaitu metode *purposive sampling* (sengaja) dan metode *simple random sampling* (acak sederhana). Perwakilan sampel pertama diambil menggunakan metode *purposive* yakni ketua kelompok tani. Pemilihan ketua kelompok tani dengan pertimbangan bahwa ketua kelompok tani memiliki informasi yang lebih banyak seputar implementasi dan alokasi pemanfaatan bantuan PUAP, serta dapat memberikan informasi pendukung lainnya yang lebih jelas lagi untuk penelitian ini. Sedangkan perwakilan sampel yang ke dua ditentukan dengan menggunakan metode *simple random*. Pengambilan sampel ditujukan kepada anggota kelompok tani penerima dana PUAP.

Pengambilan sampel diawali dengan tahap mengurutkan nama-nama anggota kelompok tani disertai pemberian nomor urut yang ditulis di kertas kecil yang kemudian di gulung. Tahap berikutnya memasukkan gulungan kertas ke

dalam botol untuk dilakukan pengundian. Gulungan kertas yang keluar dari hasil pengundian pertama merupakan nama yang akan menjadi sampel kedua penelitian ini. Penggunaan metode ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tiap anggota kelompok tani memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian sisanya sebanyak 12 responden diambil dari masing-masing pengurus Gapoktan secara *purposive* (sengaja). Pemilihan metode *purposive* dalam menentukan responden pengurus dengan pertimbangan bahwa pengurus lebih mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan kinerja Gapoktan dan pelaksanaan PUAP, sehingga hal tersebut dapat mempermudah dan membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang lebih banyak lagi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, responden yang digunakan adalah petani yang mengusahakan tanaman musiman yaitu petani padi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis yang dilakukan untuk usahatani padi adalah analisis usahatani untuk satu musim.

#### **4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul diolah terlebih dahulu agar data-data tersebut lebih sederhana dan rapi sehingga dalam penyajiannya nanti memudahkan peneliti untuk kemudian dianalisis. Tahap pengolahan data meliputi editing, tabulasi dan analisis. Setelah tahapan editing dan tabulasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis. Tahap analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif.

##### **4.5.1 Identifikasi Karakteristik Gapoktan PUAP**

Mengidentifikasi karakteristik dari Gapoktan PUAP dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data sehingga memberikan informasi yang berguna (Nisfiannoor, 2009). Metode ini berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik Gapoktan PUAP di Kecamatan Tungkal Ilir berdasarkan hasil perolehan kuisioner.

#### 4.5.2 Analisis Kinerja Gapoktan PUAP

Kinerja Gapoktan PUAP dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola dan menyalurkan dana PUAP secara efektif berdasarkan kriteria penilaian baik dilihat dari pihak Gapoktan sendiri maupun dilihat dari pengguna dana PUAP, dalam hal ini adalah petani. Efektivitas penyaluran dana PUAP dari pihak Gapoktan dapat dilihat dari beberapa tolok ukur antara lain : (1) target dan realisasi pinjaman; (2) jangkauan pinjaman; (3) frekuensi pinjaman; dan (4) persentase tunggakan. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Data-data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Gapoktan dan data-data sekunder didapat dari pihak yang bersangkutan. Data tersebut selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabulasi silang dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Efektivitas penyaluran dana PUAP berdasarkan tanggapan dari pengguna (petani) dana PUAP dapat dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian keefektifan yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Penentuan skor tersebut akan menggunakan skala *Likert*. Pengukurannya dilakukan dengan menghadapkan seorang responden pada beberapa pertanyaan, kemudian responden tersebut diminta untuk memberikan jawaban atau tanggapan yang terdiri dari tiga tingkatan dalam skala tersebut. Jawaban-jawaban tersebut diberikan skor 1-3 dengan pertimbangan skor terbesar adalah tiga (3) untuk jawaban yang paling mendukung dan skor terendah adalah satu (1) untuk jawaban yang tidak mendukung. Maksudnya adalah pemberian skor pada tahap-tahap pernyataan yaitu jawaban yang mendukung pernyataan "1" seperti ringan, mudah, cepat dan baik diberi skor tiga (3). Sedangkan jawaban yang mendukung pernyataan "3" seperti berat, lama, sulit dan buruk diberi skor satu (1).

Berdasarkan perolehan skor dari responden, selanjutnya ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan efektivitas penyaluran dana PUAP. Selang diperoleh dari selisih total skor tertinggi yang mungkin dengan total skor minimal yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban (Umar, 2005).

$$\text{Selang} = \frac{\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal}}{\text{jumlah kategori jawaban}} - 1$$

Berdasarkan perolehan nilai selang, selanjutnya ditentukan skor efektivitas penyaluran dana PUAP dengan cara membagi tiga skor diantara total nilai minimal sampai total nilai maksimal hingga diperoleh tiga selang efektivitas. Selang terendah menyatakan bahwa efektivitas pinjaman (kredit) rendah, sementara selang tertinggi menyatakan bahwa pinjaman (kredit) efektif.

Penilaian tanggapan responden terhadap penyaluran dana PUAP akan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu efektif, cukup efektif, dan tidak efektif. Nilai skor yang diperoleh adalah antara 210-630. Nilai skor 210 didapat dari hasil pengalian skor terendah (1) dengan jumlah parameter yang digunakan yaitu tujuh dan dengan jumlah responden yang telah ditentukan (30 responden), atau dapat ditulis ( $1 \times 7 \times 30 = 210$ ). Sedangkan nilai skor 630 diperoleh dari hasil pengalian skor tertinggi (3) dengan jumlah parameter yang digunakan (7) dan dengan jumlah responden (30) atau dapat ditulis dengan ( $3 \times 7 \times 30 = 630$ ). Penentuan selang untuk setiap tingkat penilaian dilakukan dengan cara pengurangan antara nilai skor maksimum dengan nilai skor minimum yang kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya kategori penilaian, atau dapat ditulis dengan  $\frac{630 - 210}{3} = 140$ .

Nilai 140 merupakan selang untuk setiap tingkat penilaian. Dari nilai selang tersebut, dapat ditentukan rentang skala tiap kategori penilaian. Skala rentang penilaian yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Skala Skor Penilaian Efektivitas**

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Rentang Skala</b>
Belum efektif	210-350
Cukup efektif	351-490
Efektif	491-630

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jika total skor berada pada rentang nilai antara 210-350, maka penyaluran pinjaman dana PUAP dapat dikatakan belum efektif. Jika total skor berada pada rentang nilai antara 351-490, maka penyaluran pinjaman dana PUAP dapat dikatakan cukup efektif. Sementara

itu, apabila jika total skor berada pada rentang nilai antara 491-630, maka penyaluran pinjaman dana PUAP dapat dikatakan efektif.

#### **4.5.3 Analisis Pendapatan Petani**

Dampak program PUAP terhadap pendapatan anggota (petani) Gapoktan PUAP dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan petani sebelum adanya program PUAP dengan pendapatan setelah adanya program PUAP. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dampak program PUAP terhadap pendapatan usahatani padi di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota. Analisis pendapatan usahatani padi dilakukan pada satu musim yakni pada musim tanam sebelum adanya program PUAP dan pada musim tanam setelah adanya program PUAP.

Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor usahatani dan pengeluaran kotor usahatani tani. Perhitungan pendapatan usahatani dilakukan dengan menggunakan formulasi :

$$P = TP - (Bt + Btt)$$

Dimana : P = Pendapatan bersih usahatani (Rp)

TP = Total penerimaan usahatani (Rp)

Bt = Biaya tunai (Rp)

Btt = Biaya tidak tunai (Rp)

Penerimaan sering disebut juga dengan pendapatan kotor (*gross farm income*), merupakan nilai produk total usahatani dalam periode tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan diperoleh dari hasil kali antara jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual produk tersebut. Sementara itu pengeluaran total usahatani (*total farm expenses*) terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak tunai (biaya yang diperhitungkan).

#### **4.5.3 Analisis R/C Rasio**

Untuk mengukur efisiensi usahatani dan keberhasilan dari usaha tani dapat menggunakan analisis *rasio* pendapatan terhadap biaya (*R/C rasio*). *Rasio* pendapatan terhadap biaya merupakan perbandingan antara total penerimaan yang diperoleh dari setiap satuan uang yang dikeluarkan dalam proses produksi usahatani. Analisis pendapatan dibagi menjadi dua yakni analisis pendapatan atas

biaya tunai dan analisis pendapatan atas biaya total. Semakin besar nilai *R/C rasio* maka semakin menguntungkan usahatani tersebut. Perhitungan *R/C rasio* diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{(Rasio atas biaya total)} \quad R/C = \frac{TP}{BT}$$

$$\text{(Rasio atas biaya tunai)} \quad R/C = \frac{TP}{Bt}$$

$$BT = Bt + Btt$$

Dimana : TP = Total penerimaan usahatani (Rp)

BT = Biaya total (Rp)

Bt = Biaya tunai (Rp)

Btt = Biaya tidak tunai (Rp)

#### 4.5.4 Uji t-staistik

Untuk menguji perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program PUAP, akan dilakukan dengan uji statistik t-hitung untuk berpasangan (Walpole, 1995). Formulasinya sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{\bar{d} - do}{Sd / \sqrt{n}}; db = n - 1, \text{ dimana}$$

- $d - do$  = Rata-rata tingkat pendapatan setelah ada dana pinjaman - sebelum ada dana pinjaman.
- $Sd$  = Standar deviasi
- $n$  = Jumlah observasi
- $db$  = Derajat Bebas

Hipotesis awal yaitu menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Sementara itu hipotesis akhir adalah menunjukkan adanya perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program PUAP. Hipotesis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ atau } \mu_D = \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1 : \mu_2 > \mu_1 \text{ atau } \mu_D = \mu_2 - \mu_1 > 0$$

Dimana :

$\mu_1$  = Pendapatan usaha sebelum mendapatkan pinjaman

$\mu_2$  = Pendapatan usaha setelah mendapatkan pinjaman

Kriteria Uji :

Ho ditolak apabila t-hitung  $>$  t-tabel, db = n-1,  $\alpha = 0.05$

Ho diterima apabila t-hitung  $<$  t-tabel, db = n-1,  $\alpha = 0.05$

Penggunaan *alpha* sebesar 5% dalam uji statistik t-hitung sesuai dengan kebutuhan peneliti yang juga didasarkan pada pernyataan Usman, dkk (2008), bahwa dalam penelitian sosial, besarnya *alpha* yang digunakan dapat bernilai 1% atau 5%. Penentuan besarnya alpha tersebut tergantung kepada peneliti.

Analisis data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 13 dan program Minitab 14. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis secara tabulasi silang dan diinterpretasikan secara deskriptif.

## **BAB V GAMBARAN UMUM**

### **5.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Letak geografis Kabupaten Tanjung Barat berada pada  $0^{\circ}53'-01^{\circ}41'$  Lintang Selatan dan antara  $103^{\circ}23'-104^{\circ}21'$  Bujur Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jambi yang berbatasan dengan Propinsi Riau di sebelah utara, Kabupaten Batang Hari di sebelah selatan, Kabupaten Tebo di sebelah barat dan Selat Berhala serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sebelah timur. Jumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak lima kecamatan yakni kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tungkal Ilir. Namun sejak ditetapkannya SK Bupati mengenai pemekaran wilayah, Kecamatan Tungkal Ilir terpecah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota. Jadi saat ini jumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah sebanyak enam kecamatan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat beribukota di Kuala Tungkal dengan luas wilayah  $5.503,5 \text{ Km}^2$ , dimana luas wilayah yang digunakan untuk kegiatan pertanian khususnya padi sawah dan padi ladang masing-masing  $17.473 \text{ Ha}$  dan  $1.791 \text{ Ha}$ . Jumlah luas wilayah padi sawah sebesar  $17.473 \text{ Ha}$  tersebar di lima kecamatan dengan masing-masing luasan sebagai berikut: Kecamatan Betara sebesar  $3.040 \text{ Ha}$ , Kecamatan Pengabuan sebesar  $10.541 \text{ Ha}$ , Kecamatan Merlung sebesar  $10 \text{ Ha}$ , Kecamatan Tungkal Ulu sebesar  $1.432 \text{ Ha}$  dan terakhir Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota (Kecamatan Tungkal Ilir) sebesar  $2.450 \text{ Ha}$ . Sedangkan luasan wilayah untuk padi ladang hanya terdapat di dua kecamatan yakni Kecamatan Tungkal Ulu sebesar  $725 \text{ Ha}$  dan Kecamatan Merlung sebesar  $1.066 \text{ Ha}$ . Banyaknya hari hujan selama tahun 2007 adalah 107 hari dengan rata-rata curah hujan sebesar  $208,42 \text{ mm}$  dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Maret.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2007 sebanyak 245.460 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 125.298 jiwa dan perempuan sebanyak 120.162 jiwa.



## 5.2 Gambaran Desa Penelitian PUAP

### 5.2.1 Desa Pembengis

Responden wilayah pertama yakni petani penerima PUAP berasal dari Desa Pembengis, Kecamatan Bram Itam. Kecamatan Bram Itam sebelumnya masih tergabung dalam kecamatan Tungkal Ilir. Namun tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah, dimana Desa Pembengis termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bram Itam. Desa Pembengis memiliki luas wilayah sebesar 1.588 Ha dengan struktur tanah liat dan gambut. Penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan dengan luas 891,5 ha dan sawah seluas 350 Ha.

Desa Pembengis terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Muda berjumlah empat RT (Rukun Tetangga) dan Dusun Tua juga berjumlah empat RT. Jumlah penduduk desa sebesar 2.579 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.351 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.228 jiwa. Penduduk di Desa Pembengis yang termasuk usia produktif sebanyak 1.534 jiwa yang terdiri dari 777 jiwa laki-laki dan 757 perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk usia produktif dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga kerja di desa tersebut mencukupi termasuk tenaga kerja di bidang pertanian.

Sebagian besar penduduk di Desa Pembengis memiliki mata pencaharian sebagai petani (59,7 persen). Data mata pencaharian utama masyarakat di Desa Pembengis dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pembengis, Kecamatan Bram Itam Tahun 2009

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Petani	589	59,7
Buruh	215	21,8
Nelayan	74	7,5
Pedagang	56	5,6
Pegawai Negeri	29	2,9
TNI/Polri	2	0,2
Lain-lain	27	2,7
<b>Total</b>	<b>992</b>	<b>100</b>

Sumber : Monografi Desa Pembengis, 2009

### 5.2.2 Desa Tanjung Senjulang

Responden wilayah ke dua yakni petani penerima PUAP berasal dari Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Bram Itam. Luas wilayah desa tersebut sebesar 1.099,6 Ha dengan sebaran penggunaan lahan sebagai berikut: 855 Ha digunakan untuk perkebunan, 175 Ha untuk sawah, 50 Ha digunakan untuk bangunan dan halaman serta 16 Ha sebagai tanah yang sementara tidak diusahakan atau lahan tidur.

Desa Tanjung Senjulang terdiri dari dua dusun yakni Dusun I dan Dusun II. Jumlah penduduk sebanyak 1.454 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 732 jiwa dan perempuan sebanyak 722 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif yaitu 508 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 161 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 347 jiwa. Penduduk Desa Tanjung Senjulang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Bram Itam Tahun 2009

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Petani	234	56,25
Buruh	73	17,55
Nelayan	75	18,03
Pedagang	20	4,81
Pegawai Negeri	13	3,13
TNI/Polri	1	0,24
<b>Total</b>	<b>416</b>	<b>100</b>

Sumber : Monografi Desa Tanjung Senjulang, 2009

### 5.2.3 Desa Tungkal IV Desa

Responden wilayah ke tiga adalah petani penerima PUAP berasal dari Desa Tungkal IV Desa, Kecamatan Seberang Kota. Kecamatan Seberang Kota awalnya merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir. Namun tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah sehingga Desa Tungkal IV Desa termasuk dalam Wilayah Kecamatan Seberang Kota. Desa Tungkal IV Desa memiliki luas wilayah

sebesar 800 Ha dengan penggunaan luasan desa sebagai berikut: 225 Ha dimanfaatkan untuk pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman, 520 Ha digunakan untuk perkebunan, 10 Ha untuk penggunaan sawah dan 30 Ha masih dalam bentuk padang rumput.

Desa Tungkal IV Desa memiliki dua dusun yaitu Dusun Pidada dan Dusun Api-Api. Jumlah penduduk Desa Tungkal IV Desa sebesar 1.018 jiwa terdiri dari 515 jiwa laki-laki dan 503 jiwa perempuan. Penduduk yang berusia produktif berjumlah sebesar 590 jiwa. Penduduk laki-laki yang berusia produktif berjumlah sebanyak 299 jiwa dan penduduk perempuan usia produktif berjumlah sebanyak 291 jiwa.

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian, penduduk di Desa Tungkal IV Desa yang memiliki pekerjaan sebagai petani terhitung sangat dominan yaitu 360 orang atau sebesar 85,9 persen dari total seluruh jumlah penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Monografi Desa Tungkal IV, pekerjaan sebagai petani masih menjadi pilihan bagi sebagian besar penduduk di desa tersebut selain nelayan dan buruh. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tungkal IV Desa, Kecamatan Seberang Kota Tahun 2009

<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Petani	360	86,12
Buruh	11	2,64
Nelayan	23	5,50
Pedagang	15	3,59
Pegawai Negeri	9	2,15
Total	418	100

Sumber : Monografi Desa Tungkal IV Desa, 2009

### 5.3 Karakteristik Petani Responden

Deskripsi karakteristik petani responden dilihat dari beberapa kriteria antara lain status usahatani, usia petani, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan dan pengalaman berusahatani.

#### 5.3.1 Status Usahatani Padi Petani Responden

Berdasarkan hasil penelusuran secara langsung di tiga Gapoktan atau desa wilayah penelitian, diperoleh bahwa seluruh responden penerima BLM-PUAP memiliki pekerjaan utama sebagai petani padi dengan jumlah responden sebanyak 30 petani responden. Mereka menganggap kegiatan usahatani padi yang dilakukan adalah pekerjaan utama mereka. Namun perlu diketahui juga selain kegiatan usahatani padi sebagai pekerjaan utama mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti berkebun, menjadi buruh dan nelayan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Karakteristik Petani Responden Penerima BLM-PUAP Berdasarkan Status Mata Pencarian Usahatani Padi

Status Usahatani Padi	Jumlah Responden (Orang)	
	Pekerjaan Utama	Pekerjaan Sampingan
Gapoktan Hasil Berkah*	10	0
Gapoktan Cahaya Murni**	10	0
Gapoktan Berkah Hasil Berdua***	10	0
Total	30	0

Sumber : Data Primer, Diolah

Keterangan :

\* Gapoktan di Desa Pembengis

\*\*Gapoktan di Desa Tanjung Senjulung

\*\*\*Gapoktan di Desa Tungkal IV Desa

#### 5.3.2 Usia Petani Responden

Berdasarkan kriteria usia, petani responden penerima BLM-PUAP yang berusahatani padi dibagi menjadi tiga kelompok angkatan kerja, yaitu kelompok usia 0 sampai 25 tahun, kemudian dari umur 26 tahun sampai 50 tahun dan dari 51

tahun sampai umur 75 tahun. Sebaran petani responden penerima BLM-PUAP dari masing-masing kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Sebaran Petani Responden Menurut Golongan Umur

<b>Golongan Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
0-25	-	-
26-50	26	86,67
51-75	4	13,33
Total	30	100

Sumber : Data Primer, diolah

Pada Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa para responden yang melakukan kegiatan usahatani padi sebagian besar berada pada usia yang produktif yaitu pada rentang umur 26 tahun sampai 50 tahun. Namun faktor usia tidak membatasi para petani untuk melakukan kegiatan usahatani. Hal ini terbukti dari jumlah responden yang berusia lanjut dan tergolong bukan usia produktif tetapi masih mampu melakukan aktivitas usahatani. Terdapat sekitar 13,33 persen responden yang berusia lanjut berada pada kisaran usia 51-75 tahun.

### 5.3.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan rendah merupakan salah satu hal yang masih melekat pada karakteristik petani padi pada umumnya. Tingkat sekolah dasar merupakan pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh petani responden. Gambaran tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10.** Sebaran Responden Petani Padi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak sekolah	-	-
SD	19	63,33
SLTP	10	33,33
SLTA	1	3,33
Total	30	100

Sumber : Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa tidak ada responden yang tidak bersekolah namun tingkat pendidikan para responden sebagian besar hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini dibuktikan dengan persentase yang hanya sekolah sampai tingkat SD sebesar 63,33 persen atau sebanyak 19 orang. Kemudian responden yang sekolah sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar 33,33 persen atau sebanyak 10 orang. Sisanya sebesar 3,33 persen atau satu orang mampu sekolah hingga sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tidak ada responden yang pernah mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan keterbatasan biaya karena responden berasal dari keluarga yang ekonominya lemah atau miskin.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan para responden tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka memilih untuk meneruskan warisan orang tuanya yakni menjadi petani. Melakukan kegiatan usahatani khususnya padi dengan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh langsung dari orang tua merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh para responden berpendidikan rendah.

#### **5.3.4 Status Kepemilikan dan Luas Lahan**

Lahan sawah yang dimiliki oleh seluruh petani responden penerima BLM-PUAP merupakan lahan milik pribadi. Dari hasil wawancara melalui penyebaran kuisisioner, tidak ada satu pun petani responden yang status lahannya adalah lahan sewa. Selengkapny mengenai status lahan dan luasan lahan yang dimiliki oleh petani responden dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11.** Jumlah Petani Responden Berdasarkan Kriteria Luasan Lahan Padi yang Dimiliki Tahun 2009

<b>Luas Lahan (Ha)</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 0,5	21	70
0,5-2	9	30
> 2	0	0
Total	30	100

Sumber: Data Primer, diolah

Pada Tabel 11 terlihat bahwa hampir semua responden yaitu 70 persen memiliki luas lahan sawah dibawah 0,5 hektar, kemudian responden petani yang memiliki luas lahan lahan sawah antara 0,5 sampai 2 hektar sebanyak 30 persen atau sebanyak 9 orang. Sementara itu tidak ada satu pun responden petani yang memiliki luas sawah diatas dua hektar. Apabila luas lahan yang dimiliki oleh petani lebih dari dua hektar, maka akan semakin banyak produksi padi yang dihasilkan dan tentunya pendapatan petani pun diharapkan semakin meningkat pula.

### 5.3.5 Pengalaman Berusahatani Petani Responden

Berdasarkan hasil wawancara melalui kuisisioner dengan para responden penerima BLM-PUAP dapat diinformasikan bahwa dari total 30 petani responden, sebesar 43,33 persen atau 13 petani responden berpengalaman bertani lebih dari 15 tahun. Sebesar 23,33 persen atau tujuh petani responden memiliki pengalaman bertani cukup muda yakni antara satu sampai lima tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12.** Jumlah Petani Responden Berdasarkan Kriteria Pengalaman Berusahatani

<b>Lama Pengalaman Bertani (Tahun)</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 5	7	23,33
6-10	5	16,67
11-15	5	16,67
> 15	13	43,33
Total	30	100

Sumber: Data Primer, diolah

Pengalaman berusahatani padi yang dimiliki oleh petani menunjukkan lamanya petani dalam berusahatani padi tersebut. Semakin lama pengalaman berusahatani maka dapat dikatakan petani sudah mengetahui dan sudah menguasai teknik berbudidaya dalam kegiatan usahatani yang dijalankan. Namun juga tetap

diperlukan pendampingan usaha berupa pembinaan, pelatihan dan konsultasi pada petugas penyuluh lapangan untuk membantu para petani menjalankan kegiatan usahataniya serta dapat membantu mengatasi permasalahan di lapangan apabila para petani tidak mampu mengatasi sendiri. Selain itu pendampingan juga dapat membantu petani dalam menyerap informasi-informasi teknologi terbaru di bidang pertanian khususnya padi.



## **VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **6.1 Karakteristik Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota**

Karakteristik Gapoktan merupakan ciri atau sifat khas yang melekat pada tubuh lembaga tersebut. Karakteristik suatu lembaga dalam hal ini Gapoktan dapat menciptakan suatu citra yang memiliki pengaruh terhadap lingkungannya. Gapoktan merupakan lembaga sosial ekonomi yang berada di perdesaan yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi anggotanya untuk berbagi informasi mengenai pertanian dan sebagainya. Gapoktan sebagai lembaga sosial ekonomi memiliki karakteristik yang unik yakni karakteristik organisasi dan ekonomi (usaha). Untuk mengetahui secara jelas mengenai karakteristik Gapoktan tersebut, peneliti mencoba menjelaskan dari sisi kelembagaan (organisasi) dan sisi ekonomi (usaha) pada Gapoktan yang berada di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota.

#### **6.1.1 Aspek Kelembagaan Gapoktan**

Suatu kelembagaan diharapkan mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian pertanian di perdesaan melalui suatu perusahaan dan inovasi produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan konsumen (anggota) dari aspek kuantitas maupun kualitas. Hadirnya suatu kelembagaan juga harus mampu membela kepentingan petani sebagai pelaku utama (produsen) sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Dengan demikian kelembagaan tersebut harus dibentuk dari potensi lokal yang terdapat dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut di suatu wilayah atau desa.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota (setelah ada pemekaran kecamatan) atau di Kecamatan Tungkal Ilir telah berdiri pada tahun 2007. Pendirian semua Gapoktan di dua kecamatan tersebut dibentuk atas dasar rekomendasi oleh penyuluh pendamping setempat yang ditugaskan untuk mensosialisasikan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Selain itu, tujuan lain dibentuknya Gapoktan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan serta masyarakat tani, anggota kelompok tani yang tergabung

dalam Gapoktan melalui akidah-akidah teknologi pertanian yang lebih menguntungkan dan optimalisasi pemberdayaan kelompok tani. Pembentukan Gapoktan juga diharapkan memiliki fungsi yang dapat menjadi magnet bagi anggota maupun non anggota dalam mewadahi proses belajar mengajar bagi kelompok tani dan anggotanya, wahana kerjasama antar kelompok tani, serta mampu mengembangkan pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Proses pembentukan Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota cenderung cukup sulit karena terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam mendirikan sebuah lembaga desa atau Gapoktan, dimana tidak semua persyaratan tersebut bisa terpenuhi oleh para petani. Beberapa ketentuan tersebut meliputi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD RT) Gapoktan, struktur kepengurusan, daftar nama kelompok tani beserta luas sawah atau kebun yang dimiliki, KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta membuat surat pernyataan.

Beberapa ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam rangka untuk memudahkan proses pengadministrasian anggota dan pengurus Gapoktan dan juga lebih diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan penerima BLM-PUAP. Tidak semua Gapoktan yang telah terbentuk dapat langsung direkomendasikan untuk memperoleh BLM-PUAP. Kebanyakan Gapoktan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mendapat bantuan PUAP lebih disebabkan oleh faktor teknis. Faktor teknis yang dimaksud adalah kemampuan dalam memenuhi persyaratan secara administratif masih banyak yang mengalami hambatan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdapat di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota berjumlah empat Gapoktan. Adapun ke empat Gapoktan tersebut yakni 1) Gapoktan Hasil Berkah yang beralamat di Desa Pembengis, Kecamatan Bram Itam; 2) Gapoktan Cahaya Murni beralamat di Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Bram Itam; 3) Gapoktan Rizki Usaha Berdua yang beralamat di desa Tungkal IV Desa, Kecamatan Seberang Kota; dan terakhir adalah Gapoktan Karya Bersama dengan alamat di Desa Tungkal V, Kecamatan Seberang Kota.

Terpilihnya desa-desa tersebut sebagai penerima BLM-PUAP karena berdasarkan data statistik tergolong sebagai desa miskin. Oleh sebab itu dalam upaya memenuhi persyaratan sebagai penerima BLM-PUAP maka dibentuklah Gapoktan. Pembentukan ke empat Gapoktan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari keterlibatan beberapa tokoh formal. Tokoh formal yang dimaksud adalah penyuluh pendamping dan perangkat desa. Penyuluh berperan sebagai penggerak, pengarah dan pengawas jalannya lembaga desa tersebut. Sementara perangkat desa seperti kepala desa berperan dalam pengadaan tempat untuk perkumpulan para petani dalam melaksanakan pemilihan pengurus Gapoktan serta mengesahkan Gapoktan secara resmi.

Bentuk struktur kepengurusan Gapoktan di dua kecamatan tersebut rata-rata memiliki kesamaan, dimana bentuk struktur kepengurusan Gapoktan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan didukung oleh beberapa seksi. Seksi-seksi yang terbentuk antara lain: seksi sarana produksi, seksi jasa pengolahan hasil, seksi jasa simpan pinjam, seksi jasa pemasaran dan kerja sama serta seksi jasa informasi dan teknologi. Selengkapnya kepengurusan dari masing-masing Gapoktan di tiga desa dapat dilihat pada Lampiran 3.

Jabatan di dalam kepengurusan Gapoktan memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing Gapoktan di tiga desa, dapat dijelaskan secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus Gapoktan:

#### 1. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua

- Menetapkan kebijakan pelaksanaan rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- Meyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat.
- Melaksanakan semua keputusan.
- Memimpin dan mengatur pengelolaan organisasi sehari-hari dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan yang ditetapkan.

- Bertanggung jawab atas maju mundurnya Gapoktan.
  - Memimpin rapat atau musyawarah.
  - Memimpin laporan pada musyawarah.
  - Memimpin dan mengatur pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Gapoktan serta pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan keputusan-keputusan musyawarah yang terdiri atas perencanaan, pengaturan kegiatan, penggunaan dana, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
2. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris
- Memimpin dan mengatur berfungsinya sekretarian.
  - Menyiapkan bahan-bahan musyawarah dan rapat.
  - Menyiapkan laporan.
  - Bertanggung jawab kepada ketua.
3. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Bendahara
- Mengatur pengadaan dan pengelolaan dana, termasuk anggaran pendapatan dan belanja Gapoktan.
  - Melaporkan pengelolaan dana bulanan, triwulan dan neraca keuangan pada akhir tahun.
  - Bertanggung jawab kepada ketua.
4. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi Jasa Sarana Produksi
- Bersama ketua menyusun rencana kerja tahunan seksi jasa sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota.
  - Bersama ketua mengusahakan ketersediaan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota.
  - Menyampaikan laporan berkala kepada ketua.
  - Bertanggung jawab kepada ketua.
5. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi Jasa Pengolahan Hasil
- Bersama ketua menyusun rencana kerja tahunan seksi jasa pengolahan hasil.

- Bersama ketua mengusahakan kelancaran pengolahan hasil komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
- Menyampaikan laporan berkala kepada ketua.
- Bertanggung jawab kepada ketua.

#### 6. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi Jasa Simpan Pinjam

- Bersama ketua menyusun rencana kerja tahunan seksi jasa simpan pinjam.
- Bersama ketua mengusahakan ketersediaan modal usaha dan kelancaran pinjaman anggota.
- Bersama ketua menyusun peraturan-peraturan simpan pinjam.
- Menyampaikan laporan berkala kepada ketua.
- Bertanggung jawab kepada ketua.

#### 7. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi Jasa Pemasaran dan Kerjasama

- Bersama ketua menyusun rencana kerja tahunan seksi jasa pemasaran dan kerjasama.
- Bersama ketua mengusahakan kelancaran pemasaran produksi komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
- Menyampaikan laporan berkala kepada ketua.
- Bertanggung jawab kepada ketua.

#### 8. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Seksi Jasa Informasi dan Teknologi

- Bersama ketua menyusun rencana kerja tahunan seksi jasa informasi dan teknologi.
- Bersama ketua mengusahakan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh anggota.
- Menyampaikan laporan berkala kepada ketua.
- Bertanggung jawab kepada ketua.

### **6.1.1.1 Keanggotaan Gapoktan**

Keanggotaan Gapoktan di tiga desa penelitian memiliki latar belakang yang dapat dikatakan sama. Status pekerjaan sebagai petani mendominasi di dalam tubuh Gapoktan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data pada monografi desa dimana rata-rata di tiga desa yang diteliti mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Perkembangan jumlah kelompok tani maupun anggotanya yang tergabung dalam Gapoktan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut data yang diperoleh pada Gapoktan di tiga desa penelitian, jumlah kelompok tani sebelum adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebanyak 22 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 549 orang. Kemudian dengan adanya program pemerintah berupa PUAP dapat dilihat terjadi perubahan jumlah kelompok tani maupun anggota kelompok taninya. Pada Tabel 13 dapat dilihat perubahan jumlah kelompok tani maupun anggotanya masing-masing sebanyak 33 kelompok tani dan 919 orang. Persentase perubahan jumlah anggota Gapoktan di tiga desa yakni Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa sebesar 56,43 persen.

Perubahan jumlah kelompok tani maupun anggota kelompok tani yang tergabung dalam masing-masing Gapoktan di tiga desa tersebut secara keseluruhan tidak serta merta mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gapoktan Rizki Usaha Berdua di Desa Tungkal IV Desa dimana jumlah kelompok tani maupun anggotanya sebelum adanya program BLM-PUAP dan setelah adanya program BLM-PUAP tidak mengalami perubahan peningkatan atau penurunan jumlah kelompok tani maupun anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Gapoktan Rizki Usaha Berdua, tidak adanya perubahan dalam jumlah kelompok tani setelah adanya program PUAP bukan disebabkan karena kurangnya sosialisasi pengurus Gapoktan ataupun petugas penyuluh lapangan (PPL), namun lebih disebabkan karena jumlah kelompok tani yang ada di desa tersebut jumlahnya memang sebanyak empat kelompok tani dengan jumlah total keseluruhan anggotanya sebanyak 105 petani. Perkembangan jumlah kelompok tani dan anggotanya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13.** Perkembangan Jumlah Kelompok Tani dan Anggotanya Sebelum dan Sesudah Adanya Program BLM-PUAP

Gapoktan	Sebelum PUAP		Setelah PUAP		Perubahan Anggota (%)
	Poktan	Anggota (Orang)	Poktan	Anggota (Orang)	
Hasil Berkah	10	289	18	557	31,67
Cahaya Murni	8	155	11	257	24,76
Rizki Usaha Berdua	4	105	4	105	0
Total	22	549	33	919	56,43

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing ADRT (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga) Gapoktan di tiga desa dapat dijelaskan mengenai syarat-syarat keanggotaan untuk diterima menjadi bagian dari Gapoktan. Adapun syarat-syarat keanggotaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani diterima menjadi anggota apabila memenuhi memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain :
  - a. Kelompok tani yang berada dalam wilayah desa dimana Gapoktan tersebut berada.
  - b. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya.
  - c. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum dan peraturan-peraturan.
  - d. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.
2. Seseorang dapat diterima menjadi anggota apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani yang berada dalam wilayah binaan Gapoktan.
  - b. Telah berumur 17 tahun atau telah menikah.
  - c. Bermoral pancasila.
  - d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum dan peraturan-peraturan.

- e. Mengajukan permohonan kepada pengurus dengan mengisi biodata calon anggota meliputi: nama calon, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan sebagainya.
- f. Membayar uang pangkal sebesar Rp 20.000. Uang tersebut hanya dibayar satu kali selama menjadi anggota Gapoktan. Membayar iuran wajib sebesar Rp 10.000 setiap bulannya. Sedangkan iuran sukarela tergantung kemampuan anggota.

Setelah dinyatakan secara resmi bergabung menjadi anggota Gapoktan maka setiap anggota Gapoktan memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pengurus Gapoktan. Salah satunya adalah hak dalam kegiatan simpan pinjam. Selain itu anggota juga memiliki kekuasaan penuh dalam musyawarah tahunan sehingga anggota diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut.

#### **6.1.1.2 Kegiatan Keorganisasian**

Kegiatan Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota sebelum adanya program PUAP mayoritas melakukan kegiatan usahatani padi dan berkebun serta nelayan. Selain itu Gapoktan yang ditemui disana juga telah melakukan kegiatan keorganisasian. Diantara kegiatan keorganisasian yang telah dilaksanakan, kegiatan yang masih dilaksanakan adalah pertemuan dua mingguan. Pertemuan dua mingguan yang dimaksud adalah kegiatan para pengurus dan anggota Gapoktan dimana dalam pertemuan tersebut membahas permasalahan di lapangan yang tentunya berkaitan langsung dengan bidang usahatani, baik usahatani tanaman pangan maupun perkebunan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus serta anggota Gapoktan di tiga wilayah penelitian yaitu Gapoktan Hasil Berkah, Gapoktan Cahaya Murni dan Gapoktan Rizki Usaha Berdua. Pertemuan dua mingguan yang diadakan di akhir pekan dimaksudkan agar para pengurus dan anggota masing-masing Gapoktan dapat memberi dan menerima masukan dari pengurus maupun anggota terkait dengan usahatani yang mereka jalankan. Hasil pertemuan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada penyuluh lapangan yang



bertugas di wilayah Gapoktan tersebut sebagai bahan laporan dan masukan untuk dinas pertanian setempat.

Selanjutnya dinas pertanian setempat akan melakukan suatu analisa lapangan melalui penyuluh lapangan. Apabila laporan dari Gapoktan sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dinas pertanian dan badan penyuluh pertanian akan memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas pertanian dalam menangani permasalahan seperti yang telah dijelaskan adalah dengan melakukan program kegiatan bantuan seperti bantuan pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, obat-obatan dan pembinaan atau pelatihan oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL). Hasil akhir yang diharapkan dari adanya kegiatan bantuan tersebut adalah agar para petani tetap bersemangat untuk berusahatani, dalam hal ini adalah semangat untuk meningkatkan produktivitas agar bisa menghasilkan produksi gabah berkualitas baik sehingga mampu berswasembada pangan.

Adanya kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing Gapoktan tersebut mencerminkan bahwa pada Gapoktan yang diteliti terdapat aktivitas pendidikan yang bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan anggota. Para penyuluh pertanian pun juga mendukung adanya kegiatan tersebut bahkan setiap pertemuan, penyuluh pertanian selalu diminta oleh para petani disana untuk memberikan masukan dan simulasi terkait dengan masalah pertanian di desa tersebut. Walaupun acara pertemuan berbentuk semi formal namun para petani mengikuti jalannya pertemuan tersebut dengan serius dan teratur.

Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pemanenan yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh pengurus maupun anggota Gapoktan di masing-masing desa. Peneliti mengamati beberapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan melakukan kegiatan panen secara bersama-sama. Hasil wawancara dengan salah satu anggota Gapoktan menyatakan bahwa kegiatan pemanenan raya dapat dikatakan sebagai agenda rutin oleh para petani, penyuluh pertanian lapangan dan dinas pertanian. Walaupun ide kegiatan tersebut bukan berasal langsung dari inisiatif petani melainkan dari penyuluh pertanian, namun untuk

pelaksanaan di lapangan para petani melakukannya dengan bersama-sama dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pemanenan secara bersama-sama adalah untuk mengatur jadwal pengolahan lahan dan penanaman pada musim tanam berikutnya.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antara sub sektor. PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Adanya program PUAP di masing-masing desa penerima PUAP yaitu Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa sedikit memiliki pengaruh terhadap para petani disana. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota Gapoktan dalam upaya mendukung pelaksanaan program PUAP. Selain kegiatan keorganisasian berupa pertemuan dua mingguan dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, Gapoktan penerima BLM-PUAP kini diberikan tambahan kegiatan lagi dalam menunjang pelaksanaan program PUAP tersebut. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah penyusunan RUA (Rencana Usaha Anggota) dan RUB (Rencana Usaha Bersama).

Penyusunan RUA dan RUB oleh pengurus dan anggota Gapoktan bertujuan selain untuk memperoleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP, juga memiliki tujuan untuk melatih para petani dalam merumuskan dan menyusun rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing petani. Penyusunan RUA oleh anggota Gapoktan yang kemudian disusun dalam bentuk RUB melibatkan partisipasi anggota secara aktif, sehingga

diharapkan memiliki orientasi pada kepentingan anggota dan perencanaan yang disusun kedepannya mampu mencerminkan kebutuhan anggotanya.

### **6.1.2 Aspek Ekonomi (Usaha) Gapoktan**

Pada prinsipnya suatu kelembagaan pertanian (Gapoktan) di perdesaan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi yang dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan. Pada Gapoktan yang diteliti di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota, mayoritas kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah pertanian secara *on farm* yakni budidaya padi. Usahatani padi merupakan pekerjaan utama para anggota Gapoktan di dua kecamatan yang diteliti.

Usahatani padi yang terdapat pada tiga Gapoktan tersebut menggunakan sistem monokultur. Penanaman padi dilakukan satu kali setahun. Sistem budidaya padi sawah di tiga desa atau tiga Gapoktan yang diteliti dimulai dengan pengolahan lahan yang kemudian dilanjutkan dengan penyemaian, penanaman, pemupukan, penyiangan dan pemberantasan hama serta pemanenan. Kegiatan sebelum penanaman, penyiangan dan pemberantasan hama penyakit tanaman biasanya dilakukan secara bersama-sama. Keragaan sistem usahatani padi sawah di tiga desa penelitian secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **6.1.2.1 Proses Budidaya**

##### **6.1.2.1.1 Pengolahan Lahan**

Kegiatan pengolahan dilakukan bertujuan untuk membuat lingkungan fisik tanah menjadi baik atau subur bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu kegiatan pengolahan lahan juga dapat menstabilkan kondisi tanah dari segi kandungan unsur haranya, perbaikan sifat fisik dan perbaikan drainase tanah. Pengolahan tanah untuk dijadikan lahan sawah baik di desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung maupun Desa Tungkal IV Desa rata-rata menggunakan alat cangkul. Proses pengolahan lahan dilakukan satu kali dalam satu musim tanam. Kegiatan dimulai sebelum memulai pemanenan. Pada saat pengolahan lahan dilakukan juga

pembuatan petakan sawah. Kemudian setelah selesai tanah diberakan selama dua hari dan selanjutnya dilakukan penanaman bibit padi yang telah disiapkan.

Kegiatan pengolahan melibatkan tenaga kerja yang berasal dari dalam dan luar keluarga. Rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan pengolahan lahan di bawah 0,5 Ha sebesar 10 HOK (Hari Orang Kerja), terdiri dari 3,52 HOK penggunaan tenaga kerja luar keluarga (TKLK) dan 6,48 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga (TKDK). Sedangkan untuk luas lahan di atas 0,5 hektar penggunaan tenaga kerja sebesar 21,56 HOK, terdiri dari 8,67 HOK penggunaan tenaga kerja luar keluarga dan 12,89 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga.

#### **6.1.2.1.2 Penyemaian**

Kegiatan penyemaian dilakukan pada lahan yang telah disiapkan. Kegiatan diawali dengan melakukan pengolahan lahan menggunakan cangkul sampai kondisi tanah menjadi gembur dan rata. Kemudian lahan dipagari oleh bambu dan plastik dengan tujuan agar benih terlindungi dari gangguan hewan ternak. Setelah lahan persemaian siap, selanjutnya benih ditaburkan secara merata diatas lahan tersebut.

Secara umum kegiatan penyemaian dikerjakan oleh tenaga kerja dalam keluarga. Rata-rata penggunaan tenaga kerja pada kegiatan penyemaian sebesar 2,38 HOK untuk luasan lahan di bawah 0,5 hektar. Jumlah tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) yang digunakan lebih banyak dari penggunaan tenaga kerja luar keluarga (TKLK) yakni 1,95 HOK untuk tenaga kerja dalam keluarga dan 0,43 untuk tenaga kerja luar keluarga. Sementara itu, untuk luasan lahan di atas 0,5 hektar rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan penyemaian sebesar 5,28 HOK terdiri dari 2,56 HOK penggunaan tenaga kerja luar keluarga dan 2,72 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga.

#### **6.1.2.1.3 Penanaman**

Kegiatan penanaman padi dilakukan apabila bibit yang dipersemaian telah cukup umur. Teknis penanaman dilakukan secara lurus dan teratur dengan jarak

tanam 25 x 25 cm. Hal ini bertujuan agar memudahkan penyiangan rumput atau gulma lainnya. Setelah penanaman selesai sekitar 10 hari petakan sawah tidak digenangi air. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bibit padi yang telah ditanam dapat memperkuat perakarannya dan merangsang tumbuhnya anakan padi.

Pada kegiatan penanaman sebagian besar petani responden menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga. Rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk penanaman padi dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar yakni sebesar 9,53 HOK, terdiri dari 3,36 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan 6,17 HOK penggunaan tenaga kerja luar keluarga. Sedangkan untuk penanaman padi dengan luas lahan di atas 0,5 hektar, rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 21,11 HOK terdiri dari 4,78 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan 16,33 HOK penggunaan tenaga kerja luar keluarga.

#### **6.1.2.1.4 Pemupukan**

Kegiatan pemupukan dilakukan dengan maksud untuk memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi dalam menunjang pertumbuhan, perkembangan dan untuk menghasilkan produksi gabah yang berkualitas baik. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali. Pemupukan dilakukan dengan cara menyebar kemudian diinjak-injak. Kondisi tanah harus dalam keadaan macak-macak yakni dengan jalan menutup saluran pemasukan dan pengeluaran air. Pembukaan saluran dilakukan setelah tiga sampai empat hari setelah pemupukan, sedangkan ketinggian air disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman padi.

Rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan pemupukan dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar adalah sebesar 1 HOK. Kegiatan tersebut hanya menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tidak melibatkan atau menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

#### **6.1.2.1.5 Penyiangan dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman**

Kegiatan penyiangan bertujuan untuk membersihkan tanaman padi dari gangguan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman padi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan sabit. Sepanjang pematang sawah harus bersih dari gangguan gulma agar pertumbuhan tanaman padi tidak terganggu. Sedangkan kegiatan pemberantasan hama dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan bahkan memusnahkan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi. Pestisida yang mayoritas digunakan oleh para petani adalah pestisida dalam bentuk padat dan cair. Penyemprotan atau penaburan pestisida dilakukan sebanyak dua kali atau pada waktu serangan hama tiba.

Pada kegiatan penyiangan dan pemberantasan hama penyakit tanaman rata-rata penggunaan tenaga kerja untuk luasan lahan di bawah 0,5 hektar sebesar 9,52 HOK, terdiri dari 3,38 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan sisanya sebesar 6,14 HOK digunakan tenaga kerja luar keluarga. Sementara untuk luas lahan di atas 0,5 hektar rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 21,11 HOK, dimana penggunaan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 8,44 HOK dan penggunaan tenaga kerja luar keluarga sebesar 12,67 HOK.

#### **6.1.2.1.6 Pemanenan**

Kegiatan pemanenan mencakup aktivitas pemetikan dan perontokan padi. Kegiatan ini biasa dilakukan setelah tanaman padi berumur empat sampai lima bulan. Teknis pemanenan yang dilakukan oleh petani menggunakan teknologi konvensional atau sederhana yaitu berupa arit dan sabit. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong padi kemudian padi dikumpulkan di satu tempat untuk dirontokkan dengan cara membantingnya ke papan kayu yang telah disiapkan atau dengan mesin perontok yang dijalankan secara manual. Setelah selesai perontokkan gabah dikemas ke dalam kaleng atau karung goni dan kemudian diangkut ke tempat pengumpulan panen sementara.

Pada kegiatan pemanenan ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga. Rata-rata penggunaan tenaga dengan luas lahan di

bawah 0,5 hektar sebesar 23,81 HOK yang terdiri dari 3,76 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan sebesar 20,05 HOK digunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Sedangkan untuk luas lahan di atas 0,5 hektar rata-rata penggunaan tenaga kerja sebesar 52,78 HOK terdiri dari 4 HOK penggunaan tenaga kerja dalam keluarga dan sisanya sebesar 48,78 HOK menggunakan tenaga kerja luar keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan petani responden diperoleh informasi bahwa rata-rata petani responden di masing-masing desa mampu menghasilkan produksi gabah sebanyak 1,085 ton untuk luasan sawah sebesar 0.5 Ha. Sedangkan untuk luasan di atas 0.5 Ha atau 1 Ha rata-rata produksi gabah yang dihasilkan sebanyak 2,4 ton. Apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, maka rata-rata jumlah nominal penerimaan petani (belum dikurangi biaya-biaya) pada saat pemanenan dalam satu musim tanam masing-masing sebesar Rp 3.257.000 untuk luas lahan 0.5 Ha dan Rp 7.266.000 untuk luasan lahan di atas 0.5 Ha atau 1 Ha.

Besarnya jumlah rata-rata penerimaan anggota di tiga Gapoktan yang diteliti mencerminkan bahwa Gapoktan tersebut memiliki potensi yang masih bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya. Apalagi dengan melihat jumlah hasil produksi saat ini masih dapat dikatakan kecil karena dengan luas lahan 1 ha seharusnya petani mampu memproduksi padi sebanyak 3 sampai 3,5 ton per musim tanam.

Para petani yang tergabung dalam Gapoktan seyogianya mampu meningkatkan penerimaan mereka. Pengurus Gapoktan dan anggotanya ke depan diharapkan bisa menciptakan nilai tambah bagi padi sebagai komoditas yang sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Gapoktan seharusnya juga mampu untuk mengembangkan unit bisnis di bidang lainnya seperti unit penyaluran pupuk dan benih serta mampu mendirikan unit pengolahan gabah menjadi beras sehingga akan memberikan nilai tambah dan pemasukan yang lebih besar bagi Gapoktan.

Pada saat program PUAP telah berjalan di tiga Gapoktan yang diteliti. Terdapat penambahan satu unit usaha yang dikembangkan oleh masing-masing Gapoktan tersebut. Unit usaha baru tersebut adalah kegiatan simpan pinjam

dengan jaminan bunga yang relatif rendah, bahkan lebih rendah dari bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya (bank). Selama peneliti melakukan pengamatan di tiga Gapoktan, peneliti melihat kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh pengurus Gapoktan disambut antusias oleh anggotanya. Banyak anggota dari Gapoktan yang memperoleh manfaat dengan adanya program PUAP tersebut. Salah satunya adalah para anggota yang diteliti dimana dana bantuan tersebut mayoritas digunakan untuk menambah modal usahatani padi mereka seperti membeli benih, obat (pestisida) dan pupuk.

Kegiatan unit usaha simpan pinjam hingga sampai saat ini masih berjalan. Dengan bunga yang ditawarkan sangat rendah (sekitar 0.5% - 5 %) membuat para petani merasa tidak keberatan dalam mengembalikan pinjaman mereka. Mekanisme pengembalian pinjaman dilakukan pada saat pemanenan tiba. Sebagian hasil panen petani dipotong untuk pelunasan pinjaman. Cara ini bagi pengurus dirasakan cukup baik walupun perputaran uang sedikit lamban. Berikut jumlah penyaluran BLM-PUAP di tiga Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 14.** Realisasi Dana BLM-PUAP di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa Tahun 2008

<b>Nama Gapoktan</b>	<b>Desa</b>	<b>Realisasi Pinjaman (Rp)</b>
Hasil Berkah	Pembengis	88.300.000
Cahaya Murni	Tanjung Senjulung	50.000.000
Berkah Hasil Berdua	Tungkal IV Desa	50.000.000

Sumber : Data Primer, diolah

Pada saat penelitian dilakukan di tiga Gapoktan, pengembalian pinjaman oleh para petani rata-rata baru kembali 70 persen dalam empat bulan terakhir. Berdasarkan hasil Pengurus pada masing-masing Gapoktan.

## **6.2 Pengaruh PUAP Terhadap Kinerja Gapoktan PUAP**

Penelitian dilakukan di tiga lokasi desa yang berbeda yakni Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa. Desa Tungkal V Kecamatan Seberang Kota yang pada awalnya dijadikan sebagai objek penelitian,



kini tidak diteliti. Pertimbangan tidak meneliti desa Tungkal V Seberang Kota dikarenakan desa tersebut mayoritas mengusahakan pada usaha perkebunan. Hal ini tentunya berbeda dengan sasaran objek penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian terhadap komoditas padi.

Berdasarkan pengamatan di tiga desa tersebut, peneliti telah memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Peneliti dapat menjelaskan bahwa adanya sumberdaya modal untuk kegiatan usahatani sangat membantu dan mendorong motivasi para pelakunya. Salah satu sumberdaya modal yang dimaksud adalah bantuan penguatan modal atau dikenal dengan BLM-PUAP. Adanya bentuk fasilitasi bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dapat dicapai. Peranan BLM-PUAP dalam pembangunan ekonomi perdesaan nantinya diharapkan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah komoditi serta pendapatan petani penerima PUAP.

### **6.2.1 Kinerja Organisasi Gapoktan Sebelum dan Sesudah Adanya PUAP**

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya program PUAP yang dicanangkan oleh Departemen Pertanian tentunya akan memberikan dampak tersendiri terhadap Gapoktan. Dampak yang dimaksud adalah Gapoktan diharapkan dapat menunjukkan hasil kinerjanya baik dalam menyalurkan dana BLM PUAP secara merata dan efektif terhadap anggotanya maupun mampu memberikan hasil kinerja ke dalam internal Gapoktan itu sendiri. Penilaian kinerja Gapoktan oleh anggota dalam menyalurkan BLM-PUAP akan dibahas pada sub bab selanjutnya, sementara itu penilaian kinerja Gapoktan oleh anggota sebelum dan setelah adanya program PUAP dapat dilihat dari tujuh indikator berikut: (1) pertemuan/rapat dalam Gapoktan; (2) keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama; (3) rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota; (4) anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama; (5) anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di Gapoktan; (6) Gapoktan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; (7) adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus.

Indikator pertama adalah pertemuan atau rapat merupakan sarana tempat bertukar informasi dan berdiskusi. Pada tingkat Gapoktan biasanya pertemuan dilaksanakan guna membahas permasalahan di lapangan yang nantinya hasil pertemuan tersebut dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus dan utamanya untuk anggota Gapoktan tersebut serta bagi penyuluh pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pengurus di tiga Gapoktan yang berbeda diperoleh informasi bahwa sebelum dan setelah adanya program PUAP kegiatan pertemuan telah dilakukan oleh Gapoktan setiap dua minggu sekali. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa ada atau tidak adanya program PUAP berpengaruh kecil terhadap tingkat pertemuan pada Gapoktan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tanggapan dari responden terhadap kinerja Gapoktan berdasarkan indikator pertemuan/rapat melalui uji hubungan korelasi antara tingkat pertemuan/rapat sebelum dan setelah adanya program PUAP. Selengkapanya korelasi tingkat pertemuan sebelum dan setelah adanya PUAP disajikan pada Tabel 15.

**Tabel 15.** Hasil Uji Korelasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP

		Pertemuan 1	Pertemuan 2
Pertemuan 1	Pearson Correlation	1	.309
	Sig. (2-tailed)		.097
	N	30	30
Pertemuan2	Pearson Correlation	.309	1
	Sig. (2-tailed)	.097	
	N	30	30

Pada Tabel 15 dapat dijelaskan bahwa variabel pertemuan 1 merupakan tingkat pertemuan yang dilakukan sebelum adanya program PUAP, sementara variabel pertemuan 2 adalah tingkat pertemuan yang diadakan setelah adanya program PUAP. Pada gambar tersebut terlihat bahwa tidak ada hubungan korelasi antara pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alfa kepercayaan yakni  $0,097 > 0,05$ . Artinya apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa kepercayaan maka dapat dikatakan bahwa

antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak memiliki hubungan korelasi positif maupun negatif.

Indikator kedua adalah keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama. Sedangkan indikator ketiga adalah rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota. Kedua indikator tersebut sama-sama memiliki keterkaitan satu sama lain yakni sama-sama melibatkan anggota Gapoktan dan proses pembuatan rencana tersebut pun melibatkan oleh petani (anggota) secara langsung. Oleh sebab itu pembahasannya digabungkan menjadi satu.

Rencana Usaha Bersama (RUB) merupakan perencanaan yang disusun guna dijadikan sebagai pedoman kerja oleh pengurus maupun anggota Gapoktan. Adanya rencana usaha bersama tentunya akan memberikan efek positif bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Apalagi dengan penggabungan kelompok tani menjadi satu organisasi yang disebut dengan Gapoktan tentunya akan menambah skala usaha. Implikasi dari adanya pembentukan organisasi Gapoktan tersebut salah satunya adalah dalam pembuatan rencana usaha bersama harus dilakukan secara bersama dan disusun dengan sistematis sesuai dengan dengan kepentingan anggota Gapoktan tersebut.

Sebelum adanya program PUAP rata-rata Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota belum ada yang melakukan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB). Rencana kerja umumnya hanya disusun oleh masing-masing kelompok tani di tiap desa dengan didampingi oleh penyuluh pertanian yang bertugas di masing-masing desa. Akan tetapi perencanaan tersebut terkadang tidak dijadikan pedoman oleh petani (anggota kelompok tani) karena kebanyakan petani di wilayah yang diteliti melakukan kegiatan pertanian secara sendiri-sendiri sesuai dengan kehendak petani itu sendiri, seperti dalam penggunaan input terkadang melebihi dosis yang dianjurkan sehingga hasil produksi padi yang diperoleh pun belum optimal.

Setelah adanya pelaksanaan program PUAP sedikit mulai terlihat adanya perubahan terutama pada internal Gapoktan. Gapoktan yang menjadi penyalur

BLM-PUAP telah memiliki Rencana Usaha Bersama (RUB). Isi dari RUB tersebut mengandung Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA). Sebelum memasuki musim tanam para anggota Gapoktan membuat rencana usaha masing-masing yang nantinya akan dibahas pada saat pertemuan dua mingguan dilaksanakan. Pembahasan mengenai rencana kegiatan usaha melibatkan anggota Gapoktan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan membahas rencana usaha anggota dan rencana usaha kelompok yang berguna untuk mengatur jadwal mulai dari pengolahan tanah hingga pada proses pemanenan dilakukan. Pembahasan selanjutnya adalah pengaturan mengenai jadwal kegiatan bersama dalam memelihara tanaman padi selama masa tunggu hingga panen tiba. Selain itu juga dibahas mengenai rencana kebutuhan para anggota selama proses produksi usahatani hingga panen. Perencanaan seperti ini dilakukan guna mengantisipasi adanya gagal panen sehingga nantinya mengakibatkan petani terutama anggota Gapoktan mengalami banyak kerugian.

Adanya penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang melibatkan anggota dan berorientasi pada kepentingan anggota tentunya memiliki pengaruh terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri. Pengukuran kinerja Gapoktan dilihat dari tanggapan para responden mengenai indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama disajikan pada Tabel 16. Sementara itu, pengukuran kinerja Gapoktan berdasarkan pada rencana usaha gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 16.** Hasil Uji Korelasi Keterlibatan Anggota dalam Penyusunan RUK Dan RUB di Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP

		Keterlibatan 1	Keterlibatan2
Keterlibatan 1	Pearson Correlation	1	.426(*)
	Sig. (2-tailed)		.019
	N	30	30
Keterlibatan 2	Pearson Correlation	.426(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.019	
	N	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 16 dapat dijelaskan bahwa variabel keterlibatan 1 merupakan variabel yang mewakili indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama sebelum PUAP. Sedangkan keterlibatan 2 merupakan variabel yang mewakili indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama setelah PUAP. Hasil dari uji korelasi menunjukkan bahwa adanya program PUAP memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan di Kecamatan Seberang Kota. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan yakni  $0,019 < 0,05$ . Artinya apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan maka antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan korelasi.

Selain melihat dari perbandingan antara nilai signifikan terhadap nilai alfa kepercayaan. Hubungan korelasi juga dapat dilihat dari nilai *pearson correlation*. Apabila nilai dari *pearson correlation* mendekati nilai satu maka terdapat hubungan antara korelasi variabel satu dengan variabel pasangannya. Besarnya nilai *pearson correlation* yakni 0,426. Artinya ada pengaruh yang cukup besar dari kinerja Gapoktan dengan adanya program PUAP berdasarkan indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama sebelum dan setelah PUAP. Selanjutnya pengukuran kinerja Gapoktan berdasarkan tanggapan responden terhadap indikator rencana usaha gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota.

**Tabel 17.** Hasil Uji Korelasi Rencana Usaha Gapoktan Berorientasi Pada Kepentingan Anggota Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP

		Rencana Usaha 1	Rencana Usaha 2
RencanaUsaha	Pearson Correlation	1	.378(*)
	Sig. (2-tailed)		.039
	N	30	30
RencanaUsaha2	Pearson Correlation	.378(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.039	
	N	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada Tabel 17 dapat dijelaskan bahwa variabel rencana usaha 1 merupakan variabel yang mewakili indikator rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota sebelum PUAP. Sedangkan variabel rencana usaha 2 merupakan variabel yang mewakili indikator rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota setelah PUAP. Sama halnya dengan indikator ke dua, pada indikator ke tiga ini hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari adanya program PUAP terhadap indikator rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi yang bernilai sebesar 0,039 lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan. Artinya apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan maka antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan (korelasi). Selain itu nilai *pearson correlation* sebesar 0,378 yang mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa penilaian responden mengenai rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota menyatakan bahwa terdapat perubahan dari kinerja Gapoktan setelah adanya program PUAP.

Indikator ke empat adalah anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama-sama. Kegiatan dalam pertanian yang dikerjakan secara bersama-sama tidak terbatas pada kegiatan usahatani saja, tetapi juga meliputi kegiatan dalam pengadaan pupuk dan obat-obatan, penanaman tanaman dan lain sebagainya. Kegiatan pertanian yang dikerjakan secara bersama-sama baru terlihat setelah adanya program PUAP. Hal tersebut dikarenakan para anggota Gapoktan telah memiliki pedoman dalam kegiatan pertanian yaitu Rencana Usaha Bersama (RUB), sehingga pengerjaan kegiatan pertanian yang dilakukan secara bersama merupakan efek positif dari adanya perencanaan yang telah dibuat bersama-sama.

Penilaian dari para responden terhadap kinerja Gapoktan berdasarkan indikator pengerjaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki hubungan positif atau dengan kata lain terdapat pengaruh program PUAP terhadap perubahan kinerja Gapoktan. Hasil uji korelasi disajikan pada Tabel 18.

**Tabel 18.** Hasil Uji Korelasi Kegiatan Bersama Pada Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP

		Kegiatan Bersama 1	Kegiatan Bersama2
KegiatanBersama 1	Pearson Correlation	1	.447(*)
	Sig. (2-tailed)		.013
	N	30	30
KegiatanBersama 2	Pearson Correlation	.447(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.013	
	N	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa variabel kegiatan bersama 1 merupakan variabel yang mewakili indikator anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama-sama sebelum PUAP. Sedangkan variabel kegiatan bersama 2 adalah variabel yang mewakili indikator anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama-sama setelah adanya program PUAP.

Hasil uji korelasi terhadap indikator kinerja Gapoktan yang ke empat menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,013 lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan yaitu 0,05. Artinya adalah apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan maka antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan korelasi. Selanjutnya nilai *pearson correlation* sebesar 0,447 menunjukkan bahwa ada pengaruh PUAP yang cukup besar terhadap kinerja Gapoktan dalam mengkoordinasikan anggotanya untuk melakukan kegiatan pertanian secara bersama-sama.

Hal tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara terhadap salah satu anggota Gapoktan (petani responden) yang menyatakan bahwa dengan adanya program PUAP banyak yang diperoleh oleh para petani sebagai anggota Gapoktan. Salah satu manfaat yang diperoleh tersebut adalah adanya nilai gotong royong (kebersamaan) diantara petani maupun kelompok tani. Kebersamaan dalam bekerja sama dalam kegiatan pertanian maupun kebersamaan dalam kegiatan di luar pertanian seperti pembuatan bendungan atau tata air mikro (TAM) secara bersama-sama, pengadaan pupuk dan obat-obatan dan lain sebagainya.

Indikator ke lima adalah keterlibatan anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan di Gapoktan. Kegiatan ini dapat dilihat dalam pelaksanaan rapat dua mingguan. Sebelum program PUAP dilaksanakan para anggota Gapoktan dalam rapat dua mingguan sebagian besar turut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan dalam berdiskusi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa anggota Gapoktan yang menyatakan bahwa rapat dua mingguan merupakan kegiatan dimana para petani (anggota Gapoktan) bebas memberikan masukan dan memaparkan segala bentuk permasalahan yang sedang mereka hadapi, khususnya masalah pertanian. Selain itu, beberapa bentuk keterlibatan anggota Gapoktan dalam mengambil keputusan diantaranya partisipasi anggota dalam menentukan jadwal tanam, jadwal pemeliharaan tanaman dan lain sebagainya.

Pada saat program PUAP dilaksanakan terdapat penambahan kegiatan di Gapoktan diantaranya kegiatan penyusunan RUA (Rencana Usaha Anggota), RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan lain sebagainya. Adanya kegiatan ini tentunya akan menambah partisipasi anggota. Namun berdasarkan hasil uji korelasi penilaian responden terhadap indikator mengenai keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan bahwa sebelum maupun setelah adanya program PUAP tidak terdapat hubungan korelasi. Korelasi yang dimaksud bukan berarti korelasi yang bernilai negatif. Namun korelasi yang dimaksud adalah keterlibatan sebagian besar anggota dalam pengambilan keputusan sebelum dan setelah PUAP sama-sama memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Artinya ada atau tidak adanya program ini tidak berpengaruh pada indikator ke lima ini. Hasil uji korelasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 19.

**Tabel 19.** Hasil Uji Korelasi Keterlibatan Anggota Gapoktan Dalam Pengambilan Keputusan Sebelum dan Setelah PUAP

		Terlibat Aktif	Terlibat Aktif2
Terlibat Aktif	Pearson Correlation	1	.316
	Sig. (2-tailed)		.089
	N	30	30
Terlibat Aktif 2	Pearson Correlation	.316	1
	Sig. (2-tailed)	.089	
	N	30	30



Pada Tabel 19 dapat dijelaskan bahwa variabel terlibat aktif 1 merupakan variabel keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan sebelum adanya program PUAP, sementara variabel terlibat aktif 2 adalah variabel keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan setelah adanya program PUAP. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel terlibat aktif 1 dan terlibat aktif 2. Ini ditunjukkan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari nilai alfa kepercayaan yakni  $0,089 > 0,05$ . Artinya apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa kepercayaan maka dapat dikatakan bahwa antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak memiliki hubungan korelasi positif maupun negatif.

Indikator ke enam adalah Gapoktan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kinerja Gapoktan yang ke enam ini sekaligus juga merupakan tujuan dari diadakannya program PUAP, dimana dengan adanya PUAP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, buruh tani maupun rumah tangga petani. Pelaksanaan program PUAP yang baru berjalan satu tahun tentunya tidak langsung serta merta mampu merubah tingkat kesejahteraan petani. Namun sedikit demi sedikit program ini memberikan kontribusi yang positif. Kinerja Gapoktan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan usahatani dengan memberikan dana BLM-PUAP kepada anggota secara merata. Pemberian dana BLM-PUAP tersebut dilakukan dengan sistem simpan pinjam yang nantinya dana tersebut akan dikembalikan oleh petani (peminjam) kepada pengurus Gapoktan.

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari tempat penelitian diketahui bahwa rata-rata para responden penerima BLM-PUAP memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal usaha mereka. Modal tersebut digunakan untuk membeli benih, pupuk dan obat-obatan. Hasil dari penilaian responden terhadap kinerja Gapoktan berdasarkan kemampuan Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat pada Tabel 20.

**Tabel 20.** Hasil Uji Korelasi Kemampuan Gapoktan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Sebelum dan Setelah PUAP

		Kesejahteraan 1	Kesejahteraan 2
Kesejahteraan 1	Pearson Correlation	1	.392(*)
	Sig. (2-tailed)		.032
	N	30	30
Kesejahteraan 2	Pearson Correlation	.392(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.032	
	N	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada Tabel 20 diketahui bahwa adanya program PUAP memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa kepercayaan yakni  $0,032 < 0,05$ . Artinya apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan maka antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan korelasi.

Selain dilihat dari tingkat signifikansi terhadap nilai alfa kepercayaan, perubahan kinerja Gapoktan sebelum dan setelah adanya PUAP dapat dilihat dari nilai *pearson correlation*. Nilai *pearson correlation* adalah 0,392 menunjukkan bahwa terdapat hubungan kinerja Gapoktan sebelum dan setelah PUAP dalam meningkatkan kesejahteraan petani (anggota Gapoktan). Peningkatan kesejahteraan diukur dengan melihat pendapatan yang diperoleh petani (anggota) sebelum dan setelah adanya program PUAP. Perubahan tingkat pendapatan akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Indikator terakhir yakni indikator yang ke tujuh adalah adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus. Pendidikan di tingkat petani sangat diperlukan guna meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para petani dalam berusahatani. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan salah satu pengurus Gapoktan mengenai aktivitas pendidikan dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya program PUAP aktivitas pendidikan berjalan walaupun intensitas pertemuannya masih kecil.

Aktivitas kegiatan tersebut diisi oleh penyuluh pertanian yang oleh para petani dijadikan sebagai sumber informasi terbaru. Penyuluh pertanian sampai saat ini memiliki peran yang sangat beragam dan penting di mata para petani.

Peran para penyuluh pertanian lapangan (PPL) sangat penting dalam kaitannya dengan kegiatan usahatani. Secara umum peranan petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL) ialah sebagai sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian, meningkatkan tingkat adopsi teknologi dan tingkat produktivitas petani. Oleh sebab itu adanya aktivitas pendidikan di masing-masing Gapoktan berimplikasi positif terhadap perkembangan Gapoktan dan utamanya perkembangan bagi petani itu sendiri.

Adanya program PUAP tentunya menambah energi baru bagi para penyuluh maupun para petani. Energi baru yang dimaksud adalah adanya tambahan tantangan baru bagi PPL maupun pengurus Gapoktan dalam mensukseskan program tersebut. Setelah adanya program PUAP anggota Gapoktan lebih banyak diberi input pengetahuan mengenai kegiatan usahatani, mulai dari penggunaan input yang sesuai dosis yang ditetapkan hingga sampai memecahkan masalah serangan hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman.

Penilaian perkembangan kinerja Gapoktan yang dilihat dari adanya penyelenggaraan pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan anggota sebelum dan setelah adanya program PUAP dapat dilihat pada Tabel 21.

**Tabel 21.** Hasil Uji Korelasi Indikator Adanya Aktivitas Pendidikan Kemampuan pada Gapoktan dalam Meningkatkan Pengetahuan Anggotanya Sebelum dan Setelah PUAP

		Pendidikan	Pendidikan2
Pendidikan 1	Pearson Correlation	1	.431(*)
	Sig. (2-tailed)		.017
	N	30	30
Pendidikan 2	Pearson Correlation	.431(*)	1
	Sig. (2-tailed)	.017	
	N	30	30

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pada Tabel 21 dapat dijelaskan bahwa variabel pendidikan 1 merupakan variabel yang mewakili indikator adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus sebelum PUAP. Sedangkan pendidikan 2 adalah variabel yang mewakili indikator adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus setelah PUAP.

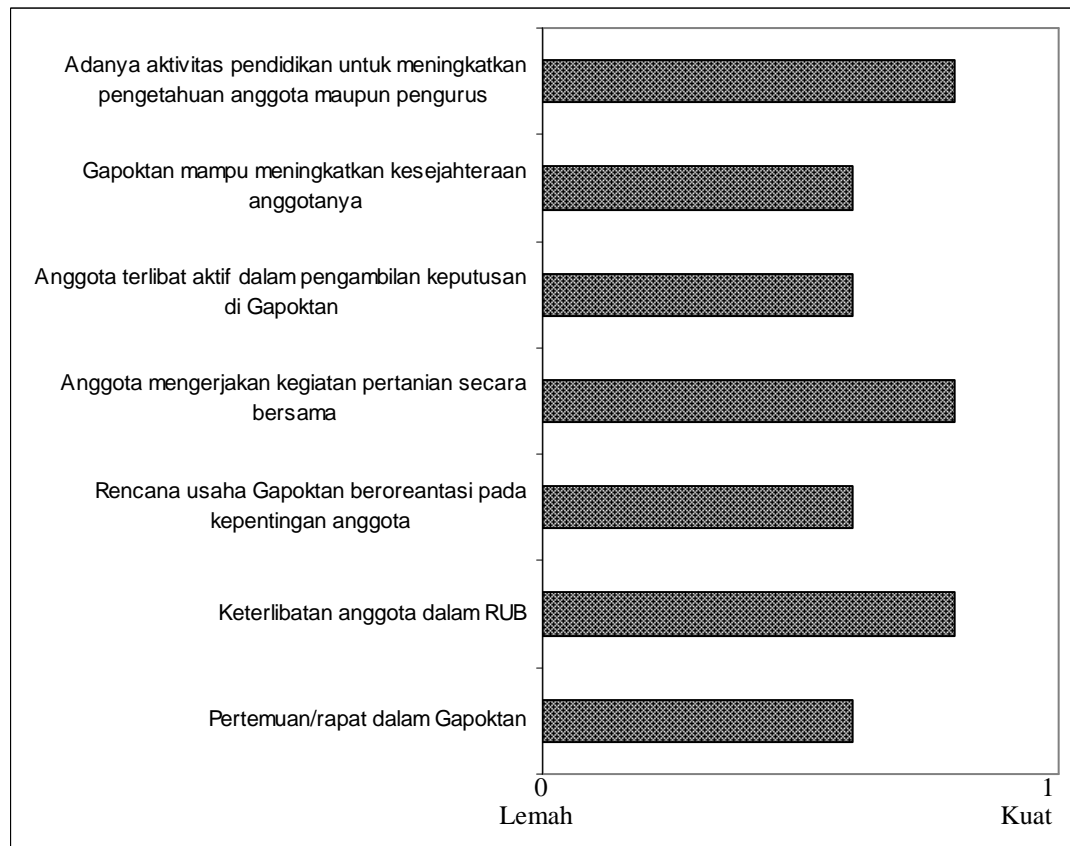
Tanggapan para responden terhadap kinerja Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota berdasarkan indikator adanya aktivitas pendidikan sebelum dan setelah PUAP memiliki hubungan korelasi yang cukup besar. Ini dibuktikan dengan melihat nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa kepercayaan yaitu  $0,017 < 0,05$ . Artinya apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan maka antara variabel satu dengan variabel lainnya memiliki hubungan korelasi.

Selain itu keeratan hubungan korelasi antara variabel satu dengan variabel pasangannya juga dapat dilihat dari besarnya nilai *pearson correlation*. Besarnya nilai *pearson correlation* yaitu 0,431 artinya adalah adanya program PUAP memiliki pengaruh terhadap kinerja Gapoktan dalam melaksanakan aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota Gapoktan.

Berdasarkan hasil pengamatan pada tiga Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota dapat dijelaskan mengenai hubungan indikator kinerja terhadap kinerja organisasi Gapoktan. Kinerja organisasi Gapoktan dapat dilihat dari tujuh indikator yang telah dijelaskan sebelumnya yakni: (1) pertemuan atau rapat dalam Gapoktan; (2) keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama; (3) rencana usaha Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota; (4) anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama; (5) anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di Gapoktan; (6) Gapoktan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; (7) adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus.

Ketujuh indikator tersebut dilihat pengaruhnya terhadap kinerja Gapoktan. Indikator-indikator yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan anggota Gapoktan dapat dikatakan sebagai indikator kinerja Gapoktan yang perlu

diperhatikan bahkan ditingkatkan agar lebih memberikan pengaruh yang berguna bagi anggota Gapoktan khususnya terhadap kinerja para pengurus Gapoktan. Selengkapnya pada Gambar 2 dapat dilihat pengaruh kinerja Gapoktan terhadap pendapatan anggota Gapoktan.



Gambar 2. Hubungan Indikator Kinerja Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa dari ketujuh indikator kinerja tersebut, yang memiliki hubungan terhadap kinerja organisasi Gapoktan hanya tiga indikator, yakni keterlibatan anggota dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB); anggota mengerjakan kegiatan secara bersama-sama dan indikator terakhir adalah adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus maupun anggota Gapoktan.

Pada indikator pertama yakni kegiatan dilakukan secara bersama memiliki hubungan terhadap kinerja Gapoktan sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada saat momen atau kegiatan ushatani terlihat para anggota Gapoktan maupun pengurus

melakukan kegiatan usahatani secara bersama-sama. Selama penelitian, peneliti melihat kegiatan tersebut hanya dilakukan pada pengolahan lahan dan pada saat pemanenan dilakukan. Kegiatan lainnya adalah dalam pengadaan pupuk dan benih, dimana kegiatan pembelian input produksi pertanian dilakukan secara kolektif atau bersama-sama sehingga dapat menghemat biaya transportasi. pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas oleh pengurus maupun anggota Gapoktan.

Dari beberapa kegiatan tersebut yang telah diamati, peneliti menilai aktivitas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama memiliki hubungan yang relatif kuat. Hal tersebut juga terkait pada program PUAP yang baru berjalan sehingga hasil atau *output* yang dihasilkan dari program tersebut masih berkontribusi kecil.

Selanjutnya adalah indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang memiliki hubungan terhadap kinerja Gapoktan. Tingginya keterlibatan anggota Gapoktan dalam penyusunan RUB dikarenakan sebelum RUB disusun, terlebih dahulu para anggota Gapoktan menyusun Rencana Usaha Anggota (RUA). Penyusunan RUA oleh anggota Gapoktan bertujuan untuk menentukan dan menilai kemampuan serta kesungguhan para petani dalam berusahatani. RUA berisikan jenis usahatani yang akan dijalankan dan jumlah kebutuhan dana yang diperlukan. Melalui RUA nantinya akan diseleksi kembali yang kemudian hasil seleksi tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Apabila RUK telah siap disusun, maka RUK tersebut berisikan berbagai macam RUA yang telah dibuat oleh masing-masing anggota Gapoktan. RUK yang telah siap, kemudian digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan suatu Rencana Usaha Bersama (RUB).

Terlibatnya anggota Gapoktan dalam penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) memiliki hubungan positif terhadap kinerja organisasi Gapoktan. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada partisipasi anggota dalam menyusun Rencana Usaha Anggota (RUA). Para petani diberikan semacam petunjuk teknik atau panduan

guna dijadikan sebagai bahan pedoman dalam berusahatani padi. Adanya RUA maupun RUB setelah adanya program PUAP sedikit demi sedikit dijadikan oleh para anggota Gapoktan sebagai pedoman untuk berusahatani padi. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut membantu para petani dalam mengaur dan memanfaatkan modal usahatannya. Oleh sebab itu, baik RUA maupun RUB yang dijadikan pedoman oleh para anggota Gapoktan memiliki hubungan yang relatif kuat terhadap kinerja Gapoktan di dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota.

Terakhir adalah indikator kinerja yang juga memiliki hubungan terhadap kinerja Gapoktan yakni, adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus maupun anggota Gapoktan. Aktivitas pendidikan yang dimaksud adalah adanya penyuluhan yang diberikan oleh petugas penyuluh pertanian lapangan kepada pengurus maupun anggota Gapoktan. Petugas penyuluh pertanian memberikan pembinaan mengenai prosedur yang dianjurkan dalam usahatani padi. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti mengamati bahwa pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh lebih difokuskan bagaimana mengarahkan para petani (anggota Gapoktan) agar dapat menggunakan dosis pupuk dan obat-obatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dinas pertanian setempat. Pembinaan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mencapai hasil produksi padi yang tinggi sehingga para petani mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri.

Wujud nyata dari kinerja Gapoktan yang bekerja sama dengan penyuluh pertanian dapat dilihat dari adanya perubahan jumlah produksi padi yang berubah, dimana sebelum adanya program PUAP para petani (anggota Gapoktan) sebagian besar menggunakan pupuk dan pestisida diluar anjuran yang ditetapkan atau berlebihan. Namun setelah adanya program PUAP jumlah produksi padi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Besarnya perubahan peningkatan jumlah gabah dan pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dari ketujuh indikator kinerja, hanya terdapat tiga indikator kinerja yang memiliki hubungan terhadap perubahan kinerja organisasi Gapoktan baik sebelum maupun setelah adanya program PUAP. Ketiga indikator tersebut antara lain: indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama; indikator anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama; dan indikator adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus.

## **6.2.2 Kinerja Organisasi Gapoktan dalam Menyalurkan BLM-PUAP**

Keberhasilan pelaksanaan program PUAP ditentukan salah satunya oleh keberhasilan penyaluran dana bantuan tersebut. Berdasarkan kriteria pihak penyalur yakni Gapoktan dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka untuk menilai keefektifan penyaluran bantuan PUAP digunakan beberapa tolok ukur meliputi : 1) target dan reliasi; 2) jangkauan pinjaman; 3) frekuensi pinjaman; dan 4) persentase tunggakan.

### **6.2.2.1 Efektivitas Penyaluran BLM-PUAP Berdasarkan Kriteria Pihak Penyalur**

#### **6.2.2.1.1 Target dan Realiasi Pinjaman PUAP**

Pelaksanaan penyaluran dana PUAP yang pemanfaatannya sebagian besar untuk kegiatan simpan pinjam telah dimulai tahun 2008. Pada saat penelitian dilakukan, masing-masing Gapoktan di tiap desa telah menyalurkan dana dalam bentuk simpan pinjam kepada anggotanya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

**Tabel 22.** Target dan Realisasi Dana BLM-PUAP di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulang dan Desa Tungkal IV Desa Tahun 2008

<b>Nama Gapoktan</b>	<b>Desa</b>	<b>Dana PUAP (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Hasil Berkah	Pembengis	100.000.000	88.300.000
Cahaya Murni	Tanjung Senjulang	100.000.000	50.000.000
Berkah Hasil Berdua	Tungkal IV Desa	100.000.000	50.000.000

Sumber : Data Primer, diolah



Berdasarkan Tabel 22 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah dana alokasi BLM-PUAP bernilai Rp 100 juta, namun jumlah nominal yang disalurkan oleh masing-masing Gapoktan berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut lebih disebabkan faktor teknis dan kebijakan dari masing-masing Gapoktan. Faktor teknis lebih mengarah pada bidang administrasi. Administrasi yang dimaksud adalah jaminan yang dimiliki oleh para petani seperti surat tanah (sporadik) yang telah rusak dan perlu diperbaiki. Selain itu sebagian petani juga terhambat dalam menyusun Rencana Usaha Anggota (RUA), sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan petani sedikit terlambat dalam menerima bantuan PUAP. Selanjutnya adalah faktor dari kebijakan Gapoktan dalam merealisasikan pinjaman yang hanya 50 persen dari alokasi dana yang tersedia dikarenakan pengurus Gapoktan bersama dengan PPL dan PMT ingin melihat terlebih dahulu perkembangan tahap awal dari kegiatan simpan pinjam apakah dapat berjalan lancar atau sebaliknya. Mereka akan menilai kedisiplinan dan komitmen dari para anggotanya dalam mengembalikan pinjaman dana PUAP.

Apabila pengembalian dana PUAP telah berjalan lancar sesuai waktu yang disepakati, maka pengurus Gapoktan akan menyalurkan pinjaman PUAP tahap kedua kepada anggotanya. Besar kecilnya jumlah nominal pinjaman akan disesuaikan terhadap kemampuan petani dan berdasarkan RUA yang dibuat oleh petani atau anggota Gapoktan PUAP.

Permohonan pinjaman dana PUAP tertuang dalam RUK (Rencana Usaha Kelompok). RUK yang telah dibuat, oleh petani akan diajukan kepada pengurus Gapoktan yang juga dibantu oleh PPL pendamping. Pemrosesan RUK meliputi kelengkapan administratif dan teknis. Menurut pengurus Gapoktan sebagai pihak penyalur, hal-hal yang menyebabkan RUK tersebut perlu diperbaiki kembali seperti ketidaksesuaian tanda tangan, nama anggota yang tidak sesuai, pergantian luas lahan, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat menghambat realisasi pinjaman. Namun ketidaksesuaian tersebut bukan berarti membuat RUK yang diajukan tidak direalisasikan, hanya saja pelaksanaan pencairan dan pinjaman mengalami sedikit keterlambatan.

### 6.2.2.1.2 Jangkauan Realiasi Pinjaman PUAP

Evaluasi penyaluran pinjaman BLM-PUAP selanjutnya adalah menilai pelayanan Gapoktan dalam merealisasikan kegiatan simpan pinjam. Selain itu, dinilai juga sejauh mana jangkauan pelayanan simpan pinjam mampu menyentuh kebutuhan para petani dalam menjalankan usahatani.

Sasaran BLM-PUAP ditujukan kepada Gapoktan di tiap desa. Harapannya adalah agar Gapoktan memiliki kemampuan mengelola dana tersebut dalam mengembangkan kegiatan pertanian yang pada akhirnya mampu mengembangkan kegiatan agribisnis berkelanjutan. Dana PUAP tersebut akan disalurkan pada anggota Gapoktan masing-masing guna menambah modal usaha baik tanaman pertanian (pangan), peternakan maupun pengadaan sarana produksi pertanian. Berikut tabel realisasi penerima PUAP berdasarkan Gapoktan di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa.

**Tabel 23.** Realisasi Penerima PUAP di Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Desa Tungkal IV Desa Tahun 2008

No	Desa	Gapoktan	Jumlah Anggota Penerima PUAP
1	Pembengis	Hasil Berkah	118
2	Tanjung Senjulung	Cahaya Murni	39
3	Tungkal IV Desa	Rezki Usaha Berdua	95
	Total		252

Sumber : Data Primer, diolah

Dari Tabel 23 di atas dapat diinformasikan bahwa jumlah jangkauan penyaluran di tiga desa masih relatif sedikit. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan dari pengurus Gapoktan untuk menyalurkan sebagian dana BLM-PUAP atau sekitar 50 persennya, sehingga jumlah penerima atau peminjam dana PUAP juga masih relatif kecil. Jumlah peminjam akan meningkat apabila penyaluran tahap ke dua nanti akan dilaksanakan. Tentunya pihak pengurus Gapoktan di tiap desa akan merealisasikan dana pinjaman kepada anggota (petani) sesuai dengan jenis usaha yang benar-benar diminati dan telah berpengalaman. Hal ini dilakukan

dengan harapan petani tersebut mampu mengembalikan kredit sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

#### **6.2.2.1.3 Frekuensi Peminjaman**

Keberhasilan penyaluran pinjaman oleh Gapoktan kepada anggotanya dapat dilihat dari frekuensi atau banyaknya transaksi pinjaman. Penyaluran pinjaman BLM-PUAP di tiga desa selama tahun 2008 ini hanya dilakukan satu kali saja, artinya tidak ada frekuensi pinjaman. Pinjaman disalurkan hanya sekali yakni ketika usulan RUK (Rencana Usaha Kerja) disetujui.

Frekuensi yang dilakukan hanya satu kali tentunya belum dapat dikatakan efektif, karena dengan hanya satu kali peminjaman nantinya perputaran dana menjadi lamban sehingga dapat menghambat untuk perencanaan kedepannya lagi. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program PUAP dan evaluasi bagi para pengurus Gapoktan.

#### **6.2.2.1.4 Persentase Tunggakan**

Tunggakan pengembalian pinjaman merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penyaluran pinjaman. Apabila tingkat realisasi pinjaman tercapai, frekuensi peminjam meningkat dan jangkauan kredit meluas, namun persentase tunggakan meningkat maka akan mempengaruhi keberhasilan dari program simpan pinjam tersebut.

Penyaluran BLM-PUAP melalui Gapoktan di masing-masing desa akan memudahkan penyalurannya sampai ke tangan para anggotanya. Proses pelunasan pinjaman oleh petani sebagai anggota Gapoktan penerima PUAP dilakukan dengan cara pengangsuran secara bulanan dengan sistem penetapan bunga tetap. Besarnya bunga yang ditetapkan oleh pengurus Gapoktan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) masing-masing Gapoktan. Berikut Tabel 24 mengenai besarnya bunga pinjaman di masing-masing Gapoktan PUAP.

**Tabel 24.** Tingkat Bunga Pinjaman pada Gapoktan Penyalur PUAP

<b>Nama Gapoktan</b>	<b>Desa</b>	<b>Tingkat Bunga (%)</b>	<b>Jangka Waktu (Bulan)</b>
Hasil Berkah	Pembengis	5	6
Cahaya Murni	Tanjung Senjulang	0.5	6
Rizki Usaha Berdua	Tungkal IV Desa	1	4

Sumber : ADRT Gapoktan, diolah

Pada Tabel 24 dapat dijelaskan bahwa penentuan besarnya tingkat bunga pada masing-masing Gapoktan PUAP, selain didasarkan pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) Gapoktan juga didasarkan pada kemampuan para petani anggota. Dengan adanya penetapan bunga yang relatif rendah maka para petani termotivasi untuk meminjam dana PUAP sebagai modal tambahan usahanya.

Agar pengembalian pinjaman dapat berjalan lancar, pengurus dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) melakukan suatu fungsi kontrol. Selain kontrol sebelum peminjaman meliputi persyaratan pinjaman, juga dilakukan kontrol pada waktu proses pengembalian pinjaman tersebut. Pengontrolan pada saat pengembalian pinjaman oleh petani dilakukan dengan mengadakan pertemuan akhir bulan guna membahas beragam dinamika masalah pertanian di lapangan serta sekaligus mengumpulkan dana angsuran pinjaman oleh petani yang meminjam.

Selama waktu penelitian, peneliti melihat belum terjadi penunggakan pengembalian pinjaman. Setiap bulan para petani yang memperoleh pinjaman PUAP menyetorkan uang pinjaman beserta bunga pinjamannya kepada pengurus Gapoktan di masing-masing desa. Selain menyetor angsuran, para anggota Gapoktan juga menyetorkan iuran sebesar Rp 10.000 per bulan. Iuran tersebut dinamakan sebagai simpanan wajib. Adanya kelancaran pengembalian angsuran pinjaman menunjukkan bahwa penyaluran dana BLM-PUAP dapat dikatakan efektif.

### **6.2.2.2 Efektivitas Penyaluran BLM-PUAP Menurut Pengguna (Petani)**

Petani pemilik, petani penggarap, rumah tangga tani adalah kelompok sasaran dalam pelaksanaan program PUAP. BLM PUAP merupakan program bantuan yang diberikan kepada mereka melalui Gapoktan dengan tujuan agar pendapatan mereka dapat meningkat. Penyaluran BLM-PUAP bagi para petani harus mengutamakan pelayanan yang baik. Pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana bantuan tersebut dapat menjangkau para petani yang membutuhkan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola pelayanan penyaluran BLM-PUAP yang diinginkan oleh kelompok sasaran tersebut sehingga penyaluran BLM-PUAP efektif menurut petani pengguna.

Efektivitas penyaluran BLM-PUAP dari sisi pengguna (petani) dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut yaitu persyaratan awal, prosedur realisasi pinjaman, tingkat bunga, biaya administrasi, pelayanan dan jarak atau lokasi.

#### **6.2.2.2.1 Persyaratan Awal**

Pengajuan permohonan pinjaman oleh petani dapat diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Adapun secara umum persyaratan tersebut adalah calon peminjam benar-benar merupakan petani, petani penggarap atau rumah tangga tani yang tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan aktif di desanya. Selain itu, calon peminjam yang akan mengajukan permohonan pinjaman harus melengkapi beberapa ketentuan administratif antara lain: foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan photo ukuran 2X3 sebanyak dua lembar; menandatangani surat perjanjian di atas materai, menandatangani kwitansi diatas materai; menyertakan jaminan berupa surat-surat berharga (sertifikat tanah/bangunan, sporadik atau BPKB) serta mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman. Hasil evaluasi mengenai penyaluran BLM-PUAP berdasarkan penilaian responden terhadap persyaratan awal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 25.

**Tabel 25.** Penilaian Responden Terhadap Persyaratan Awal PUAP

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Mudah	9	30
Sedang	21	70
Sulit	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer, diolah

Tanggapan responden terhadap persyaratan awal yang ditetapkan oleh masing-masing pengurus Gapoktan di tiga desa yakni Desa Pembengis, Desa Tanjung Senjulung dan Tungkal IV desa adalah sebesar 70 persen responden menilai bahwa persyaratan awal yang harus dipenuhi berkategori sedang. Para responden yang menilai persyaratan awal ini sedang dikarenakan pada saat mengajukan permohonan pinjaman terdapat beberapa persyaratan yang cukup sulit mereka penuhi. Persyaratan tersebut adalah jaminan berupa sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebagian petani belum memilikinya. Sementara itu sekitar 30 persen responden menilai persyaratan awal berkategori mudah dikarenakan dari segi biaya terjangkau dan kelengkapan secara administratif dapat dipenuhi oleh mereka.

#### **6.2.2.2.2 Prosedur Pinjaman**

Prosedur pinjaman merupakan tahapan yang harus dilalui mulai dari pertama kali mengajukan suatu pinjaman hingga pada tahap realisasi pinjaman tersebut diperoleh peminjam. Prosedur dalam peminjaman dana PUAP dimulai dari tahap dimana para anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan PUAP harus menyusun Rencana Usaha Anggota (RUA) yang kemudian disusul dengan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK). Dalam penyusunan RUA dan RUK akan dibantu oleh PPL. RUK yang telah disetujui oleh ketua kelompok tani dan PPL selanjutnya disampaikan langsung kepada pengurus Gapoktan.

Rencana Usaha Kelompok (RUK) kemudian akan diproses oleh pengurus Gapoktan. Proses penilaian tersebut meliputi kelengkapan secara administratif. Setelah disetujui oleh pengurus Gapoktan maka ketua kelompok tani diberikan

suatu kewenangan dan kepercayaan untuk menyalurkan dana pinjaman tersebut kepada anggotanya sesuai dengan RUA masing-masing anggota. Berikut hasil penilaian responden terhadap prosedur peminjaman PUAP dapat dilihat pada Tabel 26.

**Tabel 26.** Penilaian Responden Terhadap Prosedur Peminjaman Dana PUAP

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Mudah	12	40
Sedang	18	60
Sulit	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan penilaian responden pada Tabel 26 dapat dijelaskan bahwa prosedur pinjaman seperti di atas dinilai 60 persen berkategori sedang. Kemudian sebesar 40 persen dinilai oleh responden mudah. Penilaian sedang oleh sebagian besar responden terkait dengan sumber daya petani itu sendiri dimana dapat dikatakan masih menjadi hal baru mengenai prosedur pinjaman dana PUAP tersebut. Selain itu, pada saat proses pembuatan RUA (Rencana Usaha Anggota) mereka masih menemukan kesulitan dalam menyusun. Mereka juga menilai proses realisasi pinjaman sedikit memakan waktu yang lama. Namun berbeda dengan sebagian kecil responden yakni sekitar 40 persen menilai prosedur pinjaman dana PUAP berkategori mudah. Artinya mereka mampu menjalani prosedur yang ada.

#### **6.2.2.2.3 Realisasi Pinjaman**

Lama realisasi kredit sejak pengajuan sampai pemberian pinjaman cukup bervariasi. Lama realisasi pinjaman juga tidak ditentukan oleh pengurus Gapoktan, namun semua itu tergantung dari waktu RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang diajukan oleh ketua kelompok tani kepada pengurus Gapoktan hingga akad pinjaman ditandatangani oleh kelompok tani bersama dengan pengurus yang juga diketahui oleh PPL sebagai pendamping. Pada awal

penyaluran BLM-PUAP para anggota yang meminjam dana tersebut ke Gapoktan masing-masing hanya memerlukan waktu dua sampai tiga hari sejak pengajuan sampai pinjaman tersebut cair. Selengkapnya tanggapan dari responden mengenai penyaluran PUAP berdasarkan realisasi pinjaman dapat dilihat pada Tabel 27.

**Tabel 27.** Penilaian Responden Terhadap Realisasi Pinjaman

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cepat	19	63.33
Sedang	11	36.67
Lama	0	0.00
Total	30	100.00

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan Tabel 27 dapat diinformasikan bahwa hasil penilaian responden atas realisasi pinjaman adalah 63.33 persen responden menyatakan cepat, sisanya 36.67 persen menyatakan sedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, cepatnya realisasi pinjaman terkait dengan waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan pinjaman hingga sampai pencairan dana pinjaman rata-rata di masing-masing Gapoktan di tiga desa yang diteliti menghabiskan waktu sebanyak tiga hari. Namun ada juga realisasi pinjaman melebihi waktu normal yakni bisa menyampai lima hingga enam hari. Hal tersebut ditunjukkan dari penilaian sebagian kecil responden yakni sekitar 34 persen yang menilai sedang dalam realisasi pinjaman dikarenakan waktu pencairan pinjaman lebih dari tiga hari.

Penilaian kategori sedang oleh sebagian kecil responden disebabkan oleh faktor administrasi. Secara administrasi para petani ada yang belum memenuhi dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan ada juga petani yang keliru dalam mengisi formulir kelengkapan data pribadi. Hal-hal tersebut bagi pengurus Gapoktan menjadi hal yang perlu diperbaiki demi memudahkan pengurus dalam pendataan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus.



#### 6.2.2.2.4 Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan mencakup materai, foto copy bahan tertentu dan sebagainya. Biaya ini digunakan untuk mengganti biaya-biaya langsung dalam proses peminjaman. Besarnya biaya administrasi ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat di Gapoktan. Dari tiga Gapoktan yang diteliti, Gapoktan tersebut sama-sama menetapkan biaya administrasi sebesar Rp 25.000 per orang. Biaya ini diperoleh langsung pada saat dana pinjaman cair melalui pemotongan oleh pengurus Gapoktan. Penilaian responden terhadap efektivitas penyaluran BLM-PUAP berdasarkan biaya administrasi dapat dilihat pada Tabel 28.

**Tabel 28.** Penilaian Responden Terhadap Biaya Administrasi Pinjaman

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Murah	12	40
Sedang	18	60
Mahal	0	0
Total	30	100

Hasil penilaian responden terhadap efektivitas penyaluran BLM-PUAP berdasarkan biaya administrasi pinjaman yakni sebanyak 60 persen menilai sedang, 40 persen menilai murah. Artinya rata-rata para responden menyadari bahwa biaya administrasi tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya ada untuk kelancaran pelaksanaan pinjaman. Hal lain yang menyebabkan responden menilai sedang adalah biaya administrasi tersebut telah disepakati bersama pada waktu musyawarah, jadi hal tersebut tidak memberatkan para peminjam.

#### 6.2.2.2.5 Tingkat Bunga

Tingkat Bunga adalah bunga nominal dalam persen yang harus dibayar peminjam berdasarkan perjanjiannya dengan yang meminjamkan. Tingkat bunga yang dibebankan kepada petani sebagai peminjam sangat bervariasi tergantung

dari masing-masing kebijakan pengurus Gapoktannya. Besarnya tingkat bunga di desa yang diteliti berkisar antara 0.5%-5%. Bila dibandingkan dengan bunga pinjaman di lembaga keuangan formal maupun non formal lainnya, besarnya tingkat bunga pengguna dana PUAP termasuk relatif ringan. Hal ini sesuai dengan penilaian para responden dimana sebesar 62 persen menilai bunga pinjaman PUAP berkategori rendah (ringan), sisanya 38 persen responden menilai sedang.

Penilaian tingkat bunga yang ringan dikarenakan mereka membandingkan dengan tingkat bunga apabila meminjam dengan rentenir ataupun lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dari hasil wawancara dengan pengurus Gapoktan menyatakan bahwa tingginya jumlah petani yang mengajukan permohonan pinjaman lebih disebabkan bunga pinjaman yang relatif rendah sehingga hal tersebut dinilai tidak memberatkan para petani untuk meminjam kepada Gapoktan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 29.

**Tabel 29.** Penilaian Responden Terhadap Tingkat Bunga Pinjaman

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	20	66.67
Sedang	10	33.33
Tinggi	0	0.00
Total	30	100.00

#### **6.2.2.2.6 Pelayanan**

Pelayanan dalam kegiatan simpan pinjam dimulai dari proses permohonan pinjaman hingga pada pengembalian pinjaman itu sendiri. Dalam hal ini pelayanan yang dinilai meliputi kemampuan pengurus mensosialisasikan dan menjelaskan mengenai program BLM-PUAP serta hal-hal lain yang terkait dengan program tersebut. Berikut tanggapan responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengurus Gapoktan dalam melayani anggotanya yang dapat dilihat pada Tabel 30.

**Tabel 30.** Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Pengurus Gapoktan

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	17	56.67
Sedang	13	43.33
Buruk	0	0.00
Total	30	100.00

Berdasarkan Tabel 30 dapat dijelaskan bahwa penilaian responden atas pelayanan pengurus Gapoktan yaitu sekitar 56.67 persen menilai baik, sisanya 43.33 persen menilai sedang. Penilaian bagusya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengurus Gapoktan dikarenakan para pengurus telah mampu memberikan pelayanan yang baik terutama dalam hal pencairan dana pinjaman dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu para pengurus juga turut membantu petani agar proses peminjaman berjalan dengan lancar dan mudah.

#### **6.2.2.2.7 Jarak/ Lokasi Pelayanan**

Jarak/lokasi pelayanan merupakan jarak jangkauan pelayanan dari sekretariat Gapoktan ke tempat tinggal anggotanya. Lokasi yang mudah dijangkau tentunya akan memberikan keuntungan bagi para peminjam sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk mengurus pinjaman ke Gapoktan. Hasil penilaian responden atas jarak atau lokasi pelayanan terhadap efektivitas penyaluran PUAP dapat dilihat pada Tabel 31.

**Tabel 31.** Penilaian Responden Terhadap Jarak/Lokasi Pelayanan

<b>Kategori Penilaian</b>	<b>Tanggapan Responden (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Dekat	7	23.33
Sedang	23	76.67
Jauh	0	0.00
Total	30	100.00

Sumber: Data primer, diolah

Penilaian responden terhadap jarak atau lokasi pelayanan yaitu 76.67 persen responden menyatakan sedang, sisanya 23.33 persen responden menyatakan dekat. Responden yang menyatakan sedang didasarkan pada kriteria kategori sedang dimana lokasi Gapoktan mudah dijangkau dengan berjalan kaki atau alat transportasi, namun jaraknya cukup jauh untuk sampai pada sekretariat Gapoktan. Sementara responden yang menyatakan dekat didasarkan pada jarak antara sekretariat Gapoktan dengan tempat tinggal mereka dapat dikatakan dekat atau masih dalam kompleks lingkungan sekretariat Gapoktan.

Berdasarkan penilaian dan tanggapan responden terhadap semua tolok ukur di atas, dapat disusun skor penilaian dan tanggapan untuk menentukan apakah pelayanan dan penyaluran BLM-PUAP dari masing-masing Gapoktan di tiga desa PUAP tergolong efektif atau tidak. Hasil penilaian responden terhadap tolok ukur efektivitas penyaluran BLM-PUAP dalam bentuk simpan pinjam dapat dilihat pada Tabel 32.

**Tabel 32.** Hasil Perhitungan Skor Penilaian Responden Terhadap Efektivitas Penyaluran BLM-PUAP Tahun 2008

No.	Tolok Ukur Efektivitas	Total Skor Efektivitas	Skor Maksimum	Persentase (%)
1	Persyaratan Awal	69	90	76.67
2	Prosedur Peminjaman	72	90	80.00
3	Realisasi Pinjaman	79	90	87.78
4	Biaya Administrasi	72	90	80.00
5	Bunga	80	90	88.89
6	Pelayanan	77	90	85.56
7	Jarak	67	90	74.44
	<b>Total</b>	<b>516</b>	<b>630</b>	
	<b>Kategori</b>	<b>Efektif</b>		

Berdasarkan Tabel 32 dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan semua skor tolok ukur diperoleh skor sebesar 516 dari total skor maksimum sebesar 630. Angka ini menunjukkan bahwa pelayanan dan penyaluran BLM-PUAP yang dibuat dalam format simpan pinjam oleh pengurus Gapoktan menurut pengguna dinilai efektif. Penilaian efektif didasarkan selang kriteria yang telah dibahas pada

BAB IV dimana efektif jika total skor berada pada selang 491-630, cukup efektif berada pada selang 351-490 dan tidak efektif apabila skor total berada pada selang 210-350.

Tolok ukur efektivitas penyaluran BLM-PUAP yang berkontribusi besar dinilai dari total skor antara lain tingkat bunga pinjaman, realisasi pinjaman, pelayanan dan prosedur peminjaman. Sementara itu tolok ukur yang mendapat penilaian kurang baik dari para responden adalah persyaratan awal. Hal tersebut dapat dilihat dari total skor atau persentase yang cukup rendah dibanding tolok ukur lainnya. Hasil wawancara dengan para responden penerima BLM-PUAP, diketahui bahwa hambatan persyaratan awal peminjaman memang banyak yang mengalaminya, terutama pada saat melengkapi persyaratan data diri dan pengisian data kepemilikan luas tanah beserta penyerahan bukti sertifikasi tanah atau sporadik tanah serta penyerahan Kartu Tanda Penduduk.

Pengisian biodata diri terkadang masih banyak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan tingakat pendidikan para petani yang rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), sehingga dalam pengisian biodata diri ada yang kurang paham dan bingung. Sementara itu, mengenai bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah atau sporadik kebanyakan para petani tidak memilikinya, walaupun masih memegang sporadik kebanyakan kondisinya sudah kurang baik dan kurang jelas untuk dibaca. Hambatan lainnya adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Para petani di tiga desa penelitian kebanyakan belum memiliki KTP. Alasan mereka tidak memiliki KTP adalah bukan karena tidak mau mengurus tetapi biaya untuk mengurus KTP tersebut cukup tinggi (biaya transportasi) dan prosedurnya cukup berbelit. Berbagai kendala yang telah dijelaskan mengarah pada penilaian dari para responden bahwa persyaratan awal tentunya menjadi bahan masukan untuk pengurus Gapoktan agar dapat memperbaiki kondisi tersebut kedepannya.

### **6.3 Dampak PUAP Dilihat Dari Pendapatan Anggota Gapoktan**

#### **6.3.1 Pemanfaatan Dana BLM-PUAP**

Suatu program akan menjadi sarana yang baik apabila dilakukan dengan tepat, baik tepat waktu, tepat sasaran, tepat perencanaan maupun tepat prosedur. Hal tersebut senada dengan program PUAP sendiri yang mengedepankan pelaksanaan yang efektif. Efektif dalam arti diberikan pada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pemanfaatannya pun tepat. Apabila pemberian dana tersebut tidak tepat pada sarasannya maka akan berdampak negatif bagi keberlanjutan program tersebut. Selain dinilai dari ketepatan dalam sasaran, pelaksanaan program PUAP juga dinilai dari ketepatan pemanfaatan dana tersebut.

Anggota Gapoktan memperoleh pinjaman PUAP dalam jumlah yang relatif sama dengan yang diajukan dalam RUK atau RUA. Selanjutnya pemanfaatan pinjaman tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing anggota selaku peminjam. Berdasarkan pengamatan, para petani yang memperoleh pinjaman sebagian besar memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal usahatani. Sekitar 100 persen responden menyatakan dana pinjaman sepenuhnya digunakan untuk menambah modal usaha seperti membeli pupuk, obat-obatan dan biaya transportasi. Mereka tidak membeli bibit padi karena sudah ada program bantuan dari dinas pertanian kabupaten.

Menurut para responden yang telah diwawancarai, dengan adanya BLM PUAP mempermudah kami untuk membeli sarana produksi (saprodi) agar ketepatan waktu dalam memberikan pupuk, obat-obatan dan sebagainya dapat terlaksana dengan baik sehingga hasil akhir yang diperoleh pada saat panen ialah dapat meningkat baik kualitas maupun kuantitas produksi padi tersebut.

Peningkatan hasil produksi padi tentunya mendatangkan keuntungan, minimal para petani tidak lagi membeli beras ke pasar karena tersedia stok beras yang cukup, maksimalnya adalah pendapatan mereka dapat meningkat sehingga pada akhirnya diharapkan kesejahteraan mereka pun meningkat.

### **6.3.2 Analisis Usahatani Padi Sebelum dan Setelah Adanya Program PUAP**

Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi usahatani padi dikategorikan ke dalam biaya-biaya. Biaya dalam usahatani dibedakan menjadi dua diantaranya adalah biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai merupakan pengeluaran secara tunai yang dikeluarkan guna untuk pembelian barang dan jasa usahatani. Sedangkan biaya yang diperhitungkan adalah pengeluaran yang secara tidak tunai dikeluarkan oleh petani.

Biaya yang tergolong biaya tunai meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pupuk, pestisida, benih, iuran irigasi dan biaya untuk membayar tenaga kerja luar keluarga (TKLK). Sedangkan yang termasuk biaya diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dan biaya penyusutan alat pertanian. Berikut penjelasan secara umum mengenai penggunaan faktor produksi (input) dalam usahatani padi pada tiga Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota sebelum dan setelah adanya program PUAP.

#### **6.3.2.1 Penggunaan Input**

##### **6.3.2.1.1 Benih**

Petani pada tiga Gapoktan rata-rata menggunakan benih varietas Ciherang, namun ada sebagian kecil yang tetap menggunakan benih varietas lokal. Benih tersebut diperoleh dengan harga sebesar Rp 5000,00 per kilogramnya. Para petani menggunakan varietas Ciherang dengan pertimbangan bahwa varietas tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dari varietas lain, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta rasa nasi yang dihasilkan pun enak (pulen).

Sebelum adanya program PUAP rata-rata petani responden di tiga Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota menggunakan benih sekitar 36 kilogram untuk luas lahan 1 hektar, sehingga biaya benih yang dikeluarkan sebesar Rp 180.000,00. Sementara itu ketika program PUAP telah dijalankan, rata-rata petani responden yang memperoleh dana BLM-PUAP menggunakan benih sebanyak 43,33 kilogram per hektar dengan biaya pengeluaran sebesar

Rp216.667,00. Selengkapnya perubahan rata-rata penggunaan benih sebelum dan setelah adanya PUAP dapat dilihat pada Tabel 33.

**Tabel 33.** Rata-Rata Penggunaan Benih Padi Para Petani Responden Sebelum dan Setelah Adanya PUAP

Luas Lahan (Ha)	Satuan	Sebelum PUAP	Setelah PUAP	Perubahan (%)
1	Kg	36	43,33	20,36

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 26 dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan yang cukup besar dari penggunaan benih padi oleh petani responden sebelum dan setelah adanya program PUAP. Rata-rata persentase perubahan penggunaan benih padi meningkat sebesar 19,03 persen untuk luas lahan di bawah 0,5 hektar dan 13,66 persen untuk luas lahan di atas 0,5 hektar. Terjadinya peningkatan penggunaan benih oleh petani responden dikarenakan petani responden tersebut memperoleh tambahan dari dana BLM-PUAP yang diperoleh dari Gapoktan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden diperoleh informasi bahwa dengan adanya BLM-PUAP, rata-rata mereka memanfaatkannya untuk menambah modal usaha, salah satunya adalah pengalokasian untuk meningkatkan produksi padi melalui penambahan jumlah penggunaan benih padi.

#### **6.3.2.1.2 Pupuk**

Pada usahatani padi di Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang kota, rata-rata jenis pupuk yang digunakan antara lain Urea, SP-36, KCL dan TSP. Kegiatan pemupukan dilakukan dua sampai tiga kali dalam satu musim tanam. Rata-rata penggunaan pupuk oleh petani responden di tiga Gapoktan sebelum dan setelah adanya program PUAP disajikan pada Tabel 34. Pada Tabel 34 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah penggunaan pupuk oleh petani responden sebelum adanya PUAP untuk luas lahan 1 hektar yakni sebanyak 328 kilogram Urea, 114 kilogram SP-36, 80 kilogram KCL dan 91 kilogram ZA dengan total biaya pengeluaran untuk pembelian pupuk sebesar Rp 778.597,00.



Setelah adanya program PUAP rata-rata penggunaan pupuk oleh petani responden di tiga Gapoktan yang diteliti yakni masing-masing sebanyak 155,94 kilogram Urea, 106 kilogram SP-36, 69,43 kilogram KCL dan 68,82 kilogram ZA untuk luas lahan 1 hektar. Total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan ke empat jenis pupuk tersebut sebesar Rp 520.903,00.

**Tabel 34.** Rata-Rata Jumlah Penggunaan Pupuk per Hektar Oleh Petani Responden Sebelum dan Setelah Adanya PUAP

<b>Jenis Pupuk</b>	<b>Satuan</b>	<b>Sebelum PUAP</b>	<b>Setelah PUAP</b>	<b>Perubahan (%)</b>
Urea	Kg	328	155,94	-52,46
SP-36	Kg	114	106	-7,02
KCL	Kg	80	69,43	-13,21
ZA	Kg	91	68,82	-24,37

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 34 dapat dijelaskan bahwa penggunaan pupuk oleh petani responden mengalami perubahan penurunan yang bervariasi. Penurunan jumlah pupuk yang digunakan disebabkan oleh adanya penggunaan pupuk yang berlebihan oleh petani responden sebelum adanya program PUAP. Namun setelah adanya program PUAP penggunaan pupuk oleh petani responden mengalami penurunan. Besarnya persentase penurunan penggunaan keempat jenis pupuk pada luas lahan 1 hektar masing-masing sebesar 52,46 persen untuk pupuk Urea, 7,02 persen untuk pupuk SP-36, 13,21 persen untuk pupuk KCL dan 24,37 persen untuk pupuk ZA.

Hasil wawancara dengan beberapa petani responden diperoleh informasi bahwa para petani responden menggunakan dosis pupuk yang berlebihan karena mereka menganggap bahwa dengan memberikan pupuk yang banyak akan menyuburkan tanaman padi. Selain itu para petani responden juga beranggapan bahwa teknik pemupukan yang mereka lakukan sudah benar. Sebenarnya pengaturan penggunaan dosis pupuk sudah disosialisasikan oleh petugas penyuluh

pertanian lapangan (PPL) yang bertugas di masing-masing desa sebelum adanya program PUAP, namun kebanyakan para petani di sana belum melaksanakan dengan benar apa yang telah dianjurkan oleh PPL tersebut. Berikut perbandingan penggunaan pupuk oleh petani dengan anjuran PPL dapat dilihat pada Tabel 35.

**Tabel 35.** Perbandingan Penggunaan Pupuk per Hektar di Desa Pembengis, Tanjung Senjulang dan Desa Tungkal IV Desa

<b>Pupuk</b>	<b>Penggunaan Rata-Rata Sebelum PUAP</b>	<b>Anjuran Dinas Pertanian</b>	<b>Selisih (Kg)</b>	<b>Harga/Kg (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Urea (Kg)	328	150	(+) 178	1.500	267.000
SP-36 (Kg)	114	100	(+) 14	1.550	21.700
KCL (Kg)	80	100	(-) 20	1.400	28.000
Za (Kg)	91	100	(-) 9	1.050	9.450

Keterangan : (+) = Penggunaan pupuk berlebih  
 (-) = Penggunaan pupuk kurang

Pada Tabel 35 dapat dijelaskan bahwa masih terdapat penggunaan pupuk yang melebihi dosis yang dianjurkan oleh petugas (dinas pertanian setempat). Apabila para petani mau mengikuti anjuran dari dinas pertanian, maka para petani bisa menghemat biaya pengeluaran untuk pupuk jenis Urea dan SP-36 masing-masing memiliki nilai hemat sebesar Rp 267.000,00 dan Rp 21.700,00.

Adanya program PUAP ini tidak serta merta dapat merubah secara langsung kebiasaan mereka dalam menggunakan pupuk. Para PPL yang bertugas di masing-masing desa penerima PUAP memanfaatkan kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh Gapoktan di tiga desa PUAP yang diteliti. PPL tersebut memberikan sosialisasi dengan membawakan surat dari dinas pertanian kabupaten mengenai anjuran dosis pupuk tanaman pangan (padi). PPL tersebut menjelaskan secara jelas mengenai anjuran pemakaian dosis pupuk kepada anggota Gapoktan yang datang pada saat pertemuan tersebut.

Selain itu PPL tersebut juga memberikan semacam simulasi mengenai penggunaan dosis pupuk dengan memberikan data-data perbandingan hasil

produksi apabila menggunakan pupuk yang berlebihan dibandingkan terhadap hasil produksi apabila menggunakan dosis pupuk yang dianjurkan. Dengan cara seperti itu setidaknya telah memberikan pengaruh yang positif dimana setelah mengikuti ajuran tersebut, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat dikurangi. Namun dari hasil wawancara dengan salah seorang PPL di tempat penelitian menyatakan bahwa masih terdapat sebagian kecil petani yang menggunakan pupuk melebihi dari anjuran yang telah ditentukan.

### 6.3.2.1.3 Pestisida

Pengendalian hama dan penyakit tanaman adalah salah satu bentuk komponen teknologi yang berguna untuk mengurangi risiko gagal panen. Penggunaan pestisida untuk memberantas hama dan penyakit merupakan salah satu cara yang secara umum digunakan oleh kebanyakan petani, tidak terkecuali petani responden anggota Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota.

Beberapa jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi diantaranya adalah tikus, wereng coklat dan lain sebagainya. Petani responden menggunakan pestisida untuk menangani masalah hama dan penyakit tersebut. Pembasmian hama dan penyakit biasanya dilakukan sebanyak dua kali atau tergantung dari datangnya serangan hama dan penyakit. Jenis pestisida yang digunakan berupa pestisida padat dan cair. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pestisida tersebut sebesar Rp 48.357,00 untuk luas lahan di bawah 0,5 hektar dan sebesar Rp 104.222,00 untuk luas lahan di atas 0,5 hektar. Selengkapnya rata-rata penggunaan pestisida pada petani responden sebelum dan setelah PUAP disajikan pada Tabel 35.

**Tabel 35.** Rata-Rata Penggunaan Pestisida Petani Responden Sebelum dan Setelah PUAP di Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota

<b>Pestisida</b>	<b>Sebelum PUAP (Kg)</b>	<b>Setelah PUAP (Kg)</b>	<b>Perubahan (%)</b>
Pestisida Padat	2	2,47	23,5
Insektisida	1.085	1.071	-1,29
Herbisida	1.085	1.063	-2,03

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan Tabel 35 diketahui bahwa rata-rata penggunaan pestisida petani responden dari sebelum adanya program PUAP sampai pada terlaksananya program PUAP mengalami penurunan yang beragam. Penggunaan insektisida dan herbisida untuk luas lahan 1 hektar masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dan 2,03 persen. Sementara itu pengecualian terjadi pada penggunaan pestisida padat dimana sebelum dan setelah adanya program PUAP terjadi peningkatan dalam jumlah pemakaian pestisida padat sebesar 23,5 persen.

### 6.3.2.2 Alat-Alat Pertanian

Jenis alat-alat pertanian yang umumnya digunakan dalam kegiatan usahatani padi di tiga Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang antara lain cangkul, sabit, parang, arit dan semprotan. Rata-rata jumlah alat pertanian yang dimiliki petani responden adalah sebanyak satu sampai dua buah. Nilai penggunaan dari masing-masing alat pertanian yang digunakan disajikan pada Tabel 36.

**Tabel 36.** Rata-Rata Nilai Penggunaan Peralatan Pada Usahatani Padi di Tiga Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Yang Dimiliki	Harga/Satuan (Rp)	Nilai Ekonomis (Rp)
1	Cangkul	1	58.333,33	58.333
2	Sabit	2	21.167,00	42.334
3	Parang	2	52.000,00	104.000
4	Arit	2	3.000,00	6.000
5	Semprotan	1	200.000,00	200.000
	Jumlah			410.667

Berdasarkan Tabel 36 dapat diinformasikan bahwa nilai penggunaan dari alat-alat pertanian yang digunakan oleh petani responden adalah sebesar Rp 410.667,00. Nilai terbesar dikeluarkan untuk pembelian alat penyemprotan yakni sebesar Rp 200.000,00 per unitnya. Pengeluaran terbesar ke dua adalah pengadaan parang yaitu sebesar Rp 104.000,00. Sedangkan untuk pengeluaran cangkul

sebesar Rp 58.333,00, penggunaan sabit sebesar Rp 42.334,00 dan terakhir adalah pengadaan arit biayanya sebesar Rp 6.000,00.

Para petani yang tergabung dalam anggota Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang umumnya tidak selalu membeli alat pertanian setiap musim tanam. Pertimbangannya adalah alat-alat pertanian tersebut masih layak dan dapat dimanfaatkan beberapa kali sampai sudah tidak layak digunakan lagi, sehingga yang diperhitungkan dalam analisis pendapatan hanya nilai penyusutan dari penggunaan alat-alat pertanian tersebut. Nilai penyusutan dari peralatan yang digunakan oleh petani responden dapat dilihat pada Tabel 37. Perhitungan nilai penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dimana formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Penyusu tan} = \frac{\text{Nilai Ekonomis}}{\text{Umur Ekonomis} \times \text{Jumlah musim dalam satu tahun}} \times \text{Jumlah unit}$$

**Tabel 37.** Nilai Penyusutan Peralatan Pada Usahatani Petani Responden Anggota Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota

No.	Jenis Peralatan	Nilai Ekonomis (Rp)	Umur Ekonomis (Tahun)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Cangkul	58.333	4	7.290
2	Sabit	42.334	3	6.053
3	Parang	104.000	5	10.000
4	Arit	6.000	2	1.500
5	Semprotan	200.000	5	20.000
	<b>Jumlah</b>			<b>44.743</b>

Peralatan petani responden pada umumnya memiliki umur ekonomis satu sampai enam tahun dan jumlah musim dalam satu tahun sebanyak dua kali. Berdasarkan Tabel 37 diketahui bahwa nilai penyusutan peralatan pertanian yang digunakan oleh petani responden yakni sebesar Rp 44.743,00 per musim tanam, terdiri dari nilai penyusutan cangkul sebesar Rp 7.292,00; nilai penyusutan sabit sebesar Rp 6.053,00; nilai penyusutan parang sebesar Rp 10.000,00; nilai

penyusutan arit sebesar Rp 1.500,00; dan terakhir adalah nilai penyusutan semprotan sebesar Rp 20.000,00.

Besarnya nilai penyusutan alat-alat pertanian sebelum dan setelah adanya program PUAP tidak mengalami perubahan. Alat-alat pertanian tersebut memang sudah ada ketika para petani memulai usahatani. Namun biaya pengeluaran akan kembali dipergunakan apabila alat-alat pertanian sudah tidak layak pakai lagi dan harus digantikan dengan peralatan yang baru.

### 6.3.2.3 Output Usahatani

Output usahatani padi merupakan tolok ukur keberhasilan usahatani padi yang dilihat dari produksi dan penerimaan yang diperoleh petani. Rata-rata produksi padi sebelum dan setelah adanya program PUAP dengan luasan lahan dibawah 0,5 hektar dan luasan lahan lebih dari 0,5 hektar disajikan pada Tabel 38.

**Tabel 38.** Rata-Rata Produksi Usahatani Padi Petani Responden Sebelum dan Setelah Adanya PUAP

<b>Uraian</b>	<b>Sebelum PUAP</b>	<b>Setelah PUAP</b>
Produksi (Kg)	2.282	2.731,22
Harga Jual (Rp/Kg)	3.000	3.000
<b>Penerimaan (Rp)</b>	<b>6.844.667</b>	<b>8.193.667</b>

Perincian penggunaan input yang telah dijelaskan diatas tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh dari hasil usahatani padi. Berdasarkan Tabel 38 diketahui bahwa rata-rata produksi gabah kering panen sebelum adanya PUAP yang diperoleh petani responden dengan luas lahan 1 hektar sebanyak 2.282 kilogram. Harga jual gabah kering panen sebesar Rp 3000,00 per kilogram sehingga total penerimaan dari produksi padi dengan luas lahan 1 hektar sebesar Rp 6.844.667,00.

Setelah adanya program PUAP dapat diketahui jumlah hasil produksi dan penerimaan yang diperoleh petani responden yakni produksi padi dengan luas lahan 1 hektar sebanyak 2.731,22 kilogram dengan total penerimaan sebesar Rp 8.193.667,00.

### **6.3.3 Pendapatan Anggota Gapoktan Sebelum dan Setelah PUAP**

Pendapatan yang digunakan dalam analisis adalah pendapatan usaha rata-rata, yaitu total penerimaan usaha dikurangi dengan total biaya pengeluaran usahatani padi responden. Pendapatan usahatani diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan rata-rata dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan yang jika dijumlahkan menjadi biaya total usahatani. Sedangkan pendapatan tunai usahatani merupakan pengurangan antara penerimaan tunai dengan total biaya tunai.

Penerimaan usahatani adalah nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan usahatani merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi total padi sawah dengan harga jual dari hasil produksi tersebut. Sedangkan biaya usahatani yakni nilai penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam melakukan proses produksi usahatani. Biaya dalam usahatani dibedakan menjadi biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai usahatani merupakan pengeluaran tunai yang dikeluarkan oleh petani untuk pembelian barang dan jasa bagi usahatannya. Sedangkan biaya yang diperhitungkan adalah pengeluaran yang secara tidak tunai dikeluarkan oleh petani. Biaya tunai meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja luar keluarga. Sedangkan yang termasuk dalam biaya yang diperhitungkan meliputi biaya sewa lahan, biaya penyusutan alat pertanian dan biaya upah tenaga kerja dalam keluarga.

Pendapatan usahatani rata-rata sebelum adanya program PUAP dihitung selama periode musim tanam ke II tahun 2007 sebelum responden menerima BLM-PUAP dari masing-masing Gapoktan. Sedangkan pendapatan usahatani rata-rata setelah menerima dana PUAP dihitung dari pendapatan usahatani dalam periode musim tanam pertama tahun 2008. Pendapatan rata-rata diukur dalam satuan rupiah. Berikut disajikan kondisi pendapatan usahatani rata-rata sebelum dan setelah adanya program PUAP pada Tabel 39.

**Tabel 39.** Pendapatan Usahatani Padi Rata-Rata Sebelum dan Setelah PUAP

Uraian	Satuan	Nilai Rata-Rata Sebelum PUAP (Rp)	Nilai Rata-Rata Setelah PUAP (Rp)
<b>A. Penerimaan Usahatani</b>			
A.1 Penerimaan Tunai	Kg	6,844,667	7,411,667
A.2 Penerimaan Diperhitungkan	Kg	782,000	782,000
<b>A.3 Total Penerimaan Usahatani</b>	Kg	<b>7,626,667</b>	<b>8,193,667</b>
<b>B. Biaya Usahatani</b>			
B.1 Biaya Tunai:			
1. Benih	Kg	179,389	216,667
2. Pupuk:			
2.1 Urea	Kg	394,000	187,133
2.2 SP-36	Kg	176,183	164,300
2.3 KCL	Kg	112,467	97,207
2.4 ZA	Kg	95,947	72,263
3. Pestisida:			
3.1 Pestisida Padat	Kg	4,967	4,933
3.2 Herbisida	ml	65,120	64,300
3.3 Insektisida	ml	32,560	31,900
4. Tenaga Kerja Luar Keluarga	HOK	3,007,556	3,010,222
5. Angsuran pinjaman			520,000
<b>Total Biaya Tunai</b>		<b>4,068,188</b>	<b>4,368,926</b>
B.2 Biaya Diperhitungkan:			
1. Tenaga Kerja Dalam Keluarga	HOK	1,735,111	1,735,111
2. Penyusutan Alat	-	44,743	44,743
3. Sewa Lahan		1,000,000	1,000,000
Total Biaya Diperhitungkan	-	<b>2,779,854</b>	<b>2,779,854</b>
<b>C. Total Biaya Usahatani (B1+B2)</b>	-	<b>6,848,042</b>	<b>7,148,780</b>
D. Pendapatan Atas Biaya Tunai (A3-B1)	-	2,776,479	3,042,741
<b>E. Pendapatan Atas Biaya Total (A3-C)</b>	-	<b>778,625</b>	<b>1,044,887</b>
F. Pendapatan Tunai (A1-B1)	-	2,776,479	3,042,741
G. R/C atas Biaya Tunai (A1/B1)	-	1.68	1.70
H. R/C atas Biaya Total (A3/C)	-	1.11	1.15

Sumber : Data primer, diolah



Berdasarkan Tabel 39 dapat dijelaskan bahwa penerimaan tunai anggota Gapoktan diperoleh dari hasil kali antara jumlah produksi padi sawah dengan harga jualnya. Sebelum adanya program PUAP, rata-rata produksi padi sawah anggota Gapoktan (petani padi) per hektar sebanyak 2.282 kilogram dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dengan harga jual Rp 3.000,00 per kilogramnya, sehingga penerimaan tunai yang diperoleh petani anggota Gapoktan adalah sebesar Rp 6,844,667,00. Namun, setelah adanya pelaksanaan program PUAP maka jumlah produksi yang dihasilkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu mejadi sebanyak 2.731,22 kilogram padi dalam bentuk gabah kering panen (GKP), sehingga penerimaan tunai yang diperoleh sebesar Rp 8.193.667,00.

Penerimaan diperhitungkan diperoleh dari hasil kali antara produksi padi yang tidak dijual (dikonsumsi) dengan harga jual. Rata-rata produksi padi sawah per hektar yang tidak dijual oleh keluarga petani sebelum adanya program PUAP maupun setelah adanya PUAP memiliki jumlah yang sama yakni sebanyak 261 kilogram dengan harga jual Rp 3000,00 per kilogram, sehingga penerimaan diperhitungkan yang diterima oleh petani anggota Gapoktan sebesar Rp 782.000,00.

Penerimaan total usahatani terdiri dari penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai (diperhitungkan). Penerimaan tunai yang diperoleh sebelum dan setelah adanya program PUAP masing-masing sebesar Rp 6,844,667,00 per hektar dan Rp 7,411,667,00 per hektar. Sementara itu penerimaan diperhitungkan baik sebelum maupun setelah adanya PUAP sebesar Rp 782.000,00, sehingga total penerimaan usahatani padi yang diperoleh anggota Gapoktan (petani padi) sebelum maupun setelah adanya PUAP masing-masing sebesar Rp 7.626.667,00 dan Rp 8.193.667,00.

Adanya pendapatan sebesar 7,43 persen dikarenakan para petani penerima BLM-PUAP mengalokasikan pinjaman dana tersebut untuk keperluan pembelian sarana produksi pertanian salah satunya adalah pembelian benih unggulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar produktivitas tanaman padi lebih baik lagi sehingga hasil panen yang diperoleh pun juga akan mengalami peningkatan. Walaupun

program PUAP baru berjalan sekitar satu tahun, namun pengaruhnya terhadap *output* padi yang dihasilkan oleh anggota Gapoktan yakni adanya peningkatan jumlah produksi padi yang realtif besar yakni peningkatan sebesar 19,69 persen atau mengalami peningkatan sebanyak 449,22 kilogram padi.

Total biaya usahatani yang dikeluarkan petani di tiga desa (Gapoktan) per musim tanam sebelum dan setelah adanya adanya PUAP masing-masing sebesar Rp 6.848.042,00 dan Rp 7.148.780,00 per hektarnya. Pengeluaran terbesar untuk usahatani padi adalah biaya upah tenaga kerja yakni sebesar Rp 3,007,556,00 HOK per hektar sebelum PUAP dan Rp 3,010,222,00 HOK per hektar setelah adanya PUAP. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi tenaga kerja ini dikarenakan proses pelaksanaan kegiatan usahatani padi mulai dari persiapan lahan hingga pemanenan membutuhkan tenaga kerja dengan curahan waktu kerja yang relatif banyak. Kegiatan tersebut meliputi pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman padi seperti pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama dan penyakit hingga pada pemanenan. Pengeluaran terbesar kedua yang dikeluarkan oleh petani adalah biaya sewa lahan yakni sebesar Rp 1.000.000,00 per hektar. Dikarenakan petani responden merupakan petani pemilik lahan, maka biaya untuk sewa lahan merupakan biaya yang diperhitungkan. Diperlukan peralatan pendukung untuk mendukung produksi padi sawah. Umumnya alat-alat yang sering digunakan oleh petani di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota adalah cangkul, sabit, parang, semprotan dan lain sebagainya. Semua alat-alat pertanian tersebut memiliki nilai penyusutan yakni totalnya sebesar Rp 44.743,00.

Total rata-rata pendapatan usahatani padi petani responden dengan luas lahan 1 hektar sebelum menerima BLM-PUAP berjumlah Rp778.625,00 dan setelah menerima BLM-PUAP total rata-rata pendapatan petani responden mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.044.887,00 dengan persentase perubahan meningkat sebesar 34,20 persen.

Peningkatan pendapatan usahatani padi merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya program PUAP, dengan harapan melalui peningkatan

pendapatan usahatani maka dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Berdasarkan Tabel 39 diketahui bahwa pendapatan rata-rata usahatani padi baik dengan luas lahan 1 hektar maupun mengalami peningkatan sebesar 34,20 persen. Namun persentase tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara nyata pada tingkat pendapatan sebelum dan setelah memanfaatkan dana BLM-PUAP. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji statistik t-hitung untuk data berpasangan.

Berdasarkan hasil pengujian t-hitung terhadap pendapatan usahatani para responden sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP diperoleh nilai t-hitung sebesar  $|-11,61|$ . Nilai t-hitung ini lebih besar dari nilai t-tabel (1,645). Menurut kriteria uji, jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  pada taraf nyata lima persen ( $\alpha = 0,05$ ) maka tolak  $H_0$ . Kesimpulan hasil pengujian diperoleh bahwa ada perbedaan nyata terhadap pendapatan usahatani sebelum dan setelah memperoleh BLM-PUAP. Selain dapat dilihat dari hasil pengujian t-hitung, kesimpulan juga dapat diperoleh dengan melihat nilai signifikansi dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alfa kepercayaan yakni  $0,000 < 0,05$ , maka tolak  $H_0$ . Artinya adalah pendapatan usahatani sebelum dan setelah memperoleh BLM-PUAP berbeda nyata.

Selain mengukur perubahan pendapatan keseluruhan responden petani anggota Gapoktan, dalam penelitian ini juga dilakukan uji statistik t-hitung untuk mengidentifikasi perubahan pendapatan para responden berdasarkan luasan lahan usahatani padi. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 40.

**Tabel 40.** Hasil Pengujian Statistik t-hitung Terhadap Pendapatan Usahatani Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan (Ha)	t-hitung	t-tabel	Kesimpulan
1	$ -11,61 $	1,645	Berbeda nyata (Tolak $H_0$ )

Berdasarkan hasil uji t-hitung pada Tabel 40 diketahui bahwa usahatani dengan luas lahan 1 hektar nilai t-hitungnya adalah sebesar  $|-11,61|$ . Nilai t-

hitung tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel, sehingga hasil pengujiannya adalah tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$ . Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa usahatani dengan luas lahan 1 hektar, pendapatan petani responden sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP berbeda nyata.

#### **6.3.4 Analisis R/C Rasio Sebelum dan Setelah PUAP**

Hasil analisis imbalan penerimaan dan biaya (*R/C ratio analysis*) usahatani padi yang diusahakan oleh petani responden menunjukkan bahwa usahatani ini memiliki penerimaan yang lebih besar dibanding biaya usahatani. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *R/C rasio* lebih besar dari satu. Artinya setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan maka akan memberikan penerimaan sebesar lebih dari satu satuan biaya atau usahatani tersebut menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan. Nilai *R/C rasio* atas biaya tunai sebelum adanya program PUAP sebesar 1,68. Artinya setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan pada usahatani dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar maka akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,68. Sementara itu apabila memasukkan sejumlah biaya yang diperhitungkan sebagai komponen biaya total, maka nilai *R/C rasio* sebesar 1,11. *Rasio* dengan nilai 1,11 berarti setiap pengeluaran biaya total sebesar Rp 1 akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,11 dengan luas lahan 1 hektar.

Selanjutnya adalah melihat nilai *R/C rasio* dari usahatani padi setelah adanya program PUAP. Analisis imbalan *R/C rasio* biaya tunai sebesar 1,70. Artinya adalah setiap pengeluaran tunai sebesar Rp 1 akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,70. Apabila dimasukkan biaya yang diperhitungkan sebagai komponen total biaya maka *R/C rasio* yang dihasilkan sebesar 1,15 yang berarti setiap pengeluaran biaya total Rp 1 maka akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,15

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diinformasikan bahwa nilai kedua *R/C rasio* di atas baik sebelum maupun setelah adanya program PUAP

menunjukkan nilai R/C *rasio* lebih besar dari satu yang berarti dapat dikatakan bahwa usahatani padi pada Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota layak diusahakan. Namun antara sebelum setelah adanya program PUAP terdapat perbedaan R/C *rasio* biaya tunai dengan R/C *rasio* biaya total. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 41.

**Tabel 41.** Perbandingan R/C *Rasio* Sebelum dan Setelah PUAP

<b>Uraian</b>	<b>Sebelum PUAP</b>	<b>Setelah PUAP</b>
R/C <i>rasio</i> biaya tunai	1.68	1.70
R/C <i>rasio</i> biaya total	1.11	1.15

Berdasarkan Tabel 41 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara R/C *rasio* biaya tunai dengan R/C *rasio* biaya total. Adanya perbedaan di kedua R/C *rasio* mengindikasikan bahwa para petani masih belum efisien menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang ada. Selain itu nilai R/C *rasio* biaya total yang lebih kecil dibandingkan dengan R/C *rasio* atas biaya tunai karena pada R/C *rasio* biaya total disertakan biaya yang diperhitungkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil akhir perhitungan R/C *rasio* atas biaya total. Diketahui bahwa biaya yang diperhitungkan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap biaya pengeluaran dalam usahatani padi di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota.

### **6.3.5 Implikasi dari Penelitian**

Tujuan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Terakhir

adalah untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Mekanisme pelaksanaan program PUAP ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Mulai dari tahap penyeleksian Gapoktan hingga pada pemantuan atau pengawasan pelaksanaan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, keefektifan penyaluran BLM-PUAP di Gapoktan wilayah Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota ditunjukkan dari hasil nilai persentase tunggakan yang tidak ada sama sekali. Selain itu juga dinilai dari tingkat bunga yang relatif kecil bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut yang membuat para petani termotivasi untuk melakukan peminjaman kepada pengurus Gapoktan masing-masing desa.

Salah satu tujuan utama yang terkait dengan pelaksanaan program PUAP adalah peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai dari peningkatan pendapatan petani. Walaupun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pendapatan secara positif atau mengalami peningkatan yang masih kecil, namun hal tersebut tidak mempengaruhi para responden dalam membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Kemampuan para petani penerima BLM-PUAP dalam mengembalikan angsuran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan usaha dan keluarga. Walaupun mereka belum bisa membuat pembukuan secara mendetail dan teratur. Namun hal tersebut merupakan potensi yang perlu ditingkatkan dan dijadikan dasar agar program PUAP di masa mendatang dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

Kedepan pengurus Gapoktan dan penyuluh pertanian juga harus menegaskan kembali kepada para petani atau anggota Gapoktan bahwa program BLM-PUAP bukanlah program amal atau bantuan yang terkesan bagi-bagi uang. Persepsi para petani harus mampu diubah dari pemikiran yang menganggap bahwa mereka adalah objek yang harus dikasihani ke arah pemikiran yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi petani mandiri dan sejahtera.

Meninjau hal-hal yang telah diuraikan di atas, perlu dipertimbangkan pula peran dari para penyuluh pertanian lapangan sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program PUAP ini. Pertimbangan pentingnya penyuluh pendamping perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusianya adalah karena penyuluh pendamping memiliki peran penting dalam menghubungkan dan mentransfer baik ilmu, teknologi baru hingga pada pemberian pelatihan guna meningkatkan keterampilan para petani. Selain itu dengan adanya penyuluh pertanian pendamping yang ditempatkan di tiap desa atau Gapoktan akan memberikan efek positif terhadap perkembangan Gapoktan sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan.

## VII KESIMPULAN

### 7.1 Kesimpulan

1. Sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif dan terbanyak berada pada kisaran umur 26-50 tahun. Penerima BLM-PUAP yang berprofesi sebagai petani sebagian besar berpendidikan rendah yakni hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan rata-rata telah berkeluarga. Petani yang menjadi responden adalah petani padi pemilik lahan sendiri dengan rata-rata pengalaman berusahatani yang dapat dikatakan sudah cukup lama.
2. Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Sebrang Kota memiliki karakteristik sebagai lembaga sosial ekonomi perdesaan yang memiliki struktur kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi. Masing-masing posisi jabatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama pentingnya. Jumlah Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Sebrang Kota sebanyak tiga Gapoktan terdiri dari: Gapoktan Hasil Berkah; Gapoktan Cahaya Murni; dan Gapoktan Rizki Usaha Berdua. Jumlah kelompok tani setelah adanya program PUAP sekitar 33 kelompok tani dengan jumlah anggota sekitar 549 orang. Kegiatan Gapoktan meliputi kegiatan keorganisasian yakni pertemuan yang diadakan dua minggu sekali. Kegiatan ekonomi dari Gapoktan antara lain kegiatan usahatani, berkebun dan lain sebagainya. Setelah adanya program PUAP, terdapat kegiatan baru yaitu menyusun rencana usaha anggota (RUA) dan rencana usaha bersama (RUB) yang bertujuan selain untuk memperoleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP, juga untuk melatih para petani dalam merumuskan dan menyusun rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing petani.
3. Berdasarkan hasil penelitian di tiga Gapoktan dengan menggunakan uji korelasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan sebelum dan setelah adanya PUAP berdasarkan indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan itu sendiri. Adapun indikator tersebut antara lain : (1) pertemuan/rapat dalam Gapoktan. (2) Keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama. (3) Rencana usaha



Gapoktan yang berorientasi pada kepentingan anggota. (4) Anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama-sama. (5) Anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di Gapoktan. (6) Adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus. (7) Gapoktan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dari hasil uji korelasi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya enam indikator yang memiliki hubungan korelasi antara sebelum dan sesudah adanya program PUAP dilaksanakan. Hubungan korelasi yang dimaksud adalah adanya perubahan secara positif dari kinerja Gapoktan setelah adanya PUAP.

4. Dari ketujuh indikator kinerja Gapoktan, dapat diinformasikan bahwa hanya terdapat tiga indikator kinerja Gapoktan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pendapatan anggota Gapoktan yakni: indikator keterlibatan anggota dalam penyusunan rencana usaha bersama; indikator anggota mengerjakan kegiatan pertanian secara bersama; dan indikator adanya aktivitas pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota maupun pengurus. Selebihnya sekitar empat indikator kinerja Gapoktan tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pendapatan anggota Gapoktan. Keempat indikator tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki agar pada program selanjutnya perannya dapat difungsikan dengan baik. Apabila ketujuh indikator kinerja Gapoktan tersebut dapat berfungsi dengan baik maka akan memberikan efek yang positif terhadap tingkat pendapatan anggota Gapoktan yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan.
5. Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan dalam menyalurkan dana BLM-PUAP ke anggotanya dapat dilihat dari kriteria keefektifan penyalurannya. Penyaluran BLM-PUAP dapat dikatakan sudah efektif karena tiga dari kriteria efektivitas penyaluran telah memenuhi kategori efektif (persentase tunggakan, tingkat bunga dan jangkauan pinjaman). Berdasarkan hasil perhitungan skor penilaian responden terhadap tolok ukur efektivitas penyaluran pinjaman, penyaluran dana PUAP termasuk kategori efektif. Tolok ukur yang memberi

kontribusi terbesar menurut nilai skor pada penilaian keefektifan diantaranya adalah pelayanan, tingkat bunga dan realisasi pinjaman.

6. Mayoritas responden petani menggunakan dana BLM-PUAP untuk menambah modal usahanya. Sebagian besar responden menyatakan ingin melakukan peminjaman kembali karena merasakan manfaat dari pinjaman tersebut. Rata-rata pendapatan anggota Gapoktan sebelum dan setelah menerima BLM-PUAP mengalami perubahan peningkatan. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t-hitung terhadap perubahan pendapatan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari pendapatan responden petani sebelum dan setelah adanya PUAP.

## **7.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja organisasi Gapoktan perlu dilanjutkan dan pengawasan terhadap kinerja Gapoktan perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi.
2. Peningkatan kinerja Gapoktan sebagai organisasi sosial ekonomi pedesaan dapat dilakukan melalui pengakajian beberapa indikator lain yang terkait dengan kinerja Gapoktan itu sendiri.
3. Perlunya diadakan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan terhadap perkembangan Gapoktan sebagai lembaga sosial ekonomi yang mempunyai peran penting di desa.
4. Peran penyuluh pertanian sangat diperlukan dan ditingkatkan lagi dalam upaya memotori, mengawasi dan memberikan arahan kepada Gapoktan agar mampu menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan memiliki kekuatan yang besar.
5. Masalah mengenai strategi pengembangan Gapoktan sebagai lembaga sosial ekonomi pedesaan perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Thohir. 2008. Analisis Pendapatan Usahatani Padi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani untuk Menanam Padi Hibrida (Studi Kasus Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor : Program Studi Sosial Ekonomi Industri Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Damayanti, Fitria S. 2007. Analisis Pendapatan dan Efisiensi Produksi Usahatani Padi Sawah (Kasus di Desa Purwoadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Sosial Ekonomi Industri Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Daerobi A, Hery S, Tetuko R. 2007. Dampak Pengembangan Sektor Pertanian Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal 2 (Januari) : 1-24*.
- Departemen Pertanian. Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Departemen Pertanian. 2008. Peraturan Menteri Pertanian No.16/OT.140/2/2008. Jakarta: Departemen Pertanian RI.
- Filtra, Eko. 2007. Evaluasi Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Sapi Potong Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. [Skripsi]. Bogor: Program Studi Sosial Ekonomi Industri Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Kasmadi. 2005. Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat Terhadap Kemandirian Petani Ternak. (Kasus pada Kelompok Tani Ternak Desa Bungai Jaya dan Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. [Skripsi]. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Lubis. 2005. Efektivitas Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Analisis Pendapatan Petani Pengguna Kredit (Studi Kasus pada Petani Tebu Anggota Koperasi Madusari, Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar, Solo). [Skripsi]. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Muslimin. 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*. Bogor: IPB Press.tidak dipublikasikan.

- Nisfiannoor. 2009. *Pengantar Statistik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pardosi, Riris P. 1998. Efektivitas Penyaluran Kredit Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dan Analisis Pendapatan Petani Pengguna Kredit (Studi Kasus di Wilayah Kerja BRI Cabang Sukabumi). [Skripsi]. Bogor: Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Rachmina, Dwi dan Burhanuddin. 2008. *Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi*. Bogor: Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Riyanto, Sudrajat. 2007. Analisis Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Ladang di Kabupaten Purwakarta (Kasus Kelompok Tani Jaya Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor: Program Studi Sosial Ekonomi Industri Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Soekartawi. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: UI Press.
- Sumarti, Titik, dkk. 2008. Model Pemberdayaan Petani Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera (Kajian Kebijakan dan Sosial Ekonomi Tentang Ketahanan Pangan pada Komunitas Desa Rawan Pangan Di Jawa). [Laporan Akhir]. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
- Sume, Harun A. 2008. Analisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) (Studi Kasus DPM-LUEP Kabupaten Bogor). [Tesis]. Bogor : Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* (Maret) : 15-35.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usmam dan Akbar. 2008. *Pengantar Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walpole, R.E. 1995. *Pengantar Statistika Edisi ke-3*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

**Lampiran 1. Data Produksi Padi Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008**

No	Kecamatan	Produksi (ton)											Jumlah (ton)	
		Jan	Feb	Ma	Apr	Mei	Jun	Jul	Agsts	Sept	Okt	Nov		Des
1	Tungkal Ilir	-	-	-	-	1.466	1.783	2.909	2.097	675	-	-	-	8.910
2	Betara	-	-	-	1.450	4.485	3.968	-	-	-	-	-	9.900	
3	Pengabuan	-	-	112	290	4.624	21.087	8.141	2.454	-	-	-	36.700	
4	Tungkal lu	23	1.581	1.530	142	9	31	676	1.060	983	7	-	6.030	
5	Merlung	13	1.030	1.771	-	-	-	-	-	-	-	-	2.810	
<b>Jumlah</b>		36	2.611	3.412	1.882	10.585	26.848	11.726	5.601	1.658	7	-	64.380	

Sumber : Distanak Tanjab Barat, 2009 (diolah)

**Lampiran 2. Data Produktivitas Padi Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008**

No	Kecamatan	Produktivitas (ton/ha)												Rata-Rata (ton/ha)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agsts	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Tungkal Ilir	-	-	-	-	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	-	-	-	3,41
2	Betara	-	-	-	3,38	3,38	3,38	-	-	-	-	-	-	3,38
3	Pengabuan	-	-	3,49	3,49	3,49	3,49	3,50	3,50	-	-	-	-	3,49
4	Tungkal Ulu	2,61	3,19	3,49	2,73	2,91	2,78	3,43	3,47	3,40	3,63	-	-	3,35
5	Merlung	3,16	2,30	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30

Sumber : Distanak Tanjab Barat, 2009 (diolah)

**Lampiran 3.** Struktur Organisasi Gapoktan Kecamatan Bram Itam dan Seberang,  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi

Nama Gapoktan : Hasil Berkah  
Alamat : Desa Pembangis  
Ketua : Rifa'i  
Sekretaris : M. Marzuki  
Bendahara : Habibullah  
Seksi-seksi :

1. Seksi Sarana Produksi

1. Ketua : Badrul
2. Anggota: M. Fatarni
3. Anggota: A. Gafar

2. Seksi Pengolahan Hasil

1. Ketua : Muprin
2. Anggota: Jamain
3. Anggota: Azlian

3. Seksi Simpan Pinjam

1. Ketua : Husni
2. Anggota: Hamrani
3. Anggota: H. Juaidi

4. Seksi Jasa Pemasaran dan Kerja Sama

1. Ketua : Ponijan
2. Anggota: Husin
3. Anggota: H. Talani

5. Seksi Jasa Informasi dan Teknologi

1. Ketua : Suhaili
2. Anggota: Robiyansyah
3. Anggota: Sarbani

- Nama Gapoktan : Cahaya Murni  
Alamat : Desa Tanjung Senjulang  
Ketua : Fahmi. K.S  
Sekretaris : M. Guntur  
Bendahara : Tabrani. J  
Seksi-seksi :
1. Seksi Sarana Produksi
    1. Ketua : Mugni
    2. Anggota: M. Nasir
    3. Anggota: Sutrisno
  
  2. Seksi Pengolahan Hasil
    1. Ketua : Armain
    2. Anggota: Junaid
    3. Anggota: Muslih
  
  3. Seksi Simpan Pinjam
    1. Ketua : Yusran
    2. Anggota: Idrus
    3. Anggota: Hasan Basri
  
  4. Seksi Jasa Pemasaran dan Kerja Sama
    1. Ketua : Darkasi
    2. Anggota: Aspawi
    3. Anggota: Rafani
  
  5. Seksi Jasa Informasi dan Teknologi
    1. Ketua : Nur Ahmad
    2. Anggota: Joko Sumantri
    3. Anggota: Sahyudi



- Nama Gapoktan : Rizki Usaha Berdua  
Alamat : Tungkal IV Desa  
Ketua : Aryani  
Sekretaris : Nuranik  
Bendahara : Sabri  
Seksi-seksi :
1. Seksi Sarana Produksi
    1. Ketua : Hasanudin
    2. Anggota: Mahpur
    3. Anggota: Rudi
  
  2. Seksi Pengolahan Hasil
    1. Ketua : A. Karim
    2. Anggota: Ahyar
    3. Anggota: Sukadi
  
  3. Seksi Simpan Pinjam
    1. Ketua : Marhat
    2. Anggota: A. Muhit
    3. Anggota: Darwin
  
  4. Seksi Jasa Pemasaran dan Kerja Sama
    1. Ketua : Arifin
    2. Anggota: M. Nur
    3. Anggota: Arpandi
  
  5. Seksi Jasa Informasi dan Teknologi
    1. Ketua : Masud
    2. Anggota: A. Sanii
    3. Anggota: Udin

**Lampiran 4.** Rata-Rata Pendapatan Petani Responden Per Hektar di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota Sebelum Adanya PUAP

Uraian	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Volume Rata-Rata (Rp)	Nilai Rata-Rata (Rp)	Persentase (%)
<b>A. Penerimaan Usahatani</b>					
A.1 Penerimaan Tunai	Kg	3000	2,282	6,844,667	89.75
A.2 Penerimaan Diperhitungkan	Kg	3000	261	782,000	10.25
<b>A.3 Total Penerimaan Usahatani</b>	Kg	3000	2,542.22	<b>7,626,667</b>	100.00
<b>B. Biaya Usahatani</b>					
B.1 Biaya Tunai:					
1. Benih	Kg	5000	36	179,389	2.62
2. Pupuk:					
2.1 Urea	Kg	1200	328	394,000	5.75
2.2 SP-36	Kg	1550	114	176,183	2.57
2.3 KCL	Kg	1400	80	112,467	1.64
2.4 ZA	Kg	1050	91	95,947	1.40
3. Pestisida:					
3.1 Pestisida Padat	Kg	2000	2	4,967	0.07
3.2 Herbisida	ml	60	1,085	65,120	0.95
3.3 Insektisida	ml	30	1,085	32,560	0.48
4. Tenaga Kerja Luar Keluarga	HOK	40000	75	3,007,556	43.92
<b>Total Biaya Tunai</b>				<b>4,068,188</b>	59.41
B.2 Biaya Diperhitungkan:					
1. Tenaga Kerja Dalam Keluarga	HOK	40000	43.38	1,735,111	25.34
2. Penyusutan Alat	-	-		44,743	0.65
3. Sewa Lahan	Ha	1,000,000		1,000,000	
Total Biaya Diperhitungkan	-	-		2,779,854	25.99
<b>C. Total Biaya Usahatani (B1+B2)</b>	-	-		<b>6,848,042</b>	85.40
D. Pendapatan Atas Biaya Tunai (A3-B1)	-	-		2,776,479	
<b>E. Pendapatan Atas Biaya Total (A3-C)</b>	-	-		<b>778,625</b>	

F. Pendapatan Tunai (A1-B1)	-	-		2,776,479	
G. R/C atas Biaya Tunai (A1/B1)	-	-		1.68	
H. R/C atas Biaya Total (A3/C)	-	-		1.11	

**Lampiran 5.** Rata-Rata Pendapatan Petani Responden Per Hektar di Kecamatan Bram Itam dan Seberang Kota Setelah Adanya PUAP

Uraian	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	Persentase (%)
<b>A. Penerimaan Usahatani</b>					
A.1 Penerimaan Tunai	Kg	3000	2,470.56	7,411,667	90.46
A.2 Penerimaan Diperhitungkan	Kg	3000	260.67	782,000	9.54
<b>A.3 Total Penerimaan Usahatani</b>	Kg	3000	2,731.22	<b>8,193,667</b>	100.00
<b>B. Biaya Usahatani</b>					
<b>B.1 Biaya Tunai:</b>					
1. Benih	Kg	5000	43.33	216,667	3.03
2. Pupuk:					
2.1 Urea	Kg	1200	155.94	187,133	2.62
2.2 SP-36	Kg	1550	106.00	164,300	2.30
2.3 KCL	Kg	1400	69.43	97,207	1.36
2.4 ZA	Kg	1050	68.82	72,263	1.01
3. Pestisida:					
3.1 Pestisida Padat	Kg	2000	2.47	4,933	0.07
3.2 Herbisida	ml	60	1,071.67	64,300	0.90
3.3 Insektisida	ml	30	1,063.33	31,900	0.45
4. Tenaga Kerja Luar Keluarga	HOK	40000	75.26	3,010,222	42.11
5. Angsuran Pinjaman				520,000	7.27
<b>Total Biaya Tunai</b>				<b>4,368,926</b>	61.11
<b>B.2 Biaya Diperhitungkan:</b>					
1. Tenaga Kerja Dalam Keluarga	HOK	40000	43.38	1,735,111	24.27
2. Penyusutan Alat	-	-	-	44,743	0.63

3. Sewa Lahan	Ha		1,000,000		1,000,000	
<b>Total Biaya Diperhitungkan</b>	-	-	-	-	<b>2,779,854</b>	24.90
<b>C. Total Biaya Usahatani (B1+B2)</b>	-	-	-	-	<b>7,148,780</b>	86.01
D. Pendapatan Atas Biaya Tunai (A1-B1)	-	-	-	-	3,042,741	-
<b>E. Pendapatan Atas Biaya Total (A3-C)</b>	-	-	-	-	<b>1,044,887</b>	-
F. Pendapatan Tunai (A1-B1)	-	-	-	-	3,042,741	-
G. R/C atas Biaya Tunai (A1/B1)	-	-	-	-	1.70	-
H. R/C atas Biaya Total (A3/C)	-	-	-	-	1.15	-

**Lampiran 6.** Perhitungan Skor Efektivitas Penyaluran BLM-PUAP

<b>Tolok Ukur</b>	<b>Skor</b>	<b>Jumlah Responden (Orang)</b>	<b>Total Skor</b>
1	2	3	(3x4)
<b>Persyaratan Awal</b>			
Mudah	3	9	27
Sedang	2	21	42
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	69
<b>Prosedur Peminjaman</b>			
Mudah	3	12	36
Sedang	2	18	36
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	72
<b>Realisasi Pinjaman</b>			
Mudah	3	19	57
Sedang	2	11	22
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	79
<b>Biaya Administrasi</b>			
Mudah	3	12	36
Sedang	2	18	36
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	72
<b>Bunga</b>			
Mudah	3	20	60
Sedang	2	10	20
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	80
<b>Pelayanan</b>			
Mudah	3	17	51
Sedang	2	13	26
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	77
<b>Jarak</b>			
Mudah	3	7	21
Sedang	2	23	46
Sulit	1	0	0
<b>Sub Total</b>		30	67
<b>Total Skor</b>			<b>516</b>

<b>Kategori</b>				<b>efektif</b>
-----------------	--	--	--	----------------

**Lampiran 7. Output Minitab Uji t-hitung Perubahan Pendapatan Paired T For  
Pendapatan Usahatani Padi Responden Sebelum dan Setelah  
Memperoleh BLM-PUAP**

8/27/2009 12:09:32 AM

Welcome to Minitab, press F1 for help.

**Paired T-Test and CI: Pendapatan Sebelum PUAP, Pendapatan Setelah  
PUAP**

Paired T for Pendapatan Sebelum PUAP - Pendapatan Setelah PUAP

	N	Mean	StDev	SE Mean
Pendapatan Sebel	30	996625	368699	67315
Pendapatan Setel	30	2044887	604504	110367
Difference	30	-1048262	494478	90279

95% CI for mean difference: (-1232903, -863621)

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -11.61

P-Value = 0.000

## **Lampiran 8 . Profil Gapoktan di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Seberang Kota**

### **1. Profil Gapoktan Cahaya Murni**

Gapoktan Cahaya Murni didirikan pada hari Senin, 25 Desember 2007 di Desa Tanjung Senjulung, Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gapoktan ini diketuai oleh Bapak Fahmi. K.S. Beliau bekerja sebagai seorang petani. Selain itu itu beliau juga berkebun. Sekret yang menjadi tempat administrasi kegiatan Gapoktan merupakan rumah yang dimiliki oleh Bapak Fahmi.

Pendirian Gapoktan Cahaya Murni tidak terlepas dari adanya peran Ibu Yudani. Beliau berprofesi sebagai PPL THL (Penyuluh Pertanian Lapangan Tenaga Harian Lepas). Berbekal informasi dari Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten untuk mensosialisasikan program PUAP di desa tempat beliau bertugas, beliau bersama kepala desa serta para ketua kelompok tani di desa Tanjung Senjulung merintis untuk mendirikan Gapoktan. Melalui proses yang cukup panjang, maka berdasarkan hasil musyawarah bersama terbentuklah Gapoktan yang diberi nama Cahaya Murni. Gapoktan ini merupakan gabungan kerjasama dari beberapa kelompok tani yang difasilitasi dan diberdayakan pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan yang sama dalam mengembangkan agribisnis komoditas pertanian, perikanan dan peternakan.

Selain agar bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PUAP, pendirian Gapoktan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan serta masyarakat tani melalui penerapan-penerapan akidah teknologi pertanian dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pada awal pendirian Gapoktan jumlah kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Cahaya Murni yakni sebanyak tujuh kelompok tani antara lain: (1) Kelompok tani Maju bahagia; (2) Kelompok tani Karya Tani; (3) Kelompok tani Supersemar; (4) Kelompok tani Ada Harapan; (5) Kelompok tani Bunga



Tanjung I; (6) Kelompok tani Usahatani dan terakhir ke (7) Kelompok tani Usaha Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Gapoktan Cahaya Murni menyatakan bahwa kegiatan Gapoktan sebelum program PUAP dilaksanakan adalah adanya kegiatan pertemuan yang diadakan dua kali dalam sebulan. Pertemuan tersebut bertujuan guna mendiskusikan permasalahan-permasalahan kelompok tani di lapangan. Pertemuan tersebut turut dihadiri juga oleh penyuluh pertanian. Walaupun pertemuan tersebut semi formal dan hanya dihadiri oleh ketua kelompok tani, namun pelaksanaannya cukup baik.

Manfaat yang diperoleh dari adanya kegiatan tersebut adalah meningkatnya hubungan silaturahmi antar kelompok tani di desa tersebut. Muncul kembali rasa gotong royong dalam membersihkan jalan desa dan lahan pertanian dan lain sebagainya.

## **2. Profil Gapoktan Rizki Usaha Berdua**

Gapoktan Rizki usaha berdua secara resmi didirikan pada hari Senin, 14 Mei 2007 di Desa Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota. Ketua Gapoktan tersebut bernama Aryani, berprofesi selain sebagai petani juga sebagai nelayan. Gapoktan Rizki usaha berdua merupakan satu-satunya Gapoktan di Desa Tungkal IV Desa yang terdiri dari empat kelompok tani yang telah terlebih dahulu berdiri di daerah tersebut. Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Rizki Usaha Berdua antara lain: Kelompok tani Karya Maju, Kelompok tani Harapan Jaya, Kelompok tani Karya Indah dan Kelompok Tani Kenanga.

Semenjak resmi berdiri sampai dengan saat ini, total anggota Gapoktan Rizki Usaha Berdua sebanyak 105 orang petani, dimana anggota dari masing-masing Poktan Karya Maju berjumlah 25 orang petani; Poktan Harapan Jaya berjumlah 25 orang petani; Poktan Karya Indah berjumlah 25 orang petani dan Poktan Kenanga berjumlah 30 orang petani.

Latar belakang didirikannya Gapoktan Rizki Usaha Berdua diawali atas inisiatif dari petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Tungkal UV Desa, yaitu Bapak Wasimin serta ketua dari ke empat Poktan yang sepakat untuk menyatukan ke empat Poktan menjadi satu Gapoktan. Penyatuan Poktan menjadi Gapoktan didasari beberapa pertimbangan diantaranya untuk mempermudah koordinasi antar kelompok tani serta mempermudah juga koordinasi dan penyuluhan pertanian. Gapoktan juga dapat digunakan sebagai perpanjangan tangan ke pemerintah baik dalam hal administrasi maupun pengajuan pinjaman. Pembentukan Gapoktan mendapat respon positif dari petani sekitar terutama anggota dari masing-masing kelompok tani. Hal tersebut dikarenakan ide awal pembentukannya berasal dari para petani tersebut. Proses pembentukan Gapoktan dari inisiatif hingga turunnya SK. Bupati memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun.

Pada Bulan Desember 2008 pengajuan dana PUAP yang dilakukan oleh Gapoktan Rukun Makmur mendapat persetujuan. Tahapan untuk mendapatkan dana PUAP ini meliputi 1) perumusan RUK oleh masing-masing kelompok tani. 2) para ketua kelompok tani mewakili kelompok taninya untuk merumuskan RUB

Gapoktan bersama ketua Gapoktan dengan dibantu oleh penyuluh pertanian. Setelah Gapoktan menerima BLM-PUAP, selanjutnya dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan simpan pinjam guna membiayai segala usaha yang terkait dengan pertanian, terutama budidaya tanaman padi dan perkebunan. Pemberian pinjaman ini disertai dengan beban bunga 0,5 persen untuk masa pengembalian 6 bulan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Gapoktan yang ingin memperoleh pinjaman antara lain:

1. Peminjam harus anggota kelompok tani Desa Tungkal IV Desa.
2. Foto copy KTP yang masih berlaku dan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.
3. Menanda tangani surat perjanjian di atas materai.
4. Menanda tangani kwitansi di atas materai.
5. Harus menyertakan agunan atau jaminan berupa surat berharga (sertifikat tanah/bangunan, sporadik).
6. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam rapat bersama.
7. Mengisi formulir permohonan pinjaman.

Dalam upaya mendukung kesuksesan program PUAP ini, penyuluh pertanian lapangan, ketua Gapoktan dan lembaga institusi pemerintah daerah saling bekerja sama dalam mengontrol pelaksanaan program tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penyelewengan dana PUAP yang dilakukan oleh para pengurus, dan tidak adanya potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Dana PUAP disalurkan dengan transparan dan amanah secara bertahap. Segala perkembangan mengenai dana PUAP disampaikan secara terbuka kepada anggota melalui rapat bersama, sehingga seluruh anggota mengetahui pemanfaatan dana PUAP.

Saat ini jumlah realisasi dana PUAP yang disalurkan kepada anggota Gapoktan Rizki Usaha Berdua baru 50 persen atau sebesar Rp 50 juta. Pertimbangan melakukan kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara PPL dengan pengurus Gapoktan. Pertimbangan ke dua adalah untuk melakukan tahap uji kelayakan kegiatan simpan pinjam dimana PPL dan pengurus Gapoktan

akan menilai perilaku para anggotanya dalam memanfaatkan dana PUAP dan dalam melakukan pelunasan atas pinjaman PUAP tersebut.

Apabila tahapan uji coba tersebut dinilai berhasil baik dalam pemanfaatannya maupun dalam pengembaliannya, maka pengurus Gapoktan akan merealisasikan dana PUAP sebesar 100 persen untuk disalurkan kepada anggota yang membutuhkan dan yang mampu memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman dana PUAP tersebut.

Seiring dengan perjalanannya, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan dalam Gapoktan baik sebelum maupun sesudah adanya program PUAP. Sebelum adanya program PUAP, kegiatan-kegiatan Gapoktan Rizki Usaha Berdua dapat dikatakan relatif masih sangat jarang diadakan. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh para anggota dan pengurus Gapoktan Rizki Usaha Berdua sebelum adanya program PUAP terbatas pada kegiatan diskusi dan penyuluhan tentang pertanian.

Setelah adanya program PUAP terdapat sedikit peningkatan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan dalam Gapoktan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Gapoktan Rizki Usaha Berdua dapat dikatakan pelaksanaannya cukup rutin. Beberapa kegiatan tambahan yang biasa dilakukan oleh para anggota dan pengurus Gapoktan Rizki Usaha Berdua sesudah adanya program PUAP seperti pembelian pupuk secara bersama atau kolektif, pengolahan lahan tanam secara bersama, penggunaan sistem irigasi pengairan, serta diskusi dan penyuluhan tentang pertanian seperti tentang hama penyakit yang menyerang tanaman, informasi teknologi dan sebagainya yang diadakan lebih kurang satu atau dua minggu sekali (tergantung permasalahan di lapangan).

Dari hasil keseluruhan wawancara terhadap responden anggota Gapoktan Rizki Usaha Berdua yang masing-masing mewakili tiap kelompok tani yang ada, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dengan adanya program PUAP yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia memberikan pengaruh yang positif yakni dapat meningkatkan aktivitas-aktivitas Gapoktan

## **2. Profil Gapoktan Hasil Berkah**

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hasil Berkah beralamat di Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gapoktan ini terdiri dari 10 kelompok tani (Poktan). Total jumlah anggota dari Gapoktan Hasil Berkah sebanyak 289 orang petani.

Kelompok-kelompok tani tersebut sudah cukup lama berkembang di Desa Pembengis, namun proses pendirian Gapoktan baru terjadi setelah adanya wacana mengenai pemberian dana PUAP yang ditujukan pada Gapoktan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. Wacana mengenai program tersebut disosialisasikan oleh PPL kepada beberapa kelompok tani di Desa Pembengis. Pada Bulan Desember tahun 2008 dibentuk Gapoktan Hasil Berkah dengan ketua Bapak Rifa'i.

Pembentukan gapoktan ini tidak terlepas dari peran Kepala desa dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa hanya memiliki peran yang sebatas formalitas saja, seperti masalah administrasi atau surat-surat, selain itu kepala desa bertindak sebagai komite pengawas dari gapoktan tersebut. Dalam pembentukan gapoktan ini, peran Bapak Rifa'i selaku ketua gapoktan lebih besar dibandingkan peran kepala desa. Sedangkan peran Penyuluh Pertanian adalah yakni Bapak Nasikin memberikan segala informasi mengenai agribisnis, informasi bantuan-bantuan dari pemerintah, dan memberikan informasi mengenai teknologi-teknologi yang sebaiknya digunakan oleh petani, serta membantu proses pembuatan SK Gapoktan Hasil Berkah.

Perencanaan pengajuan PUAP dimulai dengan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). RUB dan RUK tersebut berisi tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh para anggota Gapoktan Hasil Berkah. Kegiatan usaha yang diajukan terdiri dari usaha peternakan, perikanan, pertanian dan hortikultura. Gapoktan ini menerima dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000.

Setelah Gapoktan tersebut menerima dana PUAP, sesuai dengan kesepakatan dari pertemuan para ketua Gapoktan penerima PUAP maka dibentuklah unit kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam dilakukan

dengan tujuan untuk membantu para petani khususnya anggota Gapoktan dalam memenuhi kebutuhan modal usahatani mereka. Tentunya dalam teknis mengenai penyaluran dana PUAP tersebut turut serta para anggota harus mampu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus Gapoktan tersebut.

Pinjaman yang telah didapatkan oleh para anggota digunakan untuk tambahan modal, seperti untuk pembelian bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Dengan adanya pinjaman ini anggota tidak lagi kesulitan dalam hal permodalan sehingga hasil produksinya bisa lebih tinggi. Dana PUAP yang telah disalurkan oleh Gapoktan Hasil Berkah, sampai pada saat wawancara dilakukan, untuk unit usaha simpan pinjam adalah sebesar Rp 80 jutaan. Bersarnya pinjaman yang diberikan kepada anggota Gapoktan rata-rata sebesar Rp 500.000,00 dengan bunga pinjaman 5 persen.

Sebelum adanya program PUAP, kegiatan pertanian dilakukan hanya per kelompok tani saja, mulai dari gotong-royong dalam pengoahan lahan, pemeliharaan dan pemanenan. Namun setelah adanya PUAP, kegiatan Gapoktan Hasil Berkah mulai menunjukkan perubahan yang lebih baik. Perubahan kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan tersebut diantaranya kegiatan pertanian yang dilakukan secara gotong-royong, pembelian benih dan pupuk dilakukan secara kolektif dan pertemuan yang rutin dengan lebih memadatkan isi materi pertemuan khususnya masalah yang ada di lapangan. Turut aktif juga PPL yang bertugas disana dalam membina dan memberikan penyuluhan seputar permasalahan pertanian di Desa Pembengis, pengenalan teknologi baru serta mengontrol dan mengawasi kegiatan unit simpan pinjam dari Gapoktan tersebut.

Adanya program PUAP dapat disimpulkan secara sementara memiliki pengaruh yang positif, antara lain adanya kegiatan gotong royong yang muncul kembali, petani penerima PUAP merasa terbantu dalam hal modal untuk berusahatani dan hasil produksi padi yang cukup meningkat.